

**ANALISIS PENERAPAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013
UNTUK WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI
PEREDARAN BRUTO TERTENTU**

(Studi Pada KPP Pratama Malang Utara)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**MAULIDA ALFI LOFIANA SA'DIYA
NIM. 125030400111040**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMISITRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2016**

MOTTO

“Berdoalah (mintalah) kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu”

(QS. Al-Mukmin: 60)

“Bahwasanya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya)”

(QS. An-Najm: 39-40)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
Untuk Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
(Studi Pada KPP Pratama Malang Utara)

Disusun oleh : Maulida Alfi Lofiana Sa'diya

NIM : 125030400111040

Fakultas : Ilmu Administrasi

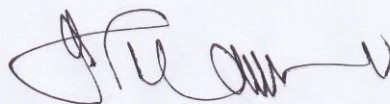
Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Konsentrasi : Perpajakan

Malang, 24 April 2016

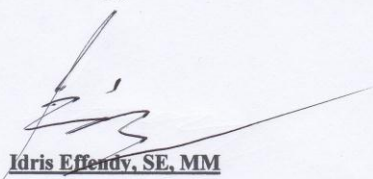
Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Siti Ragil Handayani M.Si
NIP. 19630923 198802 2 001

Anggota



Idris Effendy, SE, MM

TANDA PENGESAHAN

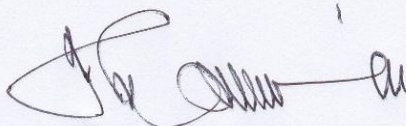
Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 4 Mei 2016
Jam : 12.00
Skripsi atas nama : Maulida Alfi Lofiana Sa'diya
Judul : Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2013 untuk Wajib Pajak yang Memiliki
Peredaran Bruto Tertentu (Studi Pada KPP Pratama
Malang Utara)

DAN DINYATAKAN LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



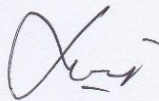
Dr. Siti Ragil Handayani M.Si
NIP. 19630923 198802 2 001

Anggota




Idris Effendy SE, MM

Anggota



Dra. Maria Gorreti Wi Endang NP M.Si
NIP. 19620422 198701 2 001

Anggota



Nurlita Sukma Alfandia SE, M.A
NIK. 2013048811112001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70.

Malang, 21 April 2016

Mahasiswa



Maulida Afri Lofiana Sa'diya

NIM. 125030400111040

RINGKASAN

Maulida Alfi Lofiana Sa'diya, 2016. Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 untuk Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Studi Pada KPP Pratama Malang Utara). Komisi Pembimbing, Ketua: Dr. Siti Ragil Handayani, M.Si. Anggota: Idris Effendy SE, MM. (161+xv halaman)

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP 46 Tahun 2013) merupakan kebijakan pemajakan baru yang diterbitkan pada pertengahan Tahun 2013 yang berusaha untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan, mengedukasi untuk tertib administrasi dan transparansi serta memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). PP 46 Tahun 2013 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas peredaran bruto Wajib Pajak dengan tarif 1% dan bersifat final. Dengan diterbitkannya PP 46 Tahun 2013, diharapkan kontribusi UMKM dapat meningkat dan seimbang sesuai dengan kontribusinya dalam perekonomian Negara Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan PP 46 Tahun 2013, kontribusi pajaknya terhadap penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2), serta pertumbuhan Wajib Pajak yang terutang PP 46 Tahun 2013. Penelitian ini mengambil studi pada KPP Pratama Malang Utara. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui Wawancara dan dokumenter.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan PP 46 Tahun 2013 berjalan dengan baik meskipun terdapat pro dan kontra dalam penerapannya. Hal ini terbukti melalui kesadaran Wajib Pajak akan kewajibannya serta penerimaan pajaknya yang selalu meningkat. Meskipun penerimaannya selalu meningkat. Kontribusi PP 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) masih Sangat Kurang, sedangkan pertumbuhan Wajib Pajak yang terutang PP 46 Tahun 2013 mayoritas selalu meningkat, hanya sektor usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Pajak.

KPP Pratama Malang Utara perlu meningkatkan pengawasan serta penggalan potensi Wajib Pajak yang memenuhi kriteria PP 46 Tahun 2013 melalui upaya persuasive sehingga dapat memaksimalkan pembinaan dalam penggalan potensi serta pengawasan kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya meningkatkan akses pertukaran informasi antara instansi lain agar dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan penggalan potensi Wajib Pajak dan selalu mengevaluasi penerapan kebijakan tersebut

Kata Kunci: PP 46 Tahun 2013, UMKM, Kontribusi, Kebijakan Pajak.

SUMMARY

Maulida Alfi Lofiana Sa'diya, 2016. Analysis of Implementation of the Government Regulation Number 46 Year 2013 for Taxpayers Who Have Specific Gross Turnover (Studies in North Malang Taxation Service Offices). The Name of Head Advisory Committee: Dr. Siti Ragil Handayani, M.Si. The Name of Members Advisory Committee: Idris Effendy SE, MM. (xv+161 pages)

The Government Regulation Number 46 Year 2013 (PP 46 2013) is a new taxation policy published in the middle of 2013 which seeks to provide facilities and simplification of the rules, educate for orderly administration and transparency as well as giving people the opportunity to contribute to the implementation of the state, especially Micro, Small and Medium Enterprises (MSMES). PP 46 2013 is income tax imposed on gross turnover's Taxpayers at the rate of 1% and be final. With the publication of the PP 46 2013, it is expected that the contribution of MSMES can be increased and balanced according to their contribution in the economy of the State of Indonesia.

This research aims to explain the application of PP 46 2013, gladly contribution toward the acceptance of Income Tax Article 4 paragraph (2), and the growth of the Taxpayer owed PP 46 2013. This research took a study on Taxation Service Offices North Malang. The type of this research is a descriptive with qualitative methods. The technique of data collection through interviews and documentaries.

The results of the study show that the implementation of the PP 46 2013 run well even though there are pros and cons in its application. It can be seen through the taxpayers's awareness with their duty as well as tax revenue that is always increasing. Although the revenue collected always increase, the contribution's PP 46 2013 against the Income Tax revenue Article 4 paragraph (2) is still very weak, meanwhile the growth of majority Taxpayer owed PP 46 2013 always increasing, only the business sector healthcare and social activities and Administration, Defense and Social Security Taxpayers.

Taxation Service Offices North Malang need to improve the control and excavation potential Taxpayers who fits the criteria of PP 46 2013 through persuasive efforts so that they can maximize guidance in quarrying the potential and monitoring tax compliance. While the Directorate General of Taxation should improve access to the exchange of information between other institutions in order to improve the quality of supervision and excavation potential Taxpayers and always evaluate the implementation of these policy.

Keywords: PP 46 2013, MSMES, contributions, Tax Policy.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahNYa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 untuk Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Studi Pada KPP Pratama Malang Utara)”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Program Studi Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Ibu Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi.
3. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si, selaku Ketua Program Studi Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi.
4. Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos., MAB, selaku Sekretaris Program Studi Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi
5. Ibu Dr. Siti Ragil Handayani M.Si selaku Ketua Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi hingga dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Alm. Dr. Srikandi Kumadji MS selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi.

7. Bapak Idris Effendy SE, MM selaku Anggota Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi hingga dapat diselesaikan dengan baik.
8. Bapak Ashari, selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara yang bersedia untuk menerima saya dalam menjalankan kegiatan riset penelitian.
9. Bapak Eko Suprianto Suprpto selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal yang telah memberikan arahan selama kami melaksanakan penelitian skripsi.
10. Bapak Cornelius Djoko, Ibu Isnaini, Bapak Bayu Aprianto, Bapak Hendro Sulisty, Bapak Satria, Bapak Yoga dan segenap karyawan KPP Pratama Malang Utara yang telah memberikan dukungan serta kesediaannya dalam menjadi narasumber dalam penelitian ini sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Ayah Drs. Achmad Drajat dan Ibu Nur Qomariyah S. Ag selaku orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan, motivasi serta mendoakan penulis agar selalu dilancarkan dalam proses penyelesaian skripsinya.
12. Adik Naila Rizky Rahmania, Adik Wildan Izza Ar-Raffi, serta Mbahti yang selalu memberikan dukungan, motivasi, doa yang tak kenal lelah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Sahabatku Watugong 16, Nie'matullah Rafik, Mbak Inayat Sa'diyah, Mbak Carindha Maza, Mbak Dita K Septianti, Adek Sella Devi Danuba selaku sahabat penulis yang selalu memberikan bantuan dan dukungan yang tidak kenal lelah.
14. Sahabatku tercinta nero, Ayrin, Gilar, Desy, Indri, Eli, Nizar, Sundaru, Uzeb, Gregga, Alvi yang selalu memberikan hiburan, semangat, dan motivasi. Terimakasih atas kehadiran kalian.
15. Terimakasih juga untuk Cisilia Prabawati Dwi Arini selaku teman seperjuangan saya yang selalu ada untuk memberi dukungan serta bantuan dalam menyelesaikan skripsi.
16. Seluruh teman-teman Program Studi Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya yang telah berjuang bersama dan membantu serta memberikan semangat.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan baik dalam penyajian materi maupun penyusunan skripsi. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan guna perbaikan di kemudian hari. Akhir kata, semoga laporan magang ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Maret 2016

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
TANDA PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
RINGKASAN	vi
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian	9
1. Secara Teoritis	9
2. Secara Praktis	9
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Empiris	12
B. Tinjauan Teoritis	17
1. Kontribusi	17
a. Pengertian Kontribusi	17
b. Kriteria Pengukuran Kontribusi	17
2. Kebijakan Fiskal (<i>fiscal policy</i>)	18
3. Pajak	19
a. Pengertian Pajak	19
b. Fungsi Pajak	21
c. Asas-Asas Pemungutan Pajak	22
d. Sistem Pemungutan Pajak	23
4. Wajib Pajak	24
a. Definisi Wajib Pajak	24
b. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak	25
5. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	27
a. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	27
b. Kewajiban Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	29
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	30
a. Maksud dan Tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	30

b. Kriteria yang dikenakan.....	31
c. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak	33
d. Kompensasi Kerugian.....	35
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/ PMK.011/2013.....	36
8. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-32/ PJ/ 2013	40
9. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-37/ PJ/ 2013	43
10.Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-42/ PJ/ 2013 .	45
11.Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-32/ PJ/ 2014 .	48
12.Peredaran Bruto Tertentu	53
13.Pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2)	54
a. Definisi Pajak Penghasilan	54
b. Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	54
14.Pertumbuhan Ekonomi.....	61
C. Kerangka Pemikiran	62
 BAB III METODE PENELITIAN	65
A. Jenis Penelitian	65
B. Fokus Penelitian	66
C. Lokasi dan Situs Penelitian	67
D. Sumber Data	68
E. Teknik Pengumpulan Data	69
F. Instrumen Penelitian.....	70
G. Analisis Data	71
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
A. Gambaran Umum Objek dan Lokasi Penelitian.....	76
1. Gambaran Umum Kota Malang	76
2. Gambaran Umum KPP Pratama Malang Utara.....	76
a. Sejarah KPP Pratama Malang Utara.....	76
b. Visi, Misi, dan Nilai-nilai Kementerian Keuangan di KPP Pratama Malang Utara	77
c. Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Malang Utara	78
d. Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Utara.....	80
e. Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Utara	83
B. Penyajian Data.....	85
1. Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2)...	85
2. Realisasi Penerimaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	92
3. Jumlah Wajib Pajak yang Terutang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	94
C. Analisis dan Interpretasi Data	99
1. Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	99
a. Mekanisme Perhitungan Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	99

b. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Utara	107
c. Dasar Pertimbangan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Utara	121
2. Analisis Kontribusi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2)	130
a. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Utara	130
b. Kontribusi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) di KPP Pratama Malang Utara	135
3. Analisis Pertumbuhan Wajib Pajak yang Terutang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.	140
a. Wajib Pajak yang terutang Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Utara	140
b. Implikasi pertumbuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Utara	145
 BAB V PENUTUP	155
A. KESIMPULAN	155
B. SARAN	156
 DAFTAR PUSTAKA	158

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.1	Jumlah Pertumbuhan Unit Usaha di Indonesia	2
2.1	Penelitian Terdahulu	15
2.2	Klasifikasi Pengukuran Kontribusi	18
2.3	Tarif atas Bunga Obligasi.....	56
4.1	Data Kecamatan Blimbing.....	83
4.2	Data Kecamatan Lowokwaru.....	84
4.3	Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Tahun 2013-2015	89
4.4	Realisasi Penerimaan Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Tahun 2013-Tahun 2015*)	92
4.5	Jumlah Wajib Pajak yang terutang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	94
4.6	Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak yang Terutang PP 46 Tahun 2013	97
4.7	Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Menggunakan Pembukuan dan PP 46 Tahun 2013	100
4.8	Perhitungan Pajak Penghasilan Menggunakan Norma dan PP 46 Tahun 2013	101
4.9	Realisasi Penerimaan PP 46 Tahun 2013 Setiap Bulan	115
4.10	Perbandingan Jumlah Wajib Pajak dengan Pegawai Pajak di KPP Pratama Malang Utara Tahun 2015.....	119
4.11	Pertumbuhan Penerimaan Pajak PP 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Utara	131
4.12	Rekapitulasi Penerimaan Objek Pajak Penghasilan Lain.....	133
4.13	Kontribusi Pajak PP 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) di KPP Pratama Malang Utara.....	136
4.14	Pertumbuhan Wajib Pajak yang memenuhi Kriteria PP 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Utara.....	141
4.15	Pertumbuhan Wajib Pajak serta Pembayaran PP 46 Tahun 2013 berdasarkan Kategori Usaha di KPP Pratama Malang Utara	147

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
2.1	Kerangka Pemikiran.....	64
4.1	Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Utara.....	82
4.2	Peta Kecamatan Blimbing.....	83
4.3	Peta Kecamatan Lowokwaru.....	84
4.4	Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).....	91
4.5	Realisasi Penerimaan Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015	93
4.6	Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak yang Terutang PP 46 Tahun 2013	96

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.....
2.	Pedoman Wawancara
3.	Surat Keterangan Riset
4.	Curriculum Vitae.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spritual (Waluyo,2011: 1). Dalam merealisasikan tujuan pembangunan nasional yang telah direncanakan, maka pemerintah perlu memperhatikan aspek pembiayaan pembangunan tersebut. Suatu negara akan dianggap mandiri apabila dalam pembiayaan pembanguan tersebut dapat menggali potensi dana dari dalam negeri. Salah satu instrumen penting dalam sektor pembiayaan Negara Indonesia adalah penerimaan pajak. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2015, penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp1.489,3 triliun atau 84,5% dari total pendapatan negara (<http://setkab.go.id/>, 2015).

Dalam mencapai target penerimaan pajak yang cukup tinggi, Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor yang belum optimal dalam penerimaan pajak. Pada saat ini pemerintah mulai melirik keberadaan sektor swasta yang memiliki potensi yang besar dalam penerimaan pajak, yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Meskipun omzet serta laba yang dihasilkan relatif rendah, namun keberadaaannya mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi. Sehingga sektor usaha ini dianggap bisa menjadi suatu sumber pendapatan bagi Direktorat Jenderal Pajak

untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Pertumbuhan unit usaha di Indonesia dirangkum dalam tabel 1.1:

Tabel 1.1 Jumlah Pertumbuhan Unit Usaha di Indonesia

Unit Usaha	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
UMKM	52.764.603	53.823.732	55.206.444	56.534.591
Usaha Besar	4.677	4.838	4.952	4.968

Sumber: *Data Statistik Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Indonesia*

Tabel 1.1 menyajikan mengenai pertumbuhan unit usaha di Indonesia. Berdasarkan tabel tersebut dari tahun ke tahun unit usaha di Indonesia mengalami pertumbuhan baik sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) maupun Usaha Besar, UMKM mendominasi sekitar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari total unit usaha di Indonesia. Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, menyatakan bahwa dengan mendominasi jumlah pelaku usaha nasional tak mengherankan bahwa UMKM dapat berkontribusi dalam pembentukan tenaga kerja sebesar 96,99% (sembilan puluh enam koma sembilan puluh sembilan persen) dan sebesar 60,34% (enam puluh koma tiga puluh empat persen) dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Tahun 2014 (<http://www.beritasatu.com>, 2014). Namun, presentase pembentukan PDB yang diberikan oleh UMKM tidak seimbang dengan kontribusi UMKM dalam penerimaan pajak, hal ini dibuktikan dari penerimaan pajak sebagian besar masih didominasi oleh wajib pajak besar yang jumlah unitnya kurang dari 1% (satu persen) (www.pajak.go.id, 2015). Rendahnya kontribusi wajib pajak UMKM ini mencerminkan kurangnya kepatuhan UMKM terhadap pembayaran pajak dan kesadaran pentingnya pajak dalam pembangunan nasional.

Dalam pemungutan pajaknya, Indonesia menerapkan sistem pemungutan *self assessment system* yang mana Wajib Pajak merupakan indikator penting dalam keberhasilan pemungutan pajak. Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang telah dibayarkannya. Permasalahannya adalah rendahnya perilaku Wajib Pajak yang aktif dalam proses pemungutan pajak sehingga penerimaan pajak yang telah dikumpulkan masih belum optimal. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Basuki Rakhmad, menyatakan beberapa keadaan yang menyebabkan rendahnya kepatuhan serta kesadaran wajib pajak khususnya UMKM dalam pembayaran pajak adalah sebagai berikut; UMKM yang didominasi oleh pelaku usaha rumah tangga kurang memahami peraturan ketentuan perpajakan, UMKM yang umumnya orang pribadi swa-usaha cenderung tidak melaporkan penghasilannya secara tidak benar dikarenakan Kantor Pajak tidak memiliki data lain untuk menguji total penghasilan yang diperoleh sebenarnya, selain itu proses pencatatan transaksi UMKM tersebut tidak tersusun rapi sehingga administrasi perpajakan dalam pengawasan kepatuhannya menjadi sulit (<http://www.pajak.go.id/>, 2015). Hal ini seharusnya dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam mempertimbangkan kebijakan pajak yang akan diterapkan sehingga pada penerapannya tidak akan ada multitafsir maupun kesalahan pemahaman Wajib Pajak terhadap Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang telah ditetapkan.

Apabila ditinjau dari segi peraturannya, tarif pajak penghasilan memang memiliki banyak variasi: misalnya peraturan pengenaan pajak dengan tarif progresif sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan untuk

Wajib Pajak Orang Pribadi, pengenaan pajak dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Selain itu terdapat salah satu insentif pengurangan tarif sebesar 50% sesuai dengan Pasal 31E Undang-undang Pajak Penghasilan yang diberikan Pemerintah bagi Wajib Pajak Badan yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Banyaknya variasi peraturan peraturan perpajakan yang sulit dimengerti oleh beberapa lapisan masyarakat tertentu dan memerlukan keahlian dan pengetahuan khusus dalam perhitungannya merupakan salah satu faktor penyebab wajib pajak enggan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam mengatasi problematika ini adalah meluncurkan kebijakan penerapan perpajakan baru berupa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP 46 tahun 2013) diterbitkan bertujuan untuk meningkatkan kesukarelaan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. PP 46 Tahun 2013 merupakan pajak yang dikenakan atas Wajib Pajak yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak

melebihi Rp 4.800.000.000 (Empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak dengan tarif 1% (satu persen) yang dikalikan dengan jumlah peredaran bruto dan dikenakan secara final. Sehingga dalam pelaksanaannya Wajib Pajak akan lebih mudah dalam menghitung Pajak Penghasilan yang terutang dikarenakan PP 46 tahun 2013 ini diperoleh dari total peredaran bruto bukan dari laba bersih yang didapatkan oleh Wajib Pajak.

Pengenaan Pajak Penghasilan sesuai dengan PP 46 Tahun 2013 merupakan penerapan dari *presumptive tax* dengan menggunakan presentase dari peredaran bruto untuk menghitung Pajak Penghasilan yang terutang. *Presumptive Tax* merupakan perhitungan kewajiban pajak yang dilakukan secara tidak langsung dengan anggapan bahwa jumlah penghasilan yang diterima Wajib Pajak tidak lebih kecil dari jumlah penghasilan yang ditentukan secara tidak langsung (Thuronyi, 1996: 401). Pengenaan pajak tersebut biasanya digunakan untuk kelompok *hard to tax* yang diisinyalir tidak bersedia secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan mereka yang sudah terdaftar, tetapi tidak melaporkan penghasilan yang sebenarnya (Terkper, 2003). Kelompok *hard to tax* tersebut sesuai dengan Wajib Pajak pengusaha kecil dan menengah yang dimaksud dalam PP 46 Tahun 2013. Pengenaan *presumptive tax* dilakukan untuk memperoleh kesederhanaan, mengurangi beban administrasi dari Wajib Pajak maupun dari fiskus, serta mengeliminir penghindaran dan penyelundupan pajak (Thuronyi, 2003 dalam Tambunan, 2013). Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan penerbitan PP 46 Tahun 2013 yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya salah satunya penyetoran pajak dengan aturan yang mudah dan sederhana.

Meskipun telah dikemas dengan berbagai pertimbangan yang baik, namun penerapan PP 46 Tahun 2013 tidak lepas dari pro-kontra yang terjadi pada pihak – pihak yang terkait. PP 46 Tahun 2013 dianggap telah mengabaikan prinsip pemungutan pajak yaitu keadilan (*equality*) atau kemampuan membayar (*ability to pay*) dari Wajib Pajak sendiri (Tambunan, 2013). PP 46 Tahun 2013 dinilai hanya upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa memperhatikan sisi subjektif masing-masing Wajib Pajak. PP 46 Tahun 2013 dikenakan atas seluruh perputaran uang dari kegiatan usaha Wajib Pajak tanpa memperhatikan tanggungan Wajib Pajak. Sehingga walaupun Wajib Pajak yang bersangkutan mengalami rugi, terhadap usahanya akan dikenakan Pajak Penghasilan PP 46 tahun 2013. Hal ini tentu merugikan untuk beberapa Wajib Pajak dan tidak memenuhi aspek keadilan dalam prinsip pemungutan pajak. Kebijakan PP 46 tahun 2013 diharapkan dapat memenuhi aspek keadilan bukan hanya kemudahan dan kesederhanaan dalam perhitungan pajak oleh Wajib Pajak. Tambunan (2003) menyatakan *simplified tax system* tidak melulu terletak pada *simplified tax calculation* akan tetapi dipahami sebagai upaya untuk meminimalkan *cost of compliance* bagi Wajib Pajak.

Meskipun terdapat kontra dalam penerapan PP 46 Tahun 2013. PP 46 Tahun 2013 merupakan objek penerimaan pajak baru yang dianggap telah berhasil, dikarenakan PP 46 Tahun 2013 dapat menjaring Wajib Pajak yang sebelumnya tidak dikenakan pajak sehingga dapat ikut berkontribusi dalam penerimaan negara melalui pajak. Berdasarkan sifat pajaknya PP 46 Tahun 2013, dikenakan secara

final, sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mana objek PPh dapat diatur kembali melalui Peraturan Pemerintah. Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan PP 46 Tahun 2013 ini digolongkan dalam Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2. Sehingga pada pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 akan selalu mempengaruhi tingkat penerimaan PPh Pasal 4 ayat 2. Dalam penelitian milik Astri Corry N Ds tentang Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) menyatakan bahwa kontribusi pajak PP 46 Tahun 2013 terhadap PPh Pasal 4 ayat (2) selama kurun waktu lima bulan sejak diterapkannya PP 46 tahun 2013 masih dalam kategori sangat kurang, walaupun pertumbuhan Wajib Pajak selama kurun waktu tersebut mengalami peningkatan. Padahal sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa UMKM memiliki potensi yang besar dalam perekonomian Indonesia. Kesenjangan tersebut menjadi menarik untuk diteliti mengenai potensi Wajib Pajak serta kontribusinya melalui pembayaran PP 46 Tahun 2013.

KPP Pratama Malang Utara merupakan instansi dibawah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memiliki wilayah kerja yang membawahi 2 (dua) kecamatan besar di Kota Malang yaitu: Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Lowokwaru. Wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara yang terletak di pusat Kota Malang tersebut memiliki potensi besar dalam penerapan PP 46 Tahun 2013. Jumlah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria PP 46 Tahun 2013 yang cukup besar, yaitu sebesar 37% dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada Tahun 2015. Dengan jumlah Wajib Pajak yang cukup besar, kontribusi serta pertumbuhan Wajib

Pajak yang memenuhi kriteria tersebut menjadi menarik untuk diteliti. Selain itu penelitian serupa di wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara belum pernah dilakukan. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukan adanya penelitian mengenai peran penerapan PP 46 Tahun 2013 dalam meningkatkan kepatuhan UMKM dalam pembayaran pajaknya, yang diharapkan dapat memicu kesadaran dan kesukarelaan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya yang nantinya akan menyumbang penerimaan negara khususnya dalam Penerimaan PPh Pasal 4 ayat 2 di KPP Pratama Malang Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Utara?
2. Bagaimana kontribusi penerapan PP 46 Tahun 2013 terhadap Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) ?
3. Bagaimana pertumbuhan Wajib Pajak yang terutang PP 46 Tahun 2013 dari tahun ke tahun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Utara.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kontribusi penerapan PP 46 Tahun 2013 terhadap Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2).
3. Mengetahui dan menjelaskan pertumbuhan Wajib Pajak yang terutang PP 46 Tahun 2013 dari tahun ke tahun.

D. Kontribusi Penelitian

Peneliti berharap mampu memberikan kontribusi baik aspek teoritis maupun aspek praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Sebagai sarana bagi penulis agar dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
- b. Hasil penelitian mengenai Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 diharapkan dapat dijadikan referensi dalam untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai media informasi dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya para Wajib Pajak mengenai Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya membayar pajak untuk pelaksanaan pembangunan nasional.

- b. Sebagai masukan dan evaluasi bagi Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

E. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, sistematika pembahasan penelitian skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang yang menjelaskan alasan penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian, rumusan masalah yang diangkat, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika pembahasan yang menjelaskan kerangka penulisan dari keseluruhan bab.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan mengenai teori yang mencakup teori kontribusi kebijakan fiskal, teori pajak, teori Wajib Pajak, klasifikasi UMKM, teori tentang PP 46 Tahun 2013, pertumbuhan ekonomi, PPh Pasal 4 ayat (2) dan konsep-konsep umum yang akan digunakan dalam penelitian, kerangka pemikiran serta, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan, yang dimulai dari jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen data, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis mencoba menjabarkan dan menganalisa data-data yang telah dikumpulkan dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, serta melakukan pembahasan atas analisa yang telah dibuat.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan dan saran dari penulis yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP Pratama Malang Utara dalam mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Dalam menunjang analisis data dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung penelitian ini. Penelitian tentang kontribusi pajak PP 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pasal 4 ayat (2) telah banyak dibahas oleh beberapa peneliti. Penelitian pertama oleh Corry (2014) tentang Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) (Studi Kasus pada KPP Pratama Malang Selatan). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode komparatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dalam penelitian ini adalah tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak PP No. 46 setiap bulannya terus mengalami peningkatan. Pada bulan Agustus mencatatkan angka 170 Wajib Pajak dan terus meningkat sampai pada bulan Desember mencatatkan angka 1.788 Wajib Pajak yang membayarkan pajaknya dan kontribusi yang diberikan oleh Pajak UMKM terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) selama kurun waktu 5 (lima) bulan sejak diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013 selalu meningkat meskipun masih dalam kategori sangat kurang.

Penelitian kedua yaitu, Hakim (2015) tentang Analisis Penerapan PP No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) pada KPP Pratama Manado. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 terhadap tingkat pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan terhadap penerimaan PPh pasal 4

ayat (2) pada KPP. Pratama Manado. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui interview, dokumentasi dan tinjauan kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah, setelah penerapan PP No 46 Tahun 2013 mengalami penurunan Wajib Pajak sebesar 0,23%, sedangkan rata-rata penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) dari PPh UMKM selama 17 bulan setelah pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013 adalah 3,89% dengan kriteria sangat kurang.

Penelitian ketiga yaitu, Yasa (2015) tentang Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil dalam penelitian ini adalah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan. Peningkatan paling signifikan terjadi pada sektor perdagangan dibandingkan dengan sektor manufaktur dan sektor jasa.

Penelitian keempat yaitu, Purbaningrum (2015) tentang Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada KPP Pratama Blitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan seberapa efektif hasil penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Blitar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian kepatuhan ini, keempat indikator yaitu pertumbuhan jumlah pemasukan pajak kategori PP 46 Tahun 2013, pertumbuhan jumlah Wajib

Pajak kategori PP No. 46 Tahun 2013, dan tingkat ketepatan waktu pembayaran pajak masa. menunjukkan hasil yang positif, tetapi hanya dua indikator yang menunjukkan hasil signifikan yang dapat diidentifikasi dengan perubahan kriteria. Hal ini menunjukkan bahwa PP No. 46 Tahun 2013 berjalan dengan efektif karena dengan jelas menunjukkan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian terdahulu dirangkum dalam Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Corry (2014)	Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) (Studi Kasus pada KPP Pratama Malang Selatan).	Metode deskriptif dan komparatif dengan pendekatan kualitatif.	Kontribusi PP 46 terhadap PP 46 Tahun 2013 selalu meningkat meskipun dalam kategori yang sangat kurang. Pertumbuhan Wajib Pajak terus meningkat sampai Desember.	Penulis sama sama menganalisis mengenai penerapan PP 46 Tahun 2013 melalui kontribusinya ke PPh Pasal 4 ayat (2) dan pertumbuhan Wajib Pajak.	Penulis menganalisis pertumbuhan Wajib Pajak berdasarkan Kategori Usaha. selain itu Kategori Kontribusi yang digunakan sesuai dengan Halim (2004,163)
2.	Hakim (2015)	Analisis Penerapan PP No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) pada KPP Pratama Manado	Metode deskriptif	Pertumbuhan Wajib Pajak mengalami penurunan 0,23%, sedangkan rata-rata kontribusinya selama 17 bulan sebesar 3,89% dengan kriteria sangat kurang.	Penulis sama sama menganalisis mengenai penerapan PP 46 Tahun 2013 melalui kontribusinya ke PPh Pasal 4 ayat (2) dan pertumbuhan Wajib Pajak	Penulis menganalisis pertumbuhan Wajib Pajak berdasarkan Kategori Usaha. selain itu Kategori Kontribusi yang digunakan sesuai dengan Halim (2004,163)
3.	Yasa (2015)	Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur	Pendekatan kualitatif	Penerapan PP 46 Tahun 2013 berdampak positif terhadap penerimaan PPh, peningkatan paling signifikan terjadi pada sektor perdagangan.	Penulis sama sama menganalisis mengenai penerapan PP 46 Tahun 2013 melalui pembayaran Wajib Pajak.	Penulis lebih menganalisis mengenai pertumbuhan Wajib Pajak yang terutang PP 46 Tahun 2013 dan kontribusinya terhadap pajak.

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Nama (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4.	Purbaningrum (2015)	Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada KPP Pratama Blitar	Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif	Penerapan PP 46 Tahun 2013 efektif dalam mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dinilai dari kategori pertumbuhan jumlah Wajib Pajak dan tingkat ketepatan pembayaran pajak masa.	Penulis sama sama menganalisis mengenai penerapan PP 46 Tahun 2013 melalui pembayaran Wajib Pajak.	Penulis menganalisis mengenai penerapan PP 46 Tahun 2013 melalui kontribusinya dalam PPh Psal 4 ayat (2) dan pertumbuhan Wajib Pajaknya.

Sumber: *Data diolah Peneliti (2015)*

B. Tinjauan Teoritis

1. Kontribusi

a. Pengertian Kontribusi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kontribusi adalah uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya); sumbangan. Sedangkan, menurut Kamus Ekonomi Guritno (1992:76) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Kontribusi dalam Bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi adalah sumbangan yang diberikan seseorang berupa dukungan, materi, tindakan terhadap suatu kegiatan tertentu. Dalam hal ini, kontribusi yang dimaksud adalah besar sumbangan yang diberikan dari penerimaan pajak atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dalam Penerimaan Pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 yang dipotong secara final.

b. Kriteria Pengukuran Kontribusi

Dalam mengetahui besar sumbangan pajak atas penghasilan terhadap Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu dalam Penerimaan Pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dapat dihitung dengan formula sebagai berikut (Halim, 2004: 163):

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan PP 46 Tahun 2013}}{\text{Penerimaan PPh Pasal 4 ayat 2}} \times 100\%$$

Dari formula tersebut dapat diketahui kriteria tingkat kontribusi penerimaan pajak PP 46 Tahun 2013 yang disajikan pada tabel 2.2:

Tabel 2.2 Klasifikasi Pengukuran Kontribusi

Presentase	Kriteria Pengukuran
0,0%-10%	Sangat Kurang
10%-20%	Kurang
20%-30%	Sedang
30 %-40%	Cukup Baik
40%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: *Halim (2004: 163)*

2. Kebijakan Fiskal (*fiscal policy*)

a. Definisi kebijakan fiskal

Definisi kebijakan fiskal dalam Rahardja dan Mandala (2004: 259) adalah “ Kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola/ mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah”. Kebijakan fiskal dapat dilakukan dengan merubah tarif pajak mengeluarkan peraturan baru mengenai pengenaan pajak dengan tujuan untuk memperluas basis pajak, meningkatkan penerimaan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan mengatasi masalah-masalah perekonomian. Fungsi fiskal dalam pembangunan ekonomi adalah alokasi barang public (*allocation*), distribusi pendapatan (*distribution*), dan stabilisasi (*stabilization*).

b. Jenis kebijakan fiskal

Kebijakan fiskal dalam Arifin (2007: 85) dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

1) *expansionary fiscal policy*

Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan pada saat perekonomian sedang menghadapi masalah pengangguran yang tinggi. Tindakan yang dilakukan pemerintah dapat dilakukan menurunkan tingkat pajak dan meningkatkan belanja pemerintah. Kebijakan tersebut digunakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

2) *contractive fiscal policy*

Kebijakan fiskal kontraktif yang dilakukan pada saat perekonomian mencapai kesempatan kerja penuh atau menghadapi inflasi. Tindakan yang dilakukan adalah mengurangi pengeluaran pemerintah dan memperbesar tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi.

3. Pajak

a. Pengertian Pajak

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Beberapa ahli perpajakan di luar negeri mengemukakan definisi pajak di masing-masing negaranya. Menurut Seligman, dalam Rahayu (2010: 21) menyatakan bahwa

“Tax is a Compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of without reference to special benefits conferred. Banyak yang keberatan atas without reference karena bagaimanapun juga uang-uang pajak tersebut digunakan untuk produksi barang dan jasa, jadi benefit yang diberikan kepada masyarakat, hanya tidak mudah ditunjukkan apalagi secara perorangan.”

Dalam definisi Prancis yang termuat dalam buku *Leroy Beaulieu* yang berjudul *Traite de la Science des Finances* berbunyi (Suandy: 8):

“L’impôt et la contribution, soit directe soit dissimulée, que La Puissance Publique exige des habitants ou biens pur subvenir aux dépenses du Gouvernement.” (“Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah”).

Definisi pajak menurut para ahli dalam negeri menurut Soemitro dalam Rahayu dan Suhayati (2010: 1) adalah

“Iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegenprestatie), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

S. I. Djajadiningrat mengemukakan definisi pajak (Resmi, 2012: 1) adalah

“Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang diterapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Dari pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan ciri-ciri yang melekat dalam pengertian pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak merupakan iuran yang dipungut berdasarkan peranturan maupun undang-undang yang bersifat memaksa.
2. Pajak dipungut oleh pihak yang berwenang baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Manfaat yang diterima dari pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan secara langsung, terlebih untuk masing-masing individu.
4. Pajak digunakan dalam membiayai pengeluaran pemerintah, pembangunan negara dan digunakan untuk membiayai *public investment*.

b. Fungsi Pajak

Definisi fungsi adalah kegunaan suatu hal. Dalam hal ini fungsi pajak adalah kegunaan pajak bagi negara. Menurut Mardiasmo (2011:1) ada dua fungsi pajak, yaitu:

- a. Fungsi *Budgetair*
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya.
- b. Fungsi mengatur (*Regulerend*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
Contoh:
 - a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
 - b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif
 - c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua fungsi pajak; yaitu pajak sebagai sumber dana dalam pembiayaan pemerintah (*budgetair*) dan pajak sebagai kebijakan untuk mengatur di bidang sosial dan ekonomi (*regurelend*).

c. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas dan prinsip pemungutan pajak yang baik menurut Adam Smith dalam buku *An Inquiry into the Nature and Cause of Wealth of Nations* dalam Sambodo (2015: 9) harus memenuhi 4 (empat) syarat berikut:

- a. *Equality on taxation*
Asas yang mensyaratkan bahwa hukum pajak haruslah adil, merata, dan tidak ada diskriminasi dalam menetapkan objek pajak, serta pembebanan kepada masing-masing subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya.
- b. *Certainty on taxation*
Asas kepastian hukum dalam perpajakan sebenarnya berlaku pula secara universal dalam bidang hukum lainnya. Aturan hukum pajak harus secara jelas dan pasti mengatur tentang apa yang menjadi objek pajak, siapa yang menjadi subjek pajak, berapa tarif yang berlaku, bagaimana cara menghitung dan membayarnya, kapan batas jatuh tempo pembayarannya dan pelaporannya, dan regulasi lain yang diperlukan, sehingga tidak ada celah dan peluang untuk mengelakkan diri dari pajak, menyelundupkan pajak, serta tidak mengenal kompromi.
- c. *Convenience on taxation*
Asas yang menyarankan agar pembayaran pajak dipungut pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat, yang paling sesuai dan menyenangkan bagi Wajib Pajak pada umumnya.
- d. *Efficiency on taxation*
Asas yang menyatakan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan dengan cara efisien dengan biaya administrasi yang hemat bagi aparat pajak, dan biaya kepatuhan yang murah bagi Wajib Pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak yang baik harus memenuhi 4 prinsip atau asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak dibagi menjadi 4 (empat) yaitu: asas keadilan

(*equality*) yang menekankan pada pemungutan pajak yang adil dan merata sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak, asas kepastian hukum (*certainty*) dimana hukum pajak yang berlaku harus memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak tentang kewajiban perpajakannya, asas kesenangan (*convenience*) yang menekankan bahwa pemungutan pajak seharusnya pada kondisi atau keadaan yang menyenangkan bagi Wajib Pajak dan dengan cara yang tepat, asas efisien (*efficient*) dimana biaya pemungutan pajak sebaiknya diusahakan agar biaya pemungutan pajak dan biaya pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat diminimalkan.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2013: 17), dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1. *Sistem Official Assessment*
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut
 - 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
 - 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
 - 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Sistem Self Assessment*
Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. *Sistem With Holding*
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan pemaparan tersebut, sistem pemungutan pajak terdiri dari tiga jenis, yaitu; *official assessment system* dimana fiskus memiliki kewenangan penuh dalam penentuan pajak yang terutang, *self assessment system* merupakan pemungutan pajak yang memberikan kewenangan bagi Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. *With holding system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan untuk memotong atau memungut pajak yang harus dibayar.

4. Wajib Pajak

a. Definisi Wajib Pajak

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak (Markus, 2005: 45) merupakan subjek pajak orang pribadi maupun badan telah memperoleh penghasilan (syarat objektif) dan syarat subjektif sebagai Wajib Pajak.

b. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban Perpajakan yang melekat terhadap Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan (Resmi: 2012) adalah sebagai berikut:

- 1) Mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
- 2) Melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan dilakukan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- 3) Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- 4) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- 5) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 6) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- 7) Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- 8) a. Memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dari memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/ atau
- c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

Hak-hak Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan adalah sebagai berikut:

- 1) Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa
- 2) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.

- 3) Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
- 4) Membetulan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan
- 5) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- 6) Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Nihil, Surat ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 7) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
- 8) Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

5. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Frisdianta dan Mukhlis, 2016:141-142):

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan Tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan, yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan Tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau hasil penjualan

Tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Sedangkan definisi pengusaha kecil menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/ PMK.03/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai adalah:

- (1) Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) Tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- (2) Jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah keseluruhan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya.

Dapat disimpulkan bahwa definisi Usaha Kecil, Mikro dan Menengah tersebut didasarkan pada kekayaan bersih maupun peredaran bruto/ hasil penjualan dalam suatu Tahun pajak.

b. Kewajiban Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam hal ini khususnya UMKM berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dalam adalah sebagai berikut (Resmi: 2012):

1. Mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

3. Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan dan Masa secara lengkap, jelas dan benar.
4. Membayar dan melaporkan Pajak terutang sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan dalam hal ini UMKM dikenakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
5. Melakukan pemungutan dan/ atau pemotongan Pajak

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu merupakan kebijakan pajak yang dikeluarkan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam pemungutan pajak. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 telah berlaku mulai 1 (satu) Juli 2013 merupakan upaya strategis dari Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor unit usaha yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

a. Maksud dan Tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Maksud dan tujuan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP 46 Tahun 2013) dalam Pajak Penghasilan Final 1% Bagi Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013) adalah sebagai berikut:

“Dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dimaksudkan untuk:

- 1) Memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan.
- 2) Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi.

- 3) Mengedukasi masyarakat untuk transparansi.
- 4) Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Tujuan dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, adalah:

- 1) Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- 2) Meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat.
- 3) Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.”

b. Kriteria yang dikenakan

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang memenuhi kriteria yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
- b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Terdapat pengecualian atas kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikenakan PPh Final sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, antara lain:

Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:

- a. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan

- b. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Selain itu, tidak seluruh Wajib Pajak Badan yang memiliki peredaran bruto tertentu akan dikenakan Pajak Penghasilan menurut PP 46 Tahun 2013. Berikut kriteria Wajib Pajak Badan yang dikecualikan dari Pajak Penghasilan sesuai dengan sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 Tentang Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, antara lain:

Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
- b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, PP 46 Tahun 2013 merupakan pajak yang dikenakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Dalam hal ini, tidak termasuk dalam kriteria ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usahanya meggunakan sarana prasarana yang dapat dibongkar pasang maupun menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, tidak termasuk kriteria yang dimaksud adalah Wajib Pajak Badan yang belum beroperasi secara komersial maupun Wajib Pajak Badan yang telah beroperasi secara komersial namun telah memilki peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus rupiah).

c. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, “Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen)”. Pajak Penghasilan tersebut terutang berdasarkan pada Peredaran Bruto dari usaha dalam 1 (satu) Tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.

Dalam menghitung Peredaran Bruto sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan yang terutang harus berdasarkan ketentuan PP 46 Tahun 2013, peredaran bruto yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha seluruhnya, termasuk dari usaha cabang. Selain itu dalam menghitung dasar pengenaan pajak yang akan dikenakan PPh final diatur lebih lanjut sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, adalah sebagai berikut:

1. didasarkan pada jumlah peredaran bruto Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini meliputi kurang dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
2. didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak terdaftar

pada Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini di bulan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku;

3. didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak yang baru terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Dapat disimpulkan bahwa perhitungan dasar pengenaan pajak harus didasarkan peredaran bruto terakhir sebelum Tahun pajak berlakunya PP 46 Tahun 2013 yang disetahunkan. Sedangkan apabila Wajib Pajak terdaftar pada Tahun pajak yang sama dengan berlakunya Tahun pajak PP 46 Tahun 2013 maka peredaran brutonya didasarkan dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan. Namun apabila Wajib Pajak baru terdaftar setelah berlakunya PP 46 Tahun 2013 maka jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, mengatur keadaan dimana Wajib Pajak:

- 1) Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.
- 2) Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Sehingga berdasarkan pasal tersebut, Apabila Wajib Pajak dalam suatu bulan, peredaran bruto kumulatifnya telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000 dalam suatu Tahun Pajak, maka Wajib Pajak akan tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan PP 46 Tahun 2013 sampai dengan akhir Tahun yang bersangkutan. Pada Tahun pajak berikutnya maka atas peredaran bruto tersebut akan dikenakan tarif Pajak Penghasilan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan.

d. Kompensasi Kerugian

Kompensasi Kerugian terkait dengan Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, adalah sebagai berikut:

“Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan menyelenggarakan pembukuan dapat melakukan kompensasi kerugian dengan penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kompensasi kerugian dilakukan mulai Tahun Pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) Tahun Pajak;
- b. Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tetap diperhitungkan sebagai bagian dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. kerugian pada suatu Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak dapat dikompensasikan pada Tahun Pajak berikutnya.”

Berdasarkan pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 Tanggal 30 Juli 2013 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha

Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto

Tertentu, pengajuan kompensasi kerugian diatur sebagai berikut:

- 1) Kerugian pada bulan Januari 2013 sampai dengan Juni 2013 dapat dilakukan kompensasi dengan penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final pada Tahun Pajak berikutnya.
- 2) Wajib Pajak yang melakukan kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melampirkan laporan rugi laba bulan Januari 2013 sampai dengan Juni 2013 dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2013.

Jadi apabila Wajib Pajak memiliki kerugian Pada Tahun Pajak 2014, maka atas kerugian tersebut dapat dikompensasikan hingga Tahun Pajak 2019. Kompensasi kerugian tersebut hanya berlaku terhadap penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan bersifat final pada Tahun berikutnya dengan menyertakan laporan laba rugi Wajib Pajak.

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/ PMK.011/2013

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/ PMK.011/ 2013 Tanggal 30 Juli 2013 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, merupakan penjelasan PP 46 Tahun 2013 mengenai tata cara dalam penyelesaian kewajiban perpajakannya. Dasar pengenaan pajak dari Pajak Penghasilan berdasarkan PP 46 Tahun 2013 merupakan peredaran bruto. Peredaran bruto yang dimaksud merupakan peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) Tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. Berdasarkan pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 Tanggal 30 Juli 2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas

Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu,

Peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha seluruhnya termasuk dari usaha cabang, tidak termasuk peredaran bruto dari:

- a. jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3);
- b. penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri;
- c. usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
- d. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Jasa-jasa yang sehubungan dengan pekerjaan bebas yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) menurut PP 46 Tahun 2013 sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 Tanggal 30 Juli 2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu meliputi:

- a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
- b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
- c. olahragawan;
- d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;.
- f. agen iklan;
- g. pengawas atau pengelola proyek;
- h. perantara;
- i. petugas penjaja barang dagangan;
- j. agen asuransi; dan
- k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multi level marketing) atau penjualan langsung (*direct selling*) dan kegiatan sejenis lainnya.

Apabila peredaran bruto dari usaha pada Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak tidak melampaui waktu 12 (dua belas) bulan, pengenaan Pajak Penghasilan yang dimaksud akan dihitung dengan jumlah peredaran bruto Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak bersangkutan yang disetahunkan. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh dari Wajib Pajak tersebut yang berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan yang dilakukan pemotongan dan/ atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain yang bersifat tidak final, maka dapat dibebaskan dari pemotongan dan/ atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain. Pembebasan sebagaimana dimaksud melalui Surat Keterangan Bebas (SKB). Surat Keterangan Bebas tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 Tanggal 30 Juli 2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu diberikan diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar atas nama Direktur Jenderal Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sebagaimana dimaksud, tidak diwajibkan melakukan pembayaran angsuran pajak sesuai Pasal 25 Undang-undang Pajak Penghasilan. Sedangkan apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan selain yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final, maka penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum

Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut diwajibkan angsuran pajak sesuai dengan Pasal 25 undang-undang Pajak Penghasilan. Perhitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung sesuai dengan pasal 9 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 Tanggal 30 Juli 2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu diberikan, adalah sebagai berikut:

“Besarnya angsuran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) pada Tahun Pajak pertama Wajib Pajak tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diatur ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf b dan huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, besaran angsuran pajak adalah sesuai dengan besarnya angsuran pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak tersebut;
- b. bagi Wajib Pajak selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, penghitungan besarnya angsuran pajak diberlakukan seperti Wajib Pajak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.”

Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi, maka jumlah penghasilan neto disetahunkan terlebih dahulu dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Angsuran pajak sesuai Pasal 25 UU PPh tersebut yang telah dipotong dan/ atau dipungut dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, kecuali terhadap Pajak Penghasilan yang dikenakan pajak secara final.

Penghasilan yang terutang sesuai dengan PP 46 Tahun 2013 tersebut wajib menyetor Pajak Penghasilan terutang ke kantor pos atau bank yang telah ditunjuk

Menteri Keuangan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP, yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. Wajib Pajak yang telah menyetor Pajak terutang sebagaimana dimaksud diwajibkan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak terakhir. Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan terutang dianggap telah menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tercantum pada Surat Setoran Pajak Penghasilan (Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013). Wajib Pajak yang atas seluruh atau sebagian penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final kewajiban penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilannya sesuai dengan Ketentuan dan Perundang-undangan Perpajakan beserta perubahannya.

8. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-32/PJ/2013

Wajib Pajak yang terutang Pajak Penghasilan PP 46 Tahun 2013 yang bersifat final, dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui Surat Keterangan Bebas yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas nama Direktorat Jenderal Pajak. Permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan tersebut diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP dengan syarat sesuai dengan

Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER- 32/PJ/2013 Tanggal 25 September 2013 Tentang Tata Cara Pembebasan Dari Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, adalah sebagai berikut:

- a. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukan permohonan, untuk Wajib Pajak yang telah terdaftar pada Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukannya Surat Keterangan Bebas
- b. menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menyatakan bahwa peredaran bruto usaha yang diterima atau diperoleh termasuk dalam kriteria untuk dikenai Pajak Penghasilan bersifat final disertai lampiran jumlah peredaran bruto setiap bulan sampai dengan bulan sebelum diajukannya Surat Keterangan Bebas, untuk Wajib Pajak yang terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat diajukannya Surat Keterangan Bebas;
- c. menyerahkan dokumen-dokumen pendukung transaksi seperti Surat Perintah Kerja, Surat Keterangan Pemenang Lelang dari Instansi Pemerintah, atau dokumen pendukung sejenis lainnya.
- d. ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.

Permohonan pembebasan sebagaimana yang dimaksud diajukan untuk setiap pemungutan dan/ atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 atas impor dan/ atau Pasal 23.

Berdasarkan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/ atau pemungutan Pajak Penghasilan, maka KPP harus menerbitkan keputusan paling lama 5 (lima) hari sejak permohonan diterima secara lengkap. Keputusan atas permohonan pembebasan tersebut terdiri dari Surat Keterangan Bebas atau Surat penolakan permohonan Surat Keterangan Bebas. Apabila dalam jangka waktu 5

(lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap Kantor Pelayanan Pajak belum juga menerbitkan keputusan, maka atas permohonan pembebasan tersebut dianggap diterima. Sehingga KPP wajib menerbitkan Surat Keterangan Bebas dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak jangka waktu tersebut terlewati. Surat Keterangan Bebas yang telah diterbitkan berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pemotong dan/ atau Pemungut pajak tidak melakukan pemotongan dan/ atau pemungutan Pajak Penghasilan atas setiap transaksi yang merupakan objek Pemotongan dan/ atau Pemungutan Pajak Penghasilan yang bersifat final apabila telah menerima fotokopi Surat Keterangan Bebas yang telah dilegalisasi oleh KPP tempat Wajib Pajak yang bersangkutan melaporkan SPT Tahunan. Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan Bebas harus menyampaikan permohonan legalisasi secara tertulis kepada KPP dengan persyaratan sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER- 32/PJ/2013 Tanggal 25 September 2013 Tentang Tata Cara Pembebasan Dari Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, adalah sebagai berikut:

“Permohonan legalisasi fotokopi Surat Keterangan Bebas diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak menyampaikan kewajiban Surat Pemberitahuan Tahunan dengan syarat:

- a. menunjukkan Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1);
- b. menyerahkan bukti penyetoran Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh

Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu untuk setiap transaksi yang akan dilakukan dengan pemotong dan/atau pemungut berupa Surat Setoran Pajak lembar ke-3 yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, kecuali untuk transaksi yang dikenai pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas:

- 1) impor;
 - 2) pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
 - 3) pembelian hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif dan industri farmasi;
 - 4) pembelian kendaraan bermotor di dalam negeri;
- e. mengisi identitas Wajib Pajak pemotong dan/atau pemungut Pajak Penghasilan dan nilai transaksi pada kolom yang tercantum dalam Surat Keterangan Bebas.
- f. ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.”

Fotokopi Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap untuk diberikan kepada KPP tempat Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan, kepada Wajib Pajak pemotong dan/ atau pemungut, dan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat potong dan/ atau pemungut terdaftar. Legalisasi fotokopi Surat Keterangan Bebas dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak permohonan legalisasi diterima secara lengkap. Apabila persyaratan yang dimaksud tidak dilengkapi maka legalisasi fotokopi Surat Keterangan Bebas tidak dipenuhi.

9. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-37/ PJ/ 2013

Wajib Pajak yang terutang PPh yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada PP 46 Tahun 2013 dapat menyetor Pajak terutang melalui ATM maupun Bank Presepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyetoran Pajak Penghasilan melalui ATM tersebut dilakukan dengan memasukan NPWP, Masa Pajak, dan jumlah nominal Pajak Penghasilan yang akan dibayar. Atas

penyetoran pajak melalui ATM, maka Wajib Pajak yang bersangkutan akan memperoleh Bukti Penerimaan Negara (BPN) dalam bentuk cetakan struk ATM.

Apabila terdapat kendala atau masalah terkait dengan pencetakan BPN sehingga BPN yang dimaksud tidak dapat tercetak ataupun telah tercetak namun tidak dapat terbaca, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pencetakan ulang BPN ke kantor cabang Bank Presepsi terdekat. Prosedur pencetakan ulang BPN tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur pada Bank Presepsi yang bersangkutan. BPN termasuk cetakan dan salinannya, merupakan sarana administrasi dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dalam rangka ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal terdapat perbedaan antara data pembayaran yang tertera di BPN dengan dalam Modul Penerimaan Negara (MPN), maka data pembayaran yang dianggap sah adalah data yang sesuai dalam MPN. BPN sebagaimana dimaksud setidaknya mencantumkan elemen-elemen sesuai dengan Pasal 4 ayat 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER- 37/PJ/2013 Tanggal 30 Oktober 2013 Tentang Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), adalah sebagai berikut: Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN); Nomor Transaksi Bank (NTB); Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Nama Wajib Pajak; Kode Akun Pajak; Kode Jenis Setoran; Masa Pajak; Tahun Pajak; Tanggal transaksi; dan Jumlah nominal pembayaran. Penyetoran Pajak Penghasilan melalui ATM diadministrasikan sebagai penerimaan Negara dengan Kode Akun Pajak 411128 (kode akun PPh

Final) dan Kode Jenis Setoran 420 (PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu).

10. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-42/ PJ/ 2013

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik badan maupun orang yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dikenai Pajak Penghasilan (PPh) bersifat final sesuai dengan PP 46 Tahun 2013. Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud terutang dihitung berdasarkan tarif 1% (satu persen) dari peredaran bruto untuk setiap bulan pada setiap tempat kegiatan usahanya. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Penentuan peredaran bruto bagi Wajib Pajak badan yang baru beroperasi secara komersial untuk pertama kali ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha 1 (satu) Tahun Pajak setelah Tahun Pajak beroperasi secara komersial, kemudian pengenaan PPh untuk Tahun selanjutnya ditentukan berdasarkan peredaran bruto Tahun Pajak sebelumnya.

Wajib Pajak wajib menyetor PPh yang bersifat final ke Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP dengan mengisi Kode Akun Pajak 411128 dan Kode Jenis Setoran 420. Wajib Pajak yang menyetor PPh yang bersifat final sebagaimana dimaksud akan tetapi

SSPnya tidak mendapatkan validasi dengan NTPN, maka wajib melaporkan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak yang bersangkutan terdaftar. Sedangkan apabila Wajib Pajak yang bersangkutan jumlah PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut nihil, maka tidak diwajibkan untuk melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2. PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu yang disetor dengan tidak menggunakan menggunakan Kode Akun Pajak 411128 dan Kode Jenis Setoran 420, sesuai dengan ketentuan dengan tata cara pembayaran pajak melalui pemindahbukuan. Ketentuan pemindahbukuan sesuai dengan huruf F butir 7 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE- 42/PJ/2013 Tanggal 2 September 2013 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, adalah sebagai berikut:

Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang dipotong dan/atau dipungut oleh pihak lain diatur sebagai berikut:

- a. atas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh bendahara pemerintah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan:
 - 1) dapat diajukan permohonan pemindahbukuan ke setoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pembayaran pajak melalui pemindahbukuan; atau
 - 2) dapat diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau
 - 3) dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.
- b. atas pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain dengan bukti pemotongan dan/atau pemungutan, termasuk pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas import

- 1) dapat diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau
- 2) dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai angsuran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Masa Pajak Juli 2013 sampai dengan Desember 2013 bagi Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu yang juga menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenai PPh berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat diajukan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai perhitungan besarnya angsuran pajak dalam Tahun berjalan.

Berdasarkan huruf F butir 10 dan butir 11 mengatur tentang ketentuan pelaporan penghasilan dari usaha yang dikenakan PPh bersifat final sesuai dengan ketentuan PP 46 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Atas penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan/atau bersifat final pada:
 - a. lampiran III bagian A butir 14 (Penghasilan Lain yang Dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final, Formulir 1770-III) bagi Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. lampiran IV bagian A butir 16 dengan mengisi "Penghasilan Usaha WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu" (Formulir 1771-IV) bagi Wajib Pajak badan.
2. Penghitungan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013:
 - a. peredaran usaha dihitung berdasarkan seluruh peredaran usaha selama Tahun Pajak 2013, tidak termasuk peredaran usaha pada Masa Pajak Juli 2013 sampai dengan Desember 2013 yang dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);
 - b. bagi Wajib Pajak orang pribadi, untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun;

- c. angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan Masa Pajak Januari 2013 sampai dengan Juni 2013 dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebagai mana dimaksud, maka Direktorat Jenderal Pajak memandang perlu memberikan keringanan atas sanksi yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atas pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut. Sehingga Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak akan menghapuskan sanksi administrasi Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang KUP dalam Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan untuk Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2013.

11. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-32/ PJ/ 2014

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2014 Tanggal 17 September 2014 Tentang Penegasan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan acuan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan agar pelaksanaan ketentuan PPh bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dapat berjalan baik dan terdapat keseragaman dalam pelaksanaannya.

Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan PP 46 Tahun 2013 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha, Wajib Pajak badan yang baru beroperasi secara komersial ditentukan sesuai dengan huruf E angka 2 huruf a yaitu sebagai berikut:

- a. Penentuan saat beroperasi secara komersial sebagaimana dimaksud dalam PP 46 Tahun 2013 bagi Wajib Pajak badan adalah saat Wajib Pajak melakukan kegiatan operasi secara komersial untuk pertama kali bagi Wajib Pajak yang bergerak di sektor:
 - 1) jasa, adalah saat pertama kali dilakukannya penjualan jasa dan/atau saat diterima atau diperolehnya pendapatan/ penghasilan; dan/atau
 - 2) dagang dan industri, adalah saat pertama kali dilakukannya penjualan barang dan/atau saat diterima atau diperolehnya pendapatan/penghasilan.

Penentuan peredaran bruto yang dikenakan PP Nomor 46 Tahun 2013 bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) Tahun Pajak setelah Tahun Pajak beroperasi secara komersial. Wajib Pajak badan yang baru beroperasi secara komersial dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam hal jangka waktu 1 (satu) Tahun sejak beroperasi secara komersial sebagaimana dimaksud, ketentuan pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak berikutnya setelah Tahun Pajak saat beroperasi secara komersial. Pengenaan Pajak Penghasilan yang dikenakan secara final sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 bagi Wajib Pajak badan untuk Tahun Pajak berikutnya didasarkan peredaran bruto Tahun Pajak sebelumnya.

Dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2014 Tanggal 17 September 2014 Tentang Penegasan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, mengatur tentang perlakuan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan.

Dalam hal terdapat sisa lebih yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) Tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut bukan termasuk objek pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf m Undang-Undang Pajak Penghasilan. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka atas sisa lebih sebagaimana dimaksud dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Pajak Penghasilan.

- b. Wajib Pajak reksa dana

Reksa dana adalah suatu bentuk kegiatan usaha yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat pemodal, untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang dapat berbentuk perseroan atau kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Aliran penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak reksa dana termasuk kategori penghasilan dari usaha sesuai dengan penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan memenuhi kriteria yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sesuai dengan PP 46 Tahun 2013 beserta ketentuan pelaksanaannya.

- c. Wajib Pajak bank/ bank perkreditan rakyat/ koperasi simpan pinjam/ lembaga pemberi dana pinjaman

Wajib Pajak bank bank perkreditan rakyat/ koperasi simpan pinjam/ lembaga pemberi dana pinjaman dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 dari jumlah peredaran bruto setiap bulan. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 38 /PJ/2014 tanggal 22 Oktober 2014 tentang Ralat Surat Edaran Nomor SE-32/PJ/2014 tentang Penegasan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, peredaran bruto sebagaimana dimaksud dihitung dari seluruh penghasilan usaha jasa perbankan/peminjaman, antara lain;

1. pendapatan bunga, fee, komisi, dan seluruh penghasilan yang terkait dengan pemberian kredit/pinjaman, tidak termasuk pembayaran pokok kredit/pinjaman;
2. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan atas simpanan di bank lain, serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, kecuali bagi Wajib Pajak selain bank/bank perkreditan rakyat.

- d. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WPOPT)

Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang memenuhi kriteria Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2013, maka atas

penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang bersangkutan dikenai PPh final dengan tarif 1 % dari peredaran bruto.

Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud peredaran brutonya telah melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan memiliki kriteria sebagai WPOPT maka pengenaan Pajak Penghasilannya megacu pada ketentuan Pasal 25 ayat (7) Undang-Undang Pajak Penghasilan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat kegiatan usaha.

e. Wajib Pajak Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Wajib Pajak Pembuat Akta Tanah merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki wewenang sesuai dengan Huruf E angka 7 huruf a adalah sebagai berikut:

1. mempunyai persamaan kewenangan dengan Notaris, yaitu merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan membuat akta otentik tertentu yakni akta yang berkaitan dengan dengan pertanahan; dan
2. dapat dipersamakan dengan notaris sebagai Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak PPAT dikenakan Pajak Penghaslan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan

Wajib Pajak yang menyetor Pajak Penghasilan terutang kas negara melalui kantor pos atau bank presepsi menggunakan SSP ataupun melalui ATM Wajib Pajak yang menerima BPN dengan teraan NTPN dalam bentuk struk yang dipersamakan dengan SSP paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud wajib menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

Ketentuan mengenai keterlambatan pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang diberlakukan mulai Masa Pajak Januari 2014. Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan dan telah mendapatkan validasi NTPN dianggap telah menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan sesuai dengan tanggal NTPN yang tercantum di SSP dan cetakan struk ATM. Wajib Pajak yang jumlah Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) nihil tidak wajib melaporkan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).

12. Peredaran Bruto Tertentu

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peredaran adalah gerakan (perjalanan dan sebagainya) berkeliling (berputar); keadaan beredar; peralihan (pergantian) dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain yang berulang-ulang seakan-akan merupakan suatu lingkaran; perputaran (uang) dalam masyarakat. Sedangkan definisi bruto menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kotor (tentang berat, gaji, hasil, keuntungan, pendapatan). Sehingga definisi peredaran bruto adalah perputaran uang atau penghasilan baik dari usaha maupun dari luar usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi maupun badan yang merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh). Peredaran bruto merupakan dasar pengenaan Pajak Penghasilan yang diatur sesuai PP 46 Tahun 2013. Peredaran bruto sebagaimana dimaksud dihitung dari peredaran bruto usaha seluruhnya termasuk usaha cabang. Tidak termasuk pengertian peredaran bruto adalah sebagai berikut.

- a. Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) PMK Nomor 107/PMK.011/2013;
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri
- c. Usaha yang atas penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
- d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

13. Pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2)

a. Definisi Pajak Penghasilan

Menurut Suandy (2014: 43), Pajak Penghasilan (PPh) termasuk dalam kategori sebagai pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya yakni telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas diterima atau diperolehnya Penghasilan. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008,

“Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.”

b. Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)

Merupakan pemajakan atas penghasilan tertentu dihitung atas dasar tarif yang ditetapkan dikalikan dengan penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dan merupakan pajak yang bersifat final. Dalam

pembayaran pajaknya dapat dilakukan dengan menyetor pajak yang terutang sendiri atau dilakukan pemotongan oleh pihak lain. Penghasilan tertentu yang merupakan objek PPh Final sesuai dengan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut:

1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Merupakan pajak yang dikenakan atas bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, atau cabang bank Luar Negeri yang berada di Indonesia. Tarif Pajak yang dikenakan atas bunga yang dimaksud adalah 20% dari jumlah bruto. Apabila yang menerima penghasilan atas bunga tersebut adalah Wajib Pajak Luar Negeri maka Pajak Penghasilan yang terutang adalah 20% atau sesuai dengan tarif P3B yang berlaku (Wiawan dan Wahyu: 2011, Rahayu dan Suhayati: 2010, Resmi: 2012).

2) Penghasilan berupa bunga obligasi dan surat utang negara

Merupakan pajak yang dikenakan atas bunga yang diterima atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga dan/ atau diskonto. Obligasi adalah surat utang dan surat utang negara yang memiliki jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. PPh Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan Bunga Obligasi dikenakan tarif sebagai berikut:

Tabel 2.3 Tarif atas Bunga Obligasi

Tarif	Subjek	Objek
15%	Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT	Atas bunga obligasi dengan kupon dikenakan dari jumlah bruto bunga obligasi
20% atau sesuai dengan tarif P3B	Bagi Wajib Pajak Luar Negeri selain BUT	
15%	Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT	Atas diskonto obligasi dengan kupon dari selisih lebih harga jual pada saat transaksi atau nilai nominal pada saat jatuh tempo obligasi diatas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan.
20% atau sesuai dengan tarif P3B	Bagi Wajib Pajak Luar Negeri selain BUT	
15%	Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT	Atas Diskonto Obligasi Tanpa Bunga Dari Selisih Lebih Hrg Jual Pada Saat Transaksi Atau Nilai Nominal Pada Saat Jatuh Tempo Obligasi Di Atas Harga Perolehan Obligasi;
20% atau sesuai dengan tarif P3B	Bagi Wajib Pajak Luar Negeri selain BUT	

Sumber: *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009*

- 3) Penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi

Merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi. Tarif pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan atas bunga simpanan koperasi adalah sebagai berikut:

- a. 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp 240.000.00,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) perbulan.
- b. 10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa simpanan lebih dari Rp 240.000.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per

bulan.(Wiawan dan Wahyu: 2011, Rahayu: 2010, Resmi: 2012, Mardiasmo: 2011, Suandy: 2014)

4) Penghasilan berupa hadiah undian

Merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan melalui undian. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari hadiah undian dikenakan tarif 25% dari penghasilan bruto (Wiawan dan Wahyu: 2011, Rahayu: 2010, Rahayu dan Suhayati: 2010, Resmi: 2012, Mardiasmo: 2011, Suandy: 2014).

5) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;

Merupakan pajak yang terutang atas penghasilan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modalnya pada perusahaan pasangan usahannya. Besar Pajak Penghasilan yang terutang dikenakan tarif sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal. Pajak Penghasilan tersebut ditambah tarif 0,5% dari nilai saham apabila saham yang dijual merupakan saham pendiri pada saat penawaran umum perdana. Apabila transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal tersebut dilakukan melalui bursa efek, maka pengenaan pajak penghasilannya sesuai peraturan tentang pajak penghasilan atas transaksi penjualan saham di bursa efek. (Wiawan dan Wahyu: 2011,

Rahayu: 2010, Rahayu dan Suhayati: 2010, Resmi: 2012, Mardiasmo: 2011, Suandy: 2014)

6) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan

Merupakan pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh atas kegiatan:

- a. penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah;
- b. penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus;
- c. penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.

Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan akan dikenakan tarif 5 % (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan, kecuali atas pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan dikenakan Pajak Penghasilan 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan. Nilai pengalihan hak adalah nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan dan Nilai

Jual Objek Pajak Tanah dan/ atau bangunan. (Wiawan dan Wahyu: 2011, Rahayu: 2010, Rahayu dan Suhayati: 2010, Resmi: 2012, Mardiasmo: 2011, Suandy: 2014)

7) Penghasilan berupa usaha jasa konstruksi

Merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan perencanaan dan/ atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Tarif pajak penghasilan untuk usaha jasa konstruksi adalah sebagai berikut:

- a. 2% untuk pelaksanaan konstruksi oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi kecil.
- b. 3% untuk pelaksanaan konstruksi oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi menengah dan besar.
- c. 4% untuk pelaksanaan konstruksi oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi.
- d. 4% untuk perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi.
- e. 6% untuk pelaksanaan konstruksi oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi.

Besar pajak yang terutang dari usaha jasa konstruksi dikenakan dari jumlah pembayaran Nilai Jasa Konstruksi. (Wiawan dan Wahyu: 2011, Rahayu: 2010, Rahayu dan Suhayati: 2010, Resmi: 2012, Suandy: 2014)

8) Penghasilan berupa persewaan tanah dan/atau bangunan;

Merupakan pajak yang dikenakan dari penghasilan atas persewaan tanah dan/ atau bangunan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi maupun badan. Pajak atas persewaan tanah dan/ atau bangunan dikenai tarif 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/ atau bangunan. (Wiawan dan Wahyu: 2011, Rahayu: 2010, Rahayu dan Suhayati: 2010, Resmi: 2012, Mardiasmo: 2011, Suandy: 2014)

9) Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

a. Penghasilan atas Dividen yang diterima Orang Pribadi Dalam Negeri

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri merupakan Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Dividen adalah pembagian laba yang dilakukan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.

b. Penghasilan atas Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013)

Merupakan pajak yang dikenakan atas Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu Tahun pajak dengan tarif 1% dan bersifat final.

Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.

14. Pertumbuhan Ekonomi

a. Definisi pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dalam Sukirno (2012: 9) “Didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah”. Dalam satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara dalam masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak seiring diikuti dengan pertambahan produksi barang dan jasa. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah; tanah dan kekayaan alam, jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja, barang modal dan tingkat teknologi dan sistem sosial dan masyarakat. Instrument yang biasa digunakan dalam menghitung prestasi kegiatan ekonomi dapat menggunakan seperti (Sukirno, 2012: 17):

- a) Pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita.
- b) Penggunaan tenaga kerja dan pengangguran.
- c) Tingkat perubahan harga-harga atau inflasi.
- d) Kedudukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran.
- e) Kestabilan nilai mata uang domestik.

Salah satu indeks prestasi yang digunakan dalam kegiatan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Formula yang digunakan dalam menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi disuatu negara adalah sebagai berikut:

$$\text{Growth} = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Sumber: *Halim, 2004: 163.*

b. Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam pelaksanaannya pajak selalu mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Karena pajak merupakan instrument pembiayaan yang berpengaruh dalam pembangunan nasional. Pengaruh pajak dan pertumbuhan ekonomi dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia (2006, 187) yang menyatakan bahwa:

“Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak meningkat, walaupun tarif pajak mungkin tidak berubah akan memberikan dampak pada meningkatnya penerimaan pajak sehingga menyebabkan pengeluaran pemerintah akan meningkat pula. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP/ GDP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah yang menjadi lebih besar pula.”

C. Kerangka Pemikiran

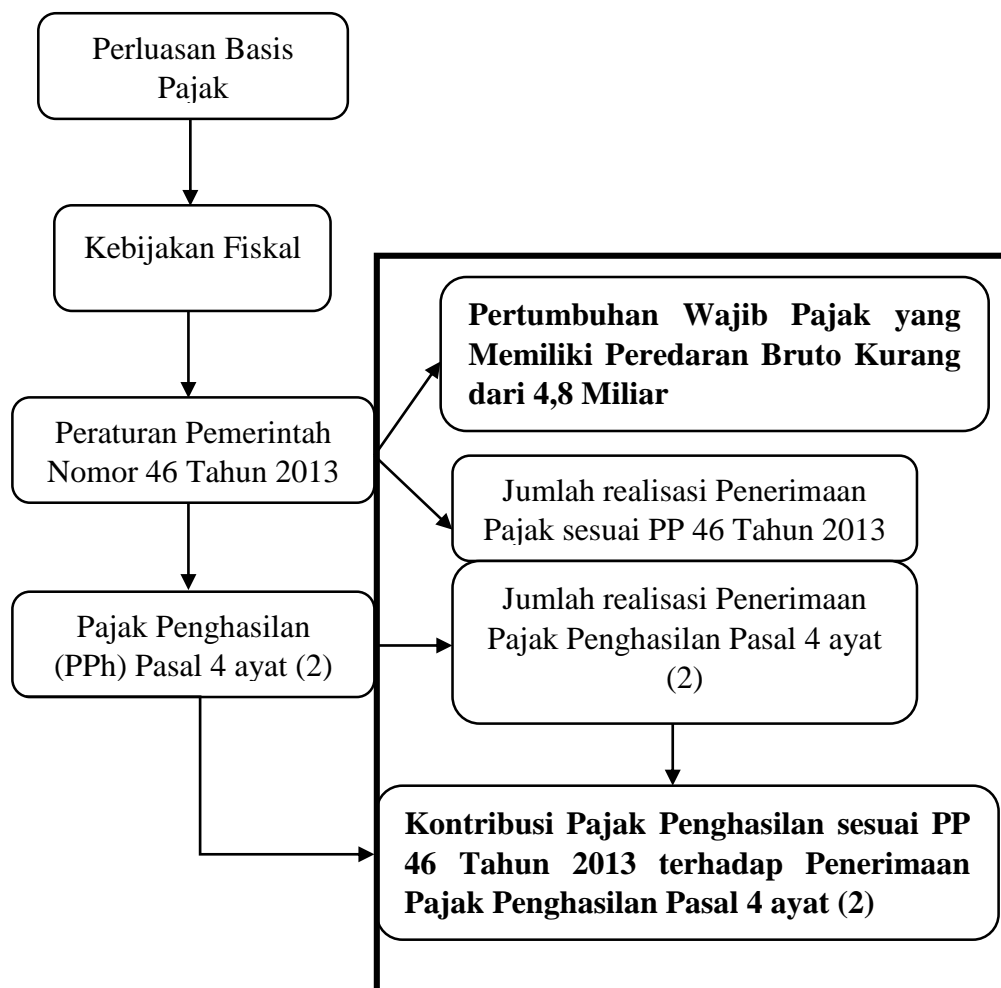
Kerangka pemikiran merupakan suatu diagram yang menjelaskan garis besar mengenai alur logika berjalannya suatu penelitian. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP 46 Tahun 2013) tanggal 12 Juni 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperluas basis pajak di

Indonesia. Kebijakan Pajak tersebut diluncurkan berdasarkan pertimbangan DJP mengenai potensi UMKM terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) yang cukup tinggi yang tidak seimbang dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan Pajak.

Dengan diterbitkannya kebijakan pajak berupa PP 46 Tahun 2013 diharapkan akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Karena PP 46 Tahun 2013 terutang atas peredaran bruto yang dimiliki Wajib Pajak khususnya UMKM, bukan dari laba bersih yang didapatkan. Dengan diterbitkannya PP 46 Tahun 2013 diharapkan Wajib Pajak tidak akan kesulitan dalam menghitung dan menyetorkan pajak yang terutang. Berdasarkan PP 46 Tahun 2013 pula, Wajib Pajak yang menyetorkan pajak penghasilan yang terutang dengan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah mendapatkan validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dianggap telah melaporkan SPT Masa Pajak Penghasilan sesuai dengan tanggal penyetoran. Sehingga Wajib Pajak sebagaimana dimaksud tidak diwajibkan melaporkan SPT Masa Pajak Penghasilannya. Dengan berbagai kemudahan dan kesederhanaan yang diberikan pemerintah melalui PP 46 Tahun 2013 diharapkan akan memicu kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya khususnya penyetoran pajak PP 46 Tahun 2013.

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mana objek PPh yang terutang secara final dapat diatur kembali melalui Peraturan Pemerintah. Berdasarkan sifatnya pula PP 46 Tahun 2013 juga terutang secara final. Sehingga Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan PP 46 Tahun 2013

ini digolongkan dalam Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 dan pada pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 akan selalu mempengaruhi tingkat penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2). Dalam penelitian ini penulis berusaha menganalisis mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, kontribusi/sumbangannya, serta pertumbuhan Wajib Pajaknya terhadap tingkat penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2). Kerangka pemikiran disajikan dalam bentuk bagan Gambar 2.1 agar memudahkan pembaca dalam memahami alur penelitian:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Data diolah Peneliti (2015)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan instrument penting dalam suatu penelitian, dengan menentukan jenis penelitian maka dapat diketahui arah penelitian dalam mencapai tujuan penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif.

Definisi penelitian deskriptif menurut Zuhriah (2005: 47), adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat populasi atau daerah tertentu. Metode penelitian deskriptif adalah metode yang bersifat paparan. Dimana deskriptif adalah untuk menghasilkan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan tepat mengenai fakta, sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2005:54). Penelitian kualitatif menurut Filrk (2002) dalam Gunawan (2013: 83) adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan. Metode kualitatif berusaha untuk memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut prespektif peneliti sendiri. (Usman dan Akbar, 2008:78)

Sehingga berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, serta kontribusinya terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4

ayat (2) secara sistematis dan mendalam dalam lingkungan wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Penetapan fokus penelitian dalam suatu permasalahan sangat penting karena dapat bermanfaat membatasi studi dan menentukan kriteria yang dapat dimasukkan atau yang seharusnya dikeluarkan dari informasi yang didapatkan dari lapangan (Moleong, 2011). Berdasarkan uraian tersebut, maka fokus penelitian dalam penelitian ini ditentukan sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
 - a. Mekanisme perhitungan pajak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
 - b. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
 - c. Dasar Pertimbangan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
2. Kontribusi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

- a. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
- b. Kontribusi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2)
- 3. Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak yang terutang Pajak Penghasilan atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
 - a. Wajib Pajak yang terutang Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Utara
 - b. Implikasi pertumbuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Utara

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Nasution (2003: 43) mengemukakan, lokasi penelitian merupakan tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu: pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat diobservasi. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Malang Utara yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto 29-31 Kotak pos 38, Malang, 65122. Alasan yang mendasari pemilihan lokasi penelitian ini, dikarenakan wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara yang meliputi 2 (dua) kecamatan besar di Kota Malang yang meliputi: Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Blimbing. Wilayah kerja tersebut terletak di pusat Kota Malang dan memiliki mayoritas Wajib Pajak yang terutang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Jumlah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria PP 46 Tahun 2013 pada Tahun 2015 mendominasi sebesar 37% dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar.

Dengan jumlah Wajib Pajak yang cukup besar maka penerimaan PP 46 Tahun 2013 diharapkan juga tinggi.

D. Sumber Data

Dalam melaksanakan penelitian, diperlukan data-data yang relevan untuk menunjang penelitian yang akan dilakukan. Menurut Azwar (2001: 91), sumber data diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukur dan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.

2. Data Sekunder

Sedangkan yang dimaksud data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang didapatkan langsung dari pihak KPP Pratama Malang Utara, yaitu dengan wawancara kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, *Account Representatif*, Kepala Ekstensifikasi dan Penyuluhan dan Pelaksana Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Wawancara ini merupakan data penunjang dalam memperoleh informasi terkait dengan penerapan PP 46 Tahun 2013 dan pertumbuhan Wajib Pajak yang terutang PP 46 Tahun 2013. Data sekunder merupakan data penting dalam penelitian ini yang didapatkan dari data Jumlah Penerimaan Pajak sektor Pajak Penghasilan PP 46 Tahun 2013, Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), pertumbuhan Wajib Pajak yang terutang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penggunaan teknik dan alat pengumpul data yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang objektif (Zuhriah, 2006: 171). Teknik pengumpulan data yang dimaksud untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan dan kenyataan dan informasi yang relevan dan objektif dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Zuhriah (2006: 179) mengemukakan bahwa wawancara ialah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Menurut Usman dan Akbar (2008: 55) Wawancara berguna untuk mendapatkan data dari tangan pertama (*primer*); pelengkap teknik pengumpulan lainnya; menguji pengumpulan data lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak pewawancara yang mengajukan pertanyaan (*interviewer*) dan pihak terwawancarai yang memberikan jawaban atau informasi yang diminta (*interviewee*).

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi dan *Account Representatif* terkait dengan penerapan PP 46 Tahun 2013, hambatan yang terdapat dalam pelaksanaannya, serta upaya KPP Pratama Malang Utara untuk meningkatkan penerimaan Pajak PP 46 Tahun 2013. Selain itu peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Ekstensifikasi dan Penyuluhan dan staff Pelaksana Ekstensifikasi dan Penyuluhan terkait dengan

upaya fiskus dalam mencari Wajib Pajak yang terutang PP 46 Tahun 2013, serta upaya fiskus dalam melakukan sosialisasi serta penyuluhan terkait dengan penerapan PP 46 Tahun 2013

2. Dokumenter

Cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian (Zuhriah, 2006: 191). Teknik dokumenter dapat dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap catatan dan dokumen tentang rekapitulasi penerimaan Pajak atas PP 46 Tahun 2013 dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), dan Pertumbuhan Wajib Pajak yang terutang PPh sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut Zuhriah (2006: 168) adalah alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Berdasarkan teknik pengumpulan data yang telah dipaparkan, maka instrumen penelitian yang digunakan ialah:

1. Pedoman Wawancara

Berisikan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak-pihak yang berwenang dan berkaitan dengan berlangsungnya penelitian. Tujuan dari pedoman wawancara adalah agar pembicaraan yang dilakukan tidak menyimpang dari topik permasalahan dan lebih terfokus ke tujuan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur agar dalam pelaksanaannya lebih fleksibel namun tetap terstruktur.

2. Dokumentasi

Merupakan catatan-catatan, atau dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, adalah rekapitulasi penerimaan pajak khususnya pajak atas PP 46 Tahun 2013 dari 1 Juli 2013 sampai dengan Tahun 2015, serta rekapitulasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015, serta Pertumbuhan Wajib Pajak yang terutang Pajak sesuai PP 46 Tahun 2013.

G. Analisis Data

Menurut Patton dalam Basrowi dan Suwandi (2008: 194), analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola kategori dan satuan dasar. Zuhriah (2006: 198), analisis data dalam penelitian merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian serta kekritisan dari peneliti. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan usaha mendeskripsikan fakta-fakta yang tampak pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki, agar jelas keadaan atau kondisinya (Nawawi, 2012:67). Analisis Data yang akan dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Mekanisme perhitungan Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Mengitung dan menjelaskan secara deskriptif Pajak Penghasilan yang terutang dari Wajib Pajak baik orang pribadi sesuai dengan aturan PP 46

Tahun 2013. Mekanisme perhitungan tersebut didasarkan dari peredaran bruto setiap bulan untuk setiap cabang. Perhitungan Pajak Penghasilan ini menggambarkan perhitungan pajak dengan peredaran bruto yang sama namun dengan margin laba berbeda untuk mengetahui dampak penerbitan PP 46 Tahun 2013 terhadap jumlah pajak yang terutang sebelum dan sesudah diterbitkannya peraturan tersebut. Mekanisme perhitungan pajaknya sesuai dengan PP 46 Tahun 2013 sebagai berikut:

$$\text{PPh Terutang} = 1\% \times \text{Peredaran Bruto}$$

Sumber: *Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*

2. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Menjelaskan dan menggambarkan secara deskriptif penerapan PP 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Utara yang meliputi: upaya yang telah dilakukan berkaitan dengan penerbitan PP 46 Tahun 2013, dampak PP 46 Tahun 2013 bagi fiskus dan Wajib Pajak sesuai dengan tujuan penerbitannya, serta kendala yang dihadapi KPP Pratama Malang Utara dalam penerapan PP 46 Tahun 2013.

3. Dasar pertimbangan Peraturan Pemerinah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Menjelaskan dan menggambarkan secara deskriptif mengenai dasar pertimbangan yang dipilih Direktorat Jenderal Pajak dalam menerbitkan PP 46 Tahun 2013 sesuai dengan Bagian I Umum penjelasan atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yaitu : perlu kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.
4. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
Menghitung, menjelaskan dan menggambarkan secara deskriptif laju pertumbuhan penerimaan PP 46 Tahun 2013 pada Tahun 2013, 2014, dan 2015 pada KPP Pratama Malang Utara serta dampaknya terhadap objek Pajak Penghasilan lain dengan menggunakan formula laju pertumbuhan.
5. Kontribusi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2)
Menghitung, menjelaskan dan menggambarkan secara deskriptif tingkat kontribusi PP 46 Tahun 2013 berdasarkan realisasi pajaknya dan realisasi Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) pada Tahun 2013, 2014, dan

2015 pada KPP Pratama Malang Utara dan melakukan klasifikasi berdasarkan tabel klasifikasi kontribusi. Rumus kontribusi pajak sebagaimana dimaksud menggunakan rumus (Halim, 2004,163):

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan PP 46 Tahun 2013}}{\text{Penerimaan PPh Pasal 4 ayat 2}} \times 100\%$$

Dari formula tersebut kemudian dapat disimpulkan kriteria kontribusi realisasi penerimaan pajak sesuai dengan Tabel 2.2.

6. Wajib Pajak yang terutang Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Utara.
Menghitung, menjelaskan dan menggambarkan secara deskriptif laju pertumbuhan Wajib Pajak yang terutang PP 46 Tahun 2013 pada Tahun 2013, 2014, dan 2015 pada KPP Pratama Malang Utara. Pertumbuhan Wajib Pajak tersebut disajikan berdasarkan kategori usaha Wajib Pajak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-321/PJ/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2012 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha .
7. Implikasi pertumbuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Utara
Menjelaskan dan menggambarkan secara deskriptif laju pertumbuhan Wajib Pajak yang terutang PP 46 Tahun 2013 pada Tahun 2013, 2014, dan 2015 pada KPP Pratama Malang Utara serta implikasi Wajib Pajak terhadap pembayaran PP 46 Tahun 2013. Pertumbuhan Wajib Pajak tersebut disajikan berdasarkan kategori usaha Wajib Pajak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-321/PJ/2012 tentang

Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2012 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha .

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek dan Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Malang

Kota Malang merupakan salah satu daerah otonom dan merupakan kota kedua terbesar urutan kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya (Ditjen Cipta Karya, 2003). Kota Malang memiliki luas 110.06 Km dengan jumlah penduduk sampai Tahun 2010 sebesar 820.243 jiwa yang terdiri dari 404.553 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 415.690 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih 7.453 jiwa per kilometer persegi (<http://malangkota.go.id/>). Kota Malang terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu; Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Lowokwaru, dan Kecamatan Sukun.

2. Gambaran Umum KPP Pratama Malang Utara

a. Sejarah KPP Pratama Malang Utara

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara merupakan Kantor Pelayanan Pajak yang termasuk dalam lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kantor Pelayanan Pajak Malang Utara yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 29-31 Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang ini dulu merupakan Kantor Pelayanan Bumi dan Bangunan sedangkan Kantor Pelayanan Pajak Malang dengan wilayah kerja Kota Malang dulu terletak di Jalan Medan Merdeka. Namun setelah modernisasi perpajakan Kantor

Pelayanan, Kantor Pemeriksaan dan Kantor Pengawasan dileburkan menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Kemudian Kantor Pelayanan Pajak di Malang dibagi berdasarkan Wilayah Kerjanya, yaitu terdiri dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara secara resmi didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 138/KMK.01/2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan No. 61/KMK.01/2007 tentang Kode Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak dan mulai beroperasi tanggal 4 Desember 2007.

b. Visi, Misi, dan Nilai-nilai Kementerian Keuangan di KPP Pratama Malang Utara

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPP Pratama Malang Utara berpegang teguh dengan visi, misi dan nilai-nilai Kementerian Keuangan, adalah sebagai berikut:

a) Visi

Menjadi kantor yang dapat memberikan layanan yang optimal di bidang perpajakan, yang menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.

b) Misi

Membantu Wajib Pajak dalam memahami hak dan kewajibannya, dan menuntunnya dalam pelaksanaannya.

c) Nilai-Nilai Kementrian Keuangan

1) Integritas

Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

2) Profesionalisme

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

3) Sinergi

Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

4) Pelayanan

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.

5) Kesempurnaan

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. (<http://www.kemenkeu.go.id/>)

c. Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Malang Utara

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan tertib

administrasi, efektivitas, dan kinerja organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, KPP Pratama Malang Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya
- d. Penyuluhan perpajakan
- e. Pelayanan perpajakan
- f. Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak
- g. Pelaksanaan ekstensifikasi
- h. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak
- i. Pelaksanaan pemeriksaan pajak
- j. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
- k. Pelaksanaan konsultasi perpajakan

- l. Pembetulan ketetapan pajak
- m. Pelaksanaan administrasi kantor.

d. Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Utara

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya KPP Pratama Malang Utara dipimpin oleh Kepala KPP Pratama. Unit organisasi selanjutnya dikelompokkan menjadi kelompok struktural yang dikepalai oleh Kepala Seksi atau Kepala Subbagian, dan kelompok fungsional yang dipimpin oleh seorang *supervisor*. Semua elemen tersebut bertanggungjawab kepada kepala kantor, penjelasan mengenai tugas dan fungsi unit organisasi di KPP Pratama Malang Utara adalah sebagai berikut:

- a) Sub.bagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
- b) Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan

dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta pengelolaan kinerja organisasi.

- c) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.
- d) Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
- e) Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.
- f) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.
- g) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak.

h) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

Struktur organisasi KPP Pratama Malang Utara dapat dilihat dalam bentuk bagan di Gambar 4.1 sebagai berikut:



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Utara

Sumber: *Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian dan Aktiva (SIKKA) KPP Pratama Malang Utara, 2015*

e. Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Utara

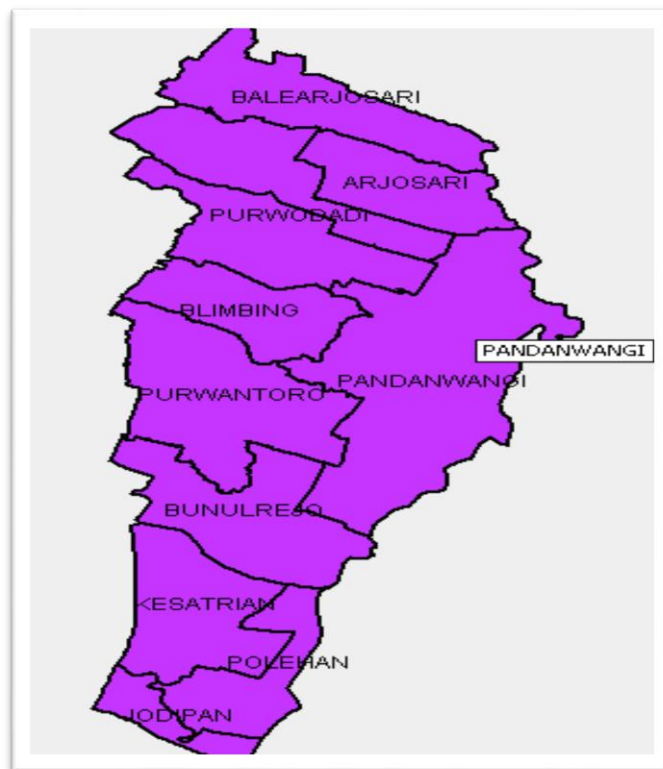
Kantor Pelayanan Pajak Malang Utara memiliki wilayah kerja yang meliputi 2 (dua) Kecamatan yakni:

- 1) Kecamatan Blimbing

Tabel 4.1 Data Kecamatan Blimbing

No	Uraian	Keterangan
1.	Luas Wilayah	17,76 km
2.	Jumlah Penduduk	185.187
3.	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	12.114

Sumber: *Sub.Bag Umum dan Kepatuhan Internal*



Gambar 4. 2 Peta Kecamatan Blimbing

Sumber: *Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal*

Kecamatan Blimbing meliputi 11 kelurahan, yaitu :

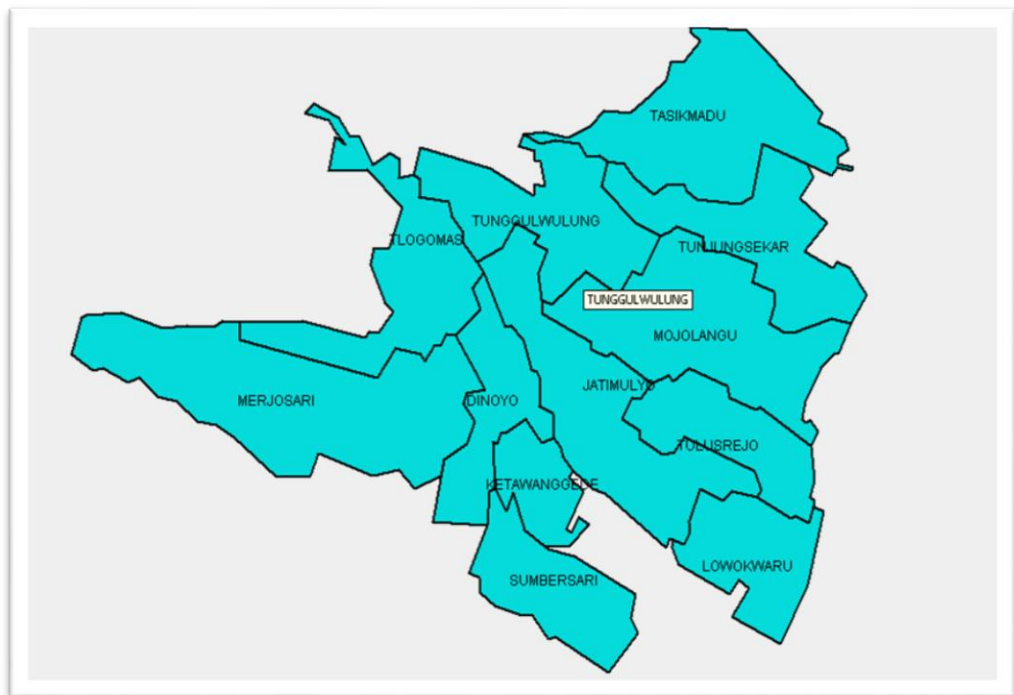
- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Kelurahan Kesatrian | 7. Kelurahan Purwodadi |
| 2. Kelurahan Polehan | 8. Kelurahan Arjosari |

3. Kelurahan Purwantoro
 4. Kelurahan Bunulrejo
 5. Kelurahan Pandanwangi
 6. Kelurahan Blimbing
 9. Kelurahan Balearjosari
 10. Kelurahan Polowijen
 11. Kelurahan Jodipan
- 2) Kecamatan Lowokwaru

Tabel 4. 2 Data Kecamatan Lowokwaru

No	Uraian	Keterangan
1.	Luas Wilayah	2,089,513 Ha
2.	Jumlah Penduduk	160.894
3.	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	1.066

Sumber: *Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal*



Gambar 4. 3 Peta Kecamatan Lowokwaru

Sumber: *Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal*

Kecamatan lowokwaru terdiri dari 12 (dua belas) kelurahan, yaitu:

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1. Jatimulyo | 7. Merjosari |
| 2. Lowokwaru | 8. Tlogomas |
| 3. Tulusrejo | 9. Sumbersari |
| 4. Mojolangu | 10. Tunjungsekar |
| 5. Tasikmadu | 11. Ketawanggede |
| 6. Dinoyo | 12. Tunggulwulung |

Dimasing-masing kecamatan tersebut terdapat berbagai macam bidang usaha yang memiliki potensi untuk terutang Pajak Penghasilan sesuai dengan PP 46 Tahun 2013 yang perlu digali lebih dalam lagi agar dapat meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara.

B. Penyajian Data

1. Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2)

Pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2) adalah Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak yang dikenakan secara final. Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan Undang- Undang Pajak Penghasilan dikenakan atas:

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;

- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Penghasilan tertentu yang telah diatur melalui Peraturan Pemerintah yang dikenakan Pajak Penghasilan secara final sesuai dengan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) huruf (e) adalah Pajak Penghasilan atas Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 dan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 tanggal 12 Juni 2011 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa,

“Terhadap Pajak Penghasilan yang bersifat final atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa yang telah dipungut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa, di kembalikan dan pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.”

Penghasilan atas transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa tidak lagi dikenakan dan bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2). Atas Pajak Penghasilan yang terutang dan telah dibayarkan oleh Wajib Pajak maka akan dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya

terutang. Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dikenakan secara final adalah sebagai berikut:

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya,
- b. penghasilan berupa bunga obligasi dan surat utang negara, dan
- c. penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- d. penghasilan berupa hadiah undian;
- e. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- f. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan,
- g. penghasilan atas usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan
- h. penghasilan atas persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- i. penghasilan atas Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
- j. Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

KPP Pratama Malang Utara merupakan instansi dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak III yang memiliki wilayah kerja yaitu Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Lowokwaru. KPP Pratama Malang Utara bertugas untuk mengumpulkan penerimaan negara berupa pajak, salah satunya Pajak Penghasilan

Pasal 4 ayat 2. Dalam Tabel 4.3 menggambarkan rekapitulasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dari Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Utara:

Tabel 4. 3 Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Tahun 2013-2015

Tahun	Objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) (Kode Setoran)									
	Bunga Obligasi (401)	Pengalihan HATB (402)	Persewaaan TB (403)	Bunga Deposito dan Tabungan (404)	Hadiah Undian (405)	Transaksi Saham (406)	Usaha Jasa Konstruksi (409)	Bunga Koperasi (417)	Dividen OP (419)	PP 46 Tahun 2013 (420)
2013	23.365.180	53.389.720.573	1.344.918.026	3.150.430.445	3.004.033	-	8.676.528.756	46.805.749	332.736.302	1.300.520.633
2014	25.471.600	53.779.381.528	2.621.919.242	6.132.794.750	10.047.709	-	12.994.026.878	43.994.041	251.939.727	7.260.997.685
2015	38.530.000	50.194.810.922	3.429.300.817	7.991.157.048	209.233.000	1.389.296	9.370.405.694	22.861.299	97.678.862	9.785.493.767
Total	87.366.780	157.363.913.023	7.396.138.085	17.274.382.243	222.284.742	1.389.296	31.040.961.328	113.661.089	682.354.891	18.347.012.085

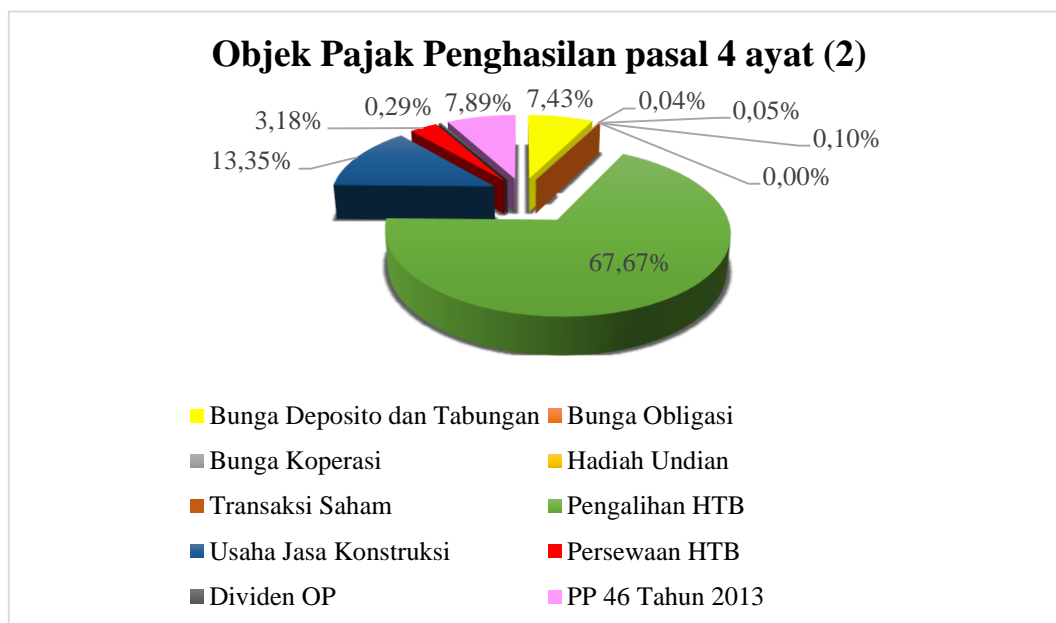
Sumber: *Seksi Pengolahan Data dan Informasi, (Data diolah Peneliti (2015))*

*Sampai dengan November 2015

Tabel 4.3 menggambarkan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dari Tahun 2013 sampai dengan November 2015. Pada pertengahan Tahun 2013, DJP menerbitkan peraturan pajak baru yaitu PP 46 Tahun 2013 yang dikelompokkan dalam Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2). PP 46 Tahun 2013 berlaku mulai 1 Juli 2013. Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dari tahun ke tahun selalu mengalami selalu fluktuatif. Objek Pajak yang mengalami penurunan adalah Penghalihan Hak atas Tanah dan /atau Bangunan, Usaha Jasa Konstruksi, Bunga Koperasi, Dividen Orang Pribadi Pada Tahun 2015, sedangkan Objek Pajak yang lainnya selalu mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) merupakan penerimaan yang bersifat insidentil yang mana transaksi atas objek pajak tersebut tidak selalu ada. Bapak Cornelius Djoko Purwanto Kepala Pengawasan dan Konsultasi menjelaskan bahwa,

“Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) itu bisa fluktuati mbak, kadang meningkat kadang juga bisa turun. Karena kan objek pajak atas transaksi tersebut juga nggak selalu ada tiap bulannya jadi PPh yang dikumpulkan juga tergantung berapa banyak transaksi yang terutang PPh Pasal 4 ayat (2). Beda sama penerimaan PPh dari usaha Wajib Pajak yang setiap bulannya pasti terutang dan kemungkinan besar pasti meningkat.” (Wawancara tanggal 18 Desember di Ruang Seksi Pengawasan dan Konsultasi)

Total Realisasi Penerimaan Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) selama Tahun 2013 sampai dengan November 2015 dan tingkat kontribusinya dalam penerimaan pajak dapat dilihat dalam Gambar 4.4:



Gambar 4.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Sumber: *Seksi Pengolahan Data dan Informasi, (Data diolah Peneliti, 2015)*

Gambar 4.4 menjelaskan presentase kontribusi masing-masing Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2). Berdasarkan Gambar 4.4 bisa ditarik kesimpulan bahwa Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak yang menyumbang paling besar dalam Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2). Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan menyumbang sebesar 67,67%, hal ini tidak lepas dari wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara yang juga didominasi oleh usaha properti. Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima Oleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 46 Tahun 2013) yang diterbitkan pemerintah pada 1 Juli 2013 mampu menempati urutan ketiga sebesar 7,89% setelah Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan menyumbang sebesar 67,67% dan Usaha Jasa Konstruksi sebesar 13,35%. Pajak Penghasilan atas Transaksi saham menyumbang Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) terendah yaitu sebesar 0,00% .

2. Realisasi Penerimaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP 46 Tahun 2013) merupakan kebijakan pajak yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak untuk memperluas basis pajak dari sektor usaha yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) selama satu Tahun pajak. PP 46 Tahun 2013 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan secara final dengan tarif 1% (satu persen). Realisasi penerimaan pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 selama Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 digambarkan dalam Tabel 4.4:

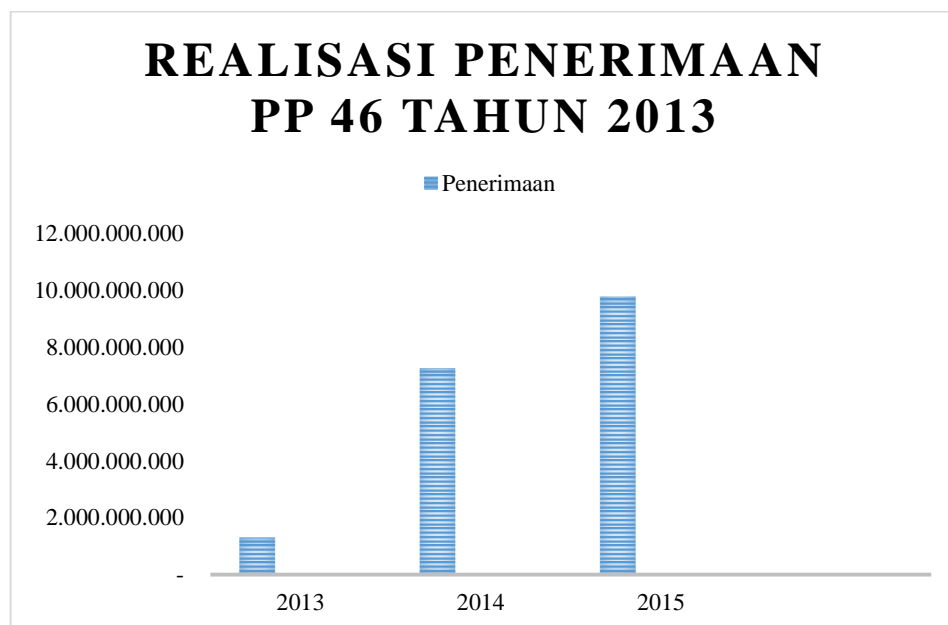
Tabel 4. 4 Realisasi Penerimaan Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Tahun 2013-Tahun 2015*)

No.	Tahun	Realisasi (Rp)
1.	2013	1.300.520.663
2.	2014	7.260.997.685
3.	2015	9.785.493.767
Jumlah		18.347.012.115

Sumber: *Seksi Pengolahan Data dan Informasi, (Data diolah Peneliti, 2015)*

*Mulai Agustus 2013 sampai dengan bulan November 2015

Tabel 4.4 menggambarkan realisasi PP 46 Tahun 2013 dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015. Berdasarkan Tabel 4.4, realisasi penerimaan PP 46 Tahun 2013 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun PP 46 Tahun 2013 diterbitkan pada pertengahan Tahun 2013, Pada Tahun 2013 penerimaannya dapat mencapai Rp 1.300.520.663. Selanjutnya penerimaannya selalu meningkat seperti pada Tahun 2014 sebesar Rp 7.260.997.685 dan pada Tahun 2015 sebesar Rp 9.785.493.767. Pertumbuhan penerimaan PP 46 Tahun 2013 digambarkan pada Gambar 4.5:



Gambar 4.5 Realisasi Penerimaan Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Sumber: *Seksi Pengolahan Data dan Informasi, (Data diolah Peneliti, 2015)*

Gambar 4.5 menggambarkan pertumbuhan penerimaan pajak sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015. Penerimaan PP 46 Tahun 2013 mengalami peningkatan mulai dari pertama kali efektif diberlakukan pada Tahun 2013 hingga pada Tahun 2015 di KPP Pratama Malang Utara. Dengan meningkatnya penerimaan pajak PP 46 Tahun 2013 tersebut menandakan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan salah satunya melalui penyetoran pajak semakin meningkat. Meningkatnya kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan penyetoran pajak tidak lepas dari upaya KPP Pratama Malang Utara dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai PP 46 Tahun 2013. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Cornelius Djoko selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi,

“Perkembangan penerimaan PPh PP 46 selama beberapa tahun terakhir cukup baik, ditunjukkan melalui pertumbuhan pajak yang positif.

Peningkatan penerimaan ini mencerminkan kesadaran Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakannya. Karena kalau self assessment kan meskipun fiskus melakukan upaya apapun, kesadaran Wajib Pajak itu tetap yang paling berpengaruh” (Wawancara tanggal 16 Desember 2015, di Ruang Seksi Pengawasan dan Konsultasi).

3. Jumlah Wajib Pajak yang Terutang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Dalam sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu *Self Assessment System*, Wajib Pajak memiliki peran penting dalam keberhasilan pemungutan pajak. Berhasil atau tidaknya target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sangat dipengaruhi oleh Wajib Pajak. PP 46 Tahun 2013 meupakan aspek Pajak Penghasilan baru yang diterbitkan oleh DJP untuk memperluas basis pajak. Sasaran PP 46 Tahun 2013 tersebut merupakan Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) selama satu Tahun pajak, yang mana Wajib Pajak tersebut sebelumnya belum berkontribusi banyak melalui pajak. sebagai salah satu jenis Pajak Penghasilan, keberhasilan pemungutan PP 46 Tahun 2013 sangat dipengaruhi oleh perilaku Wajib Pajak. Berikut merupakan jumlah Wajib Pajak yang terutang PP 46 Tahun 2013 yang disajikan pada Tabel 4.5:

Tabel 4.5 Jumlah Wajib Pajak yang terutang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

No.	Tahun	Jumlah WP terdaftar	Jumlah WP terutang PP 46
1.	2013	73.189	3.570
2.	2014	78.030	26.309
3.	2015	81.338	30.188

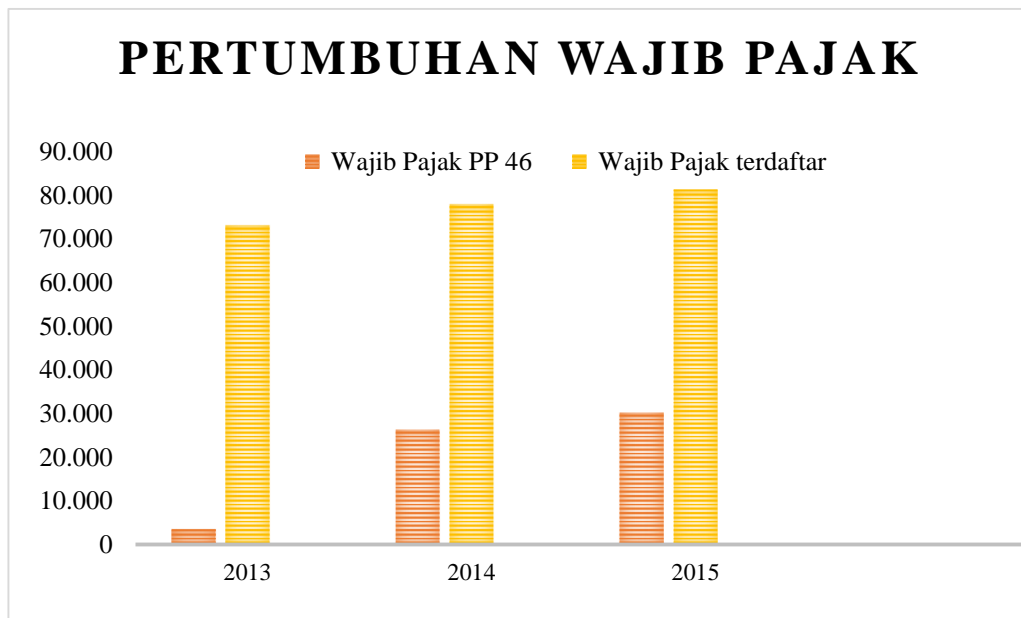
Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi, (Data diolah Peneliti, 2015)

*Mulai Agustus 2013 dengan bulan November 2015

Tabel 4.5 menggambarkan mengenai pertumbuhan Wajib Pajak yang terdaftar dan Wajib Pajak yang terutang PP 46 Tahun 2013. Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Utara selalu mengalami pertumbuhan yang positif. Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak yang terutang PP 46 Tahun 2013 sebesar 3.570 dari Wajib Pajak yang terdaftar sebesar 73.189 pada Tahun 2013, pada Tahun 2014 sebesar 26.309 dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar sebesar 78.030 dan pada Tahun 2015 sebesar 30.188 dari jumlah Wajib Pajak terdaftar sebesar 81.338. Peningkatan tersebut menjelaskan bahwa potensi Wajib Pajak yang memenuhi kriteria PP 46 Tahun 2013 yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara yang cukup banyak. Hal ini ditekankan Bapak Cornelius Djoko Purwanto Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi yaitu

“Jumlah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria PP 46 Tahun 2013 di wilayah kerja kami ini salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan positif Wajib Pajak. Wajib Pajak yang memenuhi kriteria PP 46 Tahun cukup banyak yaitu sekitar 37% Pada Tahun 2015 dari total jumlah Wajib Pajak yang terdaftar”. (Wawancara tanggal 18 Desember di Ruang Seksi Pengawasan dan Konsultasi)

Pertumbuhan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan terutang PP 46 Tahun 2013 di wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara disajikan dalam Gambar 4.6:



Gambar 4. 6 Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak yang Terutang PP 46 Tahun 2013

Sumber: *Seksi Pengolahan Data dan Informasi, (Data diolah Peneliti, 2015)*

Berdasarkan Gambar 4.6, jumlah Wajib Pajak yang terutang PP 46 Tahun 2013 selalu mengalami peningkatan yang beriringan dengan pertumbuhan positif dari Wajib Pajak yang terdaftar. Peningkatan Wajib Pajak yang terutang PP 46 Tahun 2013 tersebut menandakan bahwa upaya KPP Pratama Malang Utara dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak dapat dikatakan berhasil. Bapak Cornelius Djoko Purwanto Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menjelaskan,

“Peningkatan jumlah Wajib Pajak yang terutang PP 46 Tahun 2013 juga tidak lepas dari hasil kerja *account representative* kami yang selalu berupaya untuk memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak yang memenuhi kriteria PP 46 Tahun 2013. Sehingga dari tahun ke tahun Wajib Pajak yang terutang PP 46 Tahun 2013 bisa selalu meningkat”. (Wawancara tanggal 16 Desember 2015, di Ruang Seksi Pengawasan dan Konsultasi)

Wajib Pajak yang terutang PP 46 Tahun 2013 diklasifikasikan sesuai dengan kategori usaha yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan fiskus untuk mengawasi kepatuhan dan menganalisis potensi Wajib Pajak melalui kategori-kategori usaha tersebut. Jumlah Wajib Pajak yang terutang PP 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Utara berdasarkan kategori usaha yang dilakukannya sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-321/PJ/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2012 Tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang disajikan pada Tabel 4.6:

Tabel 4. 6 Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak yang Terutang PP 46 Tahun 2013

No.	Kategori	Kode	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	A	24	205	232
2.	Pertambangan dan Penggalian	B	0	14	11
3.	Industri Pengolahan	C	373	2.687	2.778
4.	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin.	E	4	33	55
5.	Konstruksi	F	52	344	433
6.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	G	1.570	11.961	12.727
7.	Transportasi dan Pergudangan	H	58	463	473
8.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	I	171	1.043	1.465
9.	Informasi dan Komunikasi	J	112	556	609
10.	Jasa Keuangan dan Asuransi	K	107	798	928
11.	Real Estate	L	0	27	55
12.	Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	M	66	392	524
13.	Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha lainnya	N	74	556	857
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	O	19	28	124

Lanjutan Tabel 4.6

No.	Kategori	Kode	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
15.	Jasa Pendidikan	P	37	323	482
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Q	10	199	229
17.	Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi	R	20	126	169
18.	Kegiatan Jasa Lainnya	S	648	5.604	6.633
19.	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan	T	4	46	55
21.	KLU Lainnya	-	221	1.444	1.349
Jumlah			3.570	26.309	30.188

Sumber: *Seksi Pengolahan Data dan Informasi, (Data diolah Peneliti, 2015)*

*Mulai Agustus 2013 dengan bulan November 2015

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak berdasarkan kategori usahanya masih fluktuatif. Meskipun terdapat beberapa kategori usaha yang mengalami penurunan, namun mayoritas Wajib Pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Wajib Pajak yang mengalami penurunannya adalah Wajib Pajak dengan Kategori Usaha Pertambangan dan Penggalian dan KLU Lainnya. Hal ini membuktikan bahwa penerapan PP 46 Tahun 2013 memberi dampak positif dalam peningkatan jumlah Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Tabel 4.6 Wajib Pajak yang memiliki potensi paling besar dalam penerimaan PP 46 Tahun 2013 di wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara adalah Wajib Pajak dengan kategori usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, yang mana jumlah Wajib Pajak tersebut mendominasi lebih dari 40%. Sedangkan

jumlah Wajib Pajak terendah yang membayar PP 46 Tahun 2013 adalah Wajib Pajak dengan kategori usaha Pertambangan dan Penggalan sebesar 0,04%.

C. Analisis dan Interpretasi Data

1. Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

a. Mekanisme Perhitungan Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

1) Wajib Pajak Orang Pribadi

Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebelum diterbitkannya PP 46 Tahun 2013 sangatlah bervariasi. Dalam menghitung pajak yang terutang, Wajib Pajak Orang Pribadi dilakukan melalui pembukuan atau pencatatan. Wajib Pajak yang diwajibkan melakukan pembukuan adalah Wajib Pajak yang memiliki kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sedangkan Wajib Pajak yang melakukan pencatatan dan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang memiliki peredaran bruto tertentu dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Norma Perhitungan Penghasilan Neto adalah presentase yang digunakan untuk menghitung penghasilan neto Wajib Pajak yang atas pencatatan transaksi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Perhitungan penghasilan netto menggunakan norma tersebut digunakan untuk Wajib Pajak yang melakukan pencatatan dalam kegiatan usahanya.

Setelah diterbitkannya PP 46 Tahun 2013, penghasilan dari kegiatan usaha yang peredaran brutonya tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu Tahun pajak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan yang terutang antara penggunaan Norma Penghasilan Neto, menggunakan pembukuan dengan perhitungan pajak PP 46 Tahun 2013 menimbulkan dampak terhadap kelangsungan usaha Wajib Pajak tersebut. Perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan tersebut diilustrasikan sebagai berikut:

Tn. Ali memiliki toko kelontong yang menjual barang serba ada. Toko Tn. Ali berlokasi di Kelurahan Mojolangu yang merupakan wilayah kerja dari KPP Pratama Malang Utara. Tn. Ali memiliki istri dan dua anak. Peredaran Bruto dari toko kelontong pada Tahun 2014 sebesar Rp 800.000.000 dengan biaya oprasional sebesar Rp 150.000.000 dan biaya penjualan sebesar Rp 200.000.000. Maka perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan yang dihitung melalui pembukuan dan penerapan PP 46 Tahun 2013 disajikan dalam Tabel 4.7:

Tabel 4.7 Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Menggunakan Pembukuan dan PP 46 Tahun 2013

	PPh menggunakan Pembukuan	PPh menggunakan PP 46 Tahun 2013
Peredaran Bruto	Rp 800.000.000	Rp 800.000.000
Biaya Oprasional	(Rp 150.000.000)	-
Biaya Penjualan	(Rp 200.000.000)	-
Laba Bersih	<u>Rp 450.000.000</u>	-
PTKP	(Rp 30.375.000)	-
Penghasilan Kena Pajak	Rp 419.625.000	Rp 800.000.000
PPh Terutang	Rp 74.906.250	Rp 8.000.000

Sumber: *Data diolah Peneliti (2015)*

Tabel 4.7 menjelaskan mengenai perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan yang dihitung menggunakan pembukuan sebelum diterbitkannya PP 46 Tahun 2013 dan dengan menggunakan PP 46 Tahun 2013. Berdasarkan perhitungan tersebut, Pajak Penghasilan yang dikenakan menggunakan pembukuan jauh lebih besar dibandingkan dengan Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan PP 46 Tahun 2013. Sehingga Tuan Ali dapat melakukan penghematan pajak sebesar Rp. 66.906.250 dengan diterapkannya PP 46 Tahun 2013, maka Tuan Ali diuntungkan dengan diterbitkannya PP 46 Tahun 2013.

Berdasarkan ilustrasi yang sama, peredaran bruto selama Tahun 2014 adalah sebesar Rp 800.000.000. Perhitungan Pajak Penghasilan menggunakan Perhitungan Penghasilan Neto sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 17 Tahun 2015 tanggal 10 April 2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan yang terutang disajikan pada Tabel 4.8:

Tabel 4.8 Perhitungan Pajak Penghasilan Menggunakan Norma dan PP 46 Tahun 2013

	Norma Perhitungan Penghasilan Neto	PP 46 Tahun 2013
Peredaran Bruto	Rp.800.000.000	Rp 800.000.000
Norma Penghasilan Neto	36%	-
Prakiraan Penghasilan Neto	Rp 288.000.000	-
PTKP	(Rp 30.375.000)	-
Penghasilan Kena Pajak	Rp257.625.000	-
Pajak Penghasilan	<u>Rp34.406.250</u>	<u>Rp 8.000.000</u>

Sumber: *Data diolah Peneliti (2015)*

Tabel 4.8 menyajikan tentang perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto dengan setelah diterapkannya PP 46 Tahun 2013. Semakin tinggi presentase norma untuk menghitung penghasilan neto maka akan semakin besar Penghasilan Kena Pajak. Semakin tinggi Penghasilan Kena Pajak maka akan semakin besar pula Pajak Penghasilan yang terutang, dikarenakan Pajak Penghasilan yang dihitung menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto menggunakan tarif progresif Pasal 17 ayat (1). Berdasarkan ilustrasi tersebut, Tn Ali mengalami penghematan Pajak Penghasilan sebesar Rp26.406.250 dibandingkan jika Tn Ali menghitung Pajak Penghasilannya melalui Norma Perhitungan Penghasilan Neto. Dengan diterapkannya PP 46 Tahun 2013, Tn. Ali diuntungkan dengan membayar Pajak Penghasilan yang terutang.

2) Wajib Pajak Badan

Perhitungan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak badan sebelum diterbitkan PP 46 Tahun 2013 didasarkan oleh jumlah laba netto yang diperoleh oleh Badan tersebut dikalikan dengan tarif sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang Pajak Penghasilan yaitu sebesar 25%. Selanjutnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang didominasi oleh pelaku usaha kecil dan menengah, maka pemerintah berfikir untuk perlu memberikan insentif berupa pengurangan tarif PPh sebesar 50% kepada pelaku usaha yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) dengan penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sesuai dengan Pasal 31

E Undang-undang Pajak Penghasilan. Akan tetapi semenjak diterbitkannya PP 46 Tahun 2013, insentif Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 31 E Undang-undang Pajak Penghasilan hanya berlaku untuk Wajib Pajak dengan peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sampai dengan peredaran bruto Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah), sedangkan peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dikenakan tarif 1% yang dikalikan dari peredaran bruto sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Berikut merupakan ilustrasi perhitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Badan:

CV. ABC memiliki kegiatan usaha berupa usaha catering yang berlokasi di Kelurahan Dinoyo. Pada Tahun 2014 CV. ABC memiliki peredaran usaha Rp 3.450.000.000 dan biaya oprasional sebesar Rp 3.277.500.000. Peredaran bruto CV. ABC tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dan termasuk kriteria yang dikenakan PP 46 Tahun 2013. Dalam menghitung Pajak Penghasilan tersebut dihitung dengan tarif 1% dari peredaran bruto tanpa memperhatikan laba maupun kerugian yang diperoleh oleh Wajib Pajak. Untuk memahami perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan sebelum dan sesudah penerapan PP 46 Tahun 2013, maka akan disajikan perhitungan Pajak Penghasilan sebagai berikut:

	Sebelum Penerapan PP 46 Tahun 2013 (Pasal 31E UU PPh)	Setelah Penerapan PP 46 Tahun 2013
Peredaran Bruto	Rp 3.450.000.000	Rp 3.450.000.000
	<u>(Rp 3.277.500.000)</u>	-
Laba/ Rugi Bersih	Rp 172.500.000	-
Tarif	12,5% x Rp 172.500.000	1% x Rp 3.450.000.000
PPh Terutang	<u>Rp 21.562.500</u>	<u>Rp 34.500.000</u>

Berdasarkan ilustrasi tersebut penerapan PP 46 Tahun 2013 berdampak negatif terhadap besar Pajak Penghasilan yang terutang pada CV.ABC. Wajib Pajak yang memiliki margin laba atau laba bersih dibawah 8%. CV.ABC tersebut membayar Pajak Penghasilan yang lebih besar dibandingkan sebelum diterapkannya PP 46 Tahun 2013. Sehingga CV.ABC tersebut mengalami kerugian karena membayar Pajak Penghasilan lebih besar sebesar Rp 12.937.500. Wajib Pajak yang memiliki margin laba kurang dari 8% misalnya adalah Wajib Pajak yang kegiatan usahannya menjual sembako, mobil bekas, dan rokok.

Dengan keterangan tersebut, misalnya Tahun 2014 CV. ABC memiliki biaya oprasional sebesar Rp 3.174.000.000, maka perhitungan Pajak Penghasilannya adalah sebagai berikut:

	Sebelum Penerapan PP 46 Tahun 2013 (Pasal 31E UU PPh)	Setelah Penerapan PP 46 Tahun 2013
Peredaran Bruto	Rp 3.450.000.000	Rp 3.450.000.000
Biaya Oprasional	<u>(Rp 3.174.000.00)</u>	-
Laba/ Rugi Bersih	Rp 276.000.000	-
Tarif	12,5% x Rp 276.000.000	1% x Rp 3.450.000.000
PPh Terutang	<u>Rp 34.500.000</u>	<u>Rp 34.500.000</u>

Berdasarkan perhitungan Pajak Penghasilan tersebut, CV. ABC tidak dirugikan maupun diuntungkan dengan penerapan PP 46 Tahun 2013, dikarenakan CV. ABC memiliki margin laba sebesar 8%. Margin laba 8% merupakan titik impas yang dijadikan pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan kebijakan PP 46 Tahun 2013 (Tambunan, 2013). Sehingga apabila seorang Wajib Pajak memiliki margin laba sebesar 8% maka atas Pajak

Penghasilan yang terutang sebelum dan sesudah penerapan PP 46 Tahun 2013 adalah sama.

Berdasarkan keterangan tersebut, misalnya Tahun 2014 CV. ABC memiliki laba bersih sebesar Rp 345.000.000 , maka perhitungan Pajak Penghasilannya adalah sebagai berikut:

	Sebelum Penerapan PP 46 Tahun 2013 (Pasal 31E UU PPh)	Setelah Penerapan PP 46 Tahun 2013
Peredaran Bruto	Rp 3.450.000.000	Rp 3.450.000.000
Biaya Oprasional	<u>(Rp 3.105.000.000)</u>	-
Laba/ Rugi Bersih	Rp 345.000.000	-
Tarif	12,5% x Rp 345.000.000	1% x Rp 3.450.000.000
PPh Terutang	<u>Rp 43.125.000</u>	<u>Rp 34.500.000</u>

Berdasarkan perhitungan Pajak Penghasilan, Wajib Pajak tersebut diuntungkan dengan diterbitkannya PP 46 Tahun 2013. Wajib Pajak yang diuntungkan memiliki margin laba sebesar 8%. Wajib Pajak yang memiliki margin laba lebih dari 8% misalnya; Wajib Pajak yang memiliki usaha dibidang makanan dan minuman, obat-obatan dan usaha konveksi. Dengan diterbitkannya PP 46 Tahun 2013, Wajib Pajak tersebut terutang Pajak Penghasilan yang lebih rendah daripada sebelum diterbitkannya PP 46 Tahun 2013. Sehingga Wajib Pajak tersebut dapat melakukan penghematan pajak sebesar Rp 8.625.000 dengan diterbitkannya PP 46 Tahun 2013 .

Dengan keterangan tersebut, misalnya Tahun 2014 CV. ABC memiliki rugi sebesar (Rp 172.500.000), maka perhitungan Pajak Penghasilannya:

	Sebelum Penerapan PP 46 Tahun 2013 (Pasal 31E UU PPh)	Setelah Penerapan PP 46 Tahun 2013
Peredaran Bruto	Rp 3.450.000.000	Rp 3.450.000.000
	(Rpp 3.622.500)	-

Laba/ Rugi Bersih	(Rp 172.500.000)	-
Tarif	12,5% x (Rp 172.500.000)	1% x Rp 3.450.000.000
PPh Terutang	<u>Rp -</u>	<u>Rp 34.500.000</u>

Sebelum penerbitan PP 46 Tahun 2013, Wajib Pajak yang mengalami kerugian atas kegiatan usahanya dapat dibebaskan dari kewajiban pembayaran pajak terutang dan dapat dikompensasikan atas penghasilan usahanya pada 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan perhitungan tersebut Wajib Pajak tersebut mengalami kerugian dengan diterapkannya PP 46 Tahun 2013, dikarenakan Wajib Pajak tersebut masih berkewajiban untuk melakukan pembayaran Pajak Penghasilan meskipun usahanya mengalami kerugian. Hal ini disebabkan dasar pengenaannya dari peredaran bruto Wajib Pajak tanpa memperhatikan biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak. Sehingga meskipun Wajib Pajak tersebut mengalami kerugian akan tetapi Wajib Pajak tersebut masih terutang Pajak sesuai dengan PP 46 Tahun 2013.

Berdasarkan perhitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak dengan beberapa margin laba tertentu, dapat disimpulkan bahwa penerbitan PP 46 Tahun 2013 memiliki dampak yang bervariasi. Dengan diterbitkannya PP 46 Tahun 2013 terdapat Wajib Pajak yang diuntungkan karena membayar Pajak Penghasilan yang lebih sedikit dan ada pula Wajib Pajak yang mengalami kerugian dikarenakan membayar Pajak Penghasilan lebih besar dari sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Isnaini Pegawai *Account Representative*,

“Dampak diterbitkannya PP 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Utara sangatlah beragam. Misalnya Wajib Pajak yang memiliki tingkat laba rendah seperti toko sembako dan rokok, mereka justru dirugikan

dengan penerapan PP 46 Tahun 2013 karena Wajib Pajak tersebut malah terutang pajak lebih besar. Sedangkan Wajib Pajak yang diuntungkan adalah mereka yang memiliki kegiatan usaha seperti toko obat-obatan, makanan dan minuman di resto dan yang memiliki usaha butik.” (Wawancara tanggal 11 Desember 2015, di Ruang Seksi Pengawasan dan Konsultasi)

Meskipun penerbitan PP 46 Tahun 2013 menimbulkan berbagai banyak dampak, akan tetapi penerbitan PP 46 Tahun 2013 dapat membangun kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak mulai terlatih untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan negara lewat pembayaran pajak. Berdasarkan ilustrasi tersebut, diharapkan DJP dapat lebih mengkaji mengenai tarif PP 46 Tahun 2013, prinsip keadilan dalam pemungutan pajak serta keuntungan dari masing-masing kategori usaha. Sehingga nantinya dampak penerapan PP 46 Tahun 2013 tidak menimbulkan perbedaan yang terlalu lebar antara Wajib Pajak yang diuntungkan dan yang dirugikan.

b. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Utara

PP 46 Tahun 2013 merupakan suatu kebijakan yang diterbitkan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000. Pajak Penghasilan ini terutang atas peredaran bruto Wajib Pajak setiap bulannya dengan tarif 1 % dan bersifat final. Sehingga Wajib Pajak akan menghitung dan menyetor Pajak Penghasilan setiap bulannya dengan dasar peredaran bruto setiap bulan yang dihasilkan Wajib Pajak.

Wajib Pajak merupakan instrumen yang paling penting dalam tercapainya suatu kebijakan pajak. Sejalan dengan diterbitkannya kebijakan

baru, maka DJP melakukan banyak kegiatan untuk mensosialisasikan PP 46 Tahun 2013 kepada seluruh Wajib Pajak. KPP Pratama Malang Utara merupakan instansi dibawah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menerapkan PP 46 Tahun 2013. Sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman Wajib Pajak dan meningkatkan penerimaan pajak, KPP Pratama Malang Utara berupaya untuk memaksimalkan peran Wajib Pajak dalam penerapan PP 46 Tahun 2013 melalui beberapa kegiatan. Beberapa hal yang telah dilakukan KPP Pratama Malang Utara adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung mengenai PP 46 Tahun 2013.

Sejalan dengan diterbitkannya kebijakan atas perubahan aturan perpajakan, KPP Pratama Malang Utara selalu melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak. Bentuk-bentuk penyuluhan terkait dengan penerapan PP 46 Tahun 2013 dibagi menjadi penyuluhan langsung maupun penyuluhan tidak langsung. Penyuluhan langsung terkait dengan penerbitan PP 46 Tahun 2013, misalnya; sosialisasi dan seminar. Sedangkan penyuluhan tidak langsung dilakukan melalui iklan televisi, pamflet, dan leaflet. Hal ini disampaikan oleh Bapak Hendro Sulisty, Kepala Ekstensifikasi dan Penyuluhan,

“Setelah diterbitkannya PP 46 Tahun 2013, kami selalu berupaya untuk melakukan penyuluhan aturan tersebut melalui berbagai media, seperti: sosialisasi, seminar, iklan televisi, pamflet, dan leaflet. Segala bentuk penyuluhan tersebut dilakukan agar dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat” (Wawancara tanggal 10 Desember 2015, di Ruang Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan).

Pelaksanaan sosialisasi merupakan hal yang paling awal dilakukan oleh fiskus. Setiap terdapat kebijakan baru, fiskus selalu melakukan sosialisasi dengan

cara mengundang Wajib Pajak secara massal ke KPP Pratama Malang Utara untuk diberikan pembekalan mengenai pengenaan Pajak Penghasilan PP 46 Tahun 2013. Pelaksanaan sosialisasi tersebut sangat bergantung terhadap kesadaran Wajib Pajak terhadap pelaksanaan sosialisasi. Kebanyakan Wajib Pajak cenderung mengabaikan sosialisasi yang diberikan oleh fiskus, dikarenakan banyak Wajib Pajak yang enggan untuk datang ke Kantor Pajak.

Selain faktor kesadaran Wajib Pajak untuk datang ke KPP, faktor keberhasilan dalam pelaksanaan sosialisasi adalah tingkat penyerapan Wajib Pajak terhadap sosialisasi yang diberikan. Wajib Pajak masih cenderung apatis terhadap aturan perpajakan termasuk PP 46 Tahun 2013. Sehingga terkadang disamping dengan mengadakan sosialisasi fiskus juga melaksanakan penyuluhan lain dengan cara yang lebih efektif untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak melalui penyisiran, atau memanfaatkan media cetak, elektronik dan massa.

KPP Pratama Malang Utara juga pernah diundang untuk melaksanakan seminar di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, untuk membahas mengenai kebijakan penerapan PP 46 Tahun 2013, media seminar dianggap lebih efektif dikarenakan seminar lebih bersifat diskusi terbuka sehingga seluruh pihak yang berkepentingan dalam penerapan PP 46 Tahun 2013 didatangkan untuk melakukan diskusi terbuka. Dengan sifatnya tersebut, *audience* dan pemateri dapat saling berinteraksi dengan lebih baik jika dibandingkan dengan sosialisasi di Kantor Pajak. Adanya seminar tersebut dapat dijadikan media sosialisasi untuk Wajib Pajak dan masyarakat pada umumnya sekaligus media

evaluasi fiskus terhadap kinerjanya terhadap penerimaan dan penerapan PP 46 Tahun 2013.

KPP Pratama Malang Utara juga melakukan penyuluhan melalui leaflet, pamflet, iklan serta segmen khusus di televisi. DJP biasanya akan menerbitkan leaflet dan pamflet mengenai aturan-aturan perpajakan terbaru, salah satunya mengenai penerbitan PP 46 Tahun 2013. Leaflet dan pamflet dibuat sedemikian menarik agar dapat memudahkan Wajib Pajak untuk menyerap informasi yang di berikan. KPP Pratama Malang Utara juga melakukan penyuluhan melalui media elektronik melalui iklan di televisi, dengan harapan aturan mengenai PP 46 Tahun 2013 dapat menjangkau seluruh lapisan Wajib Pajak. Penyuluhan melalui televisi dilakukan dengan meletakkan iklan yang dikemas dengan menarik dan memiliki nilai edukasi agar mudah dipahami. Selain itu KPP Pratama Malang Utara juga pernah menyewa segmen khusus di stasiun Gajayana TV yang mendatangkan Wajib Pajak UMKM, dosen, serta fiskus untuk mengkaji dan mendiskusikan mengenai PP 46 Tahun 2013 tersebut.

2. Melakukan penyisiran (*door to door*) ke kegiatan usaha Wajib Pajak.

Selain melakukan penyuluhan, fiskus juga melakukan penyisiran ke lapangan untuk mengamati usaha Wajib Pajak. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi langsung kepada Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang terutang PP 46 Tahun 2013 untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Bu Insaini Pegawai *Account Representative*, menyatakan:

“Penyisiran merupakan kegiatan untuk terjun langsung ke kegiatan usaha Wajib Pajak yang memenuhi kriteria PP 46 Tahun 2013 untuk

memberikan edukasi secara langsung mengenai penerapan PP 46 Tahun 2013 dan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kalau hanya melakukan sosialisasi di KPP kan kurang, jadi fiskus melakukan penyisiran ke kegiatan usaha Wajib Pajak.” (Wawancara tanggal 11 Desember 2015, di Ruang Seksi Pengawasan dan Konsultasi)

Pelaksanaan penyisiran tersebut dianggap lebih menghasilkan daripada hanya melakukan sosialisasi di KPP, karena Wajib Pajak diberikan edukasi langsung dan pembinaan oleh fiskus mengenai kewajiban perpajakannya sampai dengan Wajib Pajak memahami kewajibannya dengan baik dan benar. Bapak Satria Pelaksana Ekstensifikasi dan Penyuluhan menyatakan

“Pelaksanaan penyisiran Wajib Pajak tersebut dapat dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi maupun Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Meskipun begitu tujuan dari penyisiran kedua seksi tersebut sama, yaitu untuk memaksimalkan pemahaman Wajib Pajak terhadap penerapan PP 46 Tahun 2013” (Wawancara tanggal 14 Desember 2015, di Ruang Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan).

Kegiatan penyisiran ke kegiatan usaha Wajib Pajak merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara *door to door* kepada kegiatan usaha Wajib Pajak tersebut, sehingga pelaksanaan penyisiran memakan waktu yang lama dan tenaga yang cukup besar. Hal ini dikarenakan penyisiran berusaha untuk benar-benar memberikan pemahaman bagi Wajib Pajak tersebut. Kegiatan penyisiran biasanya diawali dengan pengamatan potensi Wajib Pajak melalui data internal maupun data eksternal Wajib Pajak. Pengamatan tersebut dapat dijadikan media tambahan saat melakukan penyisiran guna melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak.

Sebagai implikasi dari penerbitan PP 46 Tahun 2013, KPP Pratama Malang Utara sudah berupaya secara optimal untuk memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak mengenai kebijakan pemajakan baru tersebut. Hal tersebut

ditandai dengan pertumbuhan Wajib Pajak yang dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, dengan demikian semakin banyak Wajib Pajak yang sadar terhadap kewajiban perpajakannya. Penerbitan PP 46 tahun 2013 bertujuan untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan dalam aturan perpajakannya. Penyederhanaan aturan perpajakan tersebut dapat kita lihat dalam perhitungan PPh terutang yang didasarkan oleh peredaran bruto, sehingga Wajib Pajak tidak perlu menghitung laba bersih untuk menghitung PPh terutangnya. Hal ini lebih sederhana bila dibandingkan dengan aturan sebelumnya. Selanjutnya terdapat kemudahan penyetoran PPh terutang melalui ATM dengan Bank yang telah bekerja sama dengan DJP yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan Bank BCA maupun penyetoran melalui *e-billing* yaitu merupakan sistem pembayaran negara yang diadministrasikan DJP sebagai biller dengan menggunakan kode *billing* bagi Wajib Pajak. Serta peniadaan kewajiban pelaporan SPT bagi Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran dan telah diberikan validasi NTPN. Dengan kemudahan tersebut, diharapkan akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, apalagi untuk Wajib Pajak yang sebelumnya kesulitan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Sehingga dengan segala kemudahan yang diberikan Wajib Pajak akan sukarela untuk menyetorkan PPh terutangnya. Bu Isnaini Pegawai *Account Representative*, menjelaskan

“Penerbitan PP 46 Tahun 2013 ini dikemas dengan banyak kemudahan dan kesederhanaan aturan perpajakan. Kemudahan tersebut diharapkan dapat mendorong Wajib Pajak terutama yang sebelumnya sama sekali tidak berkontribusi terhadap pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Akan tetapi banyak Wajib Pajak yang belum memanfaatkan fasilitas penyetoran melalui ATM atau *e-billing*,

dikarnakan persepsi Wajib Pajak yang merasa lebih afdol jika melakukan pembayaran melalui SSP ke Bank. Sehingga fasilitas tersebut belum berjalan dengan baik. Akan tetapi dengan kemudahan dan kesederhanaan aturan pajak tersebut telah mampu meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk menyumbang penerimaan negara melalui pajak” (Wawancara tanggal 11 Desember 2015, di Ruang Seksi Pengawasan dan Konsultasi).

Dalam penerapannya PP 46 Tahun 2013 memiliki dampak terhadap kinerja fiskus salah satunya dalam pembinaan dan pengawasan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Pembinaan Wajib Pajak dimudahkan dengan penyederhanaan perhitungan pajak. Dengan penyederhanaan tersebut, fiskus lebih mudah dalam memberikan konsultasi dan memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal itu disebabkan PP 46 Tahun 2013 memang dibuat semudah dan sederhana, sehingga atas Wajib Pajak yang tidak memiliki keahlian dalam pembukuan perpajakan dapat lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

“Pembinaan dan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman Wajib Pajak dengan aturan PP 46 Tahun 2013 menjadi lebih mudah, dikarenakan aturan yang sederhana maka kami saat menyampaikan isinya menjadi mudah ditangkap oleh Wajib Pajak.”(Bu Isnaini, Pegawai *Account Representative*. Wawancara tanggal 11 Desember 2015, di Ruang Seksi Pengawasan dan Konsultasi).

Sebelum diterapkannya PP 46 tahun 2013, pengawasan Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakannya sangatlah sulit, dikarenakan banyak Wajib Pajak yang melakukan *tax planning* dengan membesarkan biaya-biaya oprasionalnya bahkan beberapa perusahaan berupaya untuk membuat seolah-olah perusahaannya rugi. Hal tersebut mengakibatkan perusahaan akan membayar pajak lebih sedikit atau bahkan tidak melakukan penyetoran pajak sama sekali, akan tetapi setelah diterapkannya PP 46 Tahun 2013 Wajib Pajak

setiap bulan akan terutang Pajak PP 46 Tahun 2013 karena PP 46 Tahun 2013 tersebut terutang dari omzet tanpa memperhatikan biaya yang dikeluarkan perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bu Isnaini Pegawai *Account Representative*,

“Pengawasan kewajiban perpajakan Wajib Pajak menjadi lebih mudah. PP 46 Tahun 2013 terutang kan setiap bulan pasti Wajib Pajak akan selalu melakukan pembayaran pajak. Apabila Wajib Pajak dalam penyeteroran pajaknya terdapat masa yang kosong. Maka pegawai *Account Representative* (AR) akan menerbitkan surat himbauan untuk memberikan keterangan terkait dengan pembayaran masa pajak yang kosong. AR dapat lebih mudah mengawasi mengenai pelaporan peredaran bruto Wajib Pajak yang dengan membandingkan dengan Wajib Pajak dengan usaha sejenis, apabila dengan usaha yang sama namun omzetnya terlalu jauh intervalnya. Selain itu pengujian kebenaran pelaporan peredaran bruto menjadi lebih mudah dengan menggunakan analisa biaya hidup, yaitu dengan membandingkan biaya oprasional Wajib Pajak dengan peredan bruto yang telah dilaporkan” (Wawancara tanggal 11 Desember 2015, di Ruang Seksi Pengawasan dan Konsultasi).

Penerapan PP 46 tahun 2013 di KPP Pratama Malang Utara selama mulai penerbitan hingga akhir 2015 berjalan lancar dan baik. Akan tetapi terdapat hal yang menarik yaitu masalah kepatuhan pembayaran Wajib Pajak, yang mana PP 46 Tahun 2013 terutang atas peredaran bruto setiap bulan Wajib Pajak. Setiap bulannya Wajib Pajak berkewajiban untuk melakukan pembayaran Pajak Penghasilannya. Namun melakukan pembayaran Pajak Penghasilan setiap bulannya bagi beberapa Wajib Pajak tentu sangatlah ribet sehingga kebanyakan Wajib Pajak melakukan pembayaran secara rapel. Hal ini tentu berdampak terhadap penerimaan PP 46 Tahun 2013 setiap bulannya. Realisasi penerimaan PP 46 Tahun 2013 disajikan pada Tabel 4.9:

Tabel 4.9 Realisasi Penerimaan PP 46 Tahun 2013 Setiap Bulan

No.	Bulan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Januari	-	397.371.974	657.488.614
2.	Februari	-	464.516.664	711.286.854
3.	Maret	-	800.729.466	1.128.904.365
4.	April	-	725.894.809	1.078.698.787
5.	Mei	-	397.371.974	716.560.724
6.	Juni	-	569.277.564	859.740.494
7.	Juli	-	575.773.093	697.171.153
8.	Agustus	43.656.322	580.832.950	817.543.880
9.	September	185.770.784	568.882.157	843.655.288
10.	Oktober	251.090.614	583.365.789	1.058.629.633
11.	November	337.659.851	746.398.961	1.215.813.975
12.	Desember	482.343.062	711.037.402	-
Jumlah		1.300.520.633	7.260.997.685	9.785.493.767

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi, (Data diolah Peneliti, 2015)

Tabel 4.9 menjelaskan mengenai realisasi penerimaan PP 46 Tahun 2013 mulai awal penerapannya pada Juli Tahun 2013 hingga November Tahun 2015. Berdasarkan Tabel 4.9, penerimaan PP 46 Tahun 2013 setiap bulannya mengalami fluktuatif yang mana kecenderungan pembayaran tertinggi berada pada bulan Maret dan April yang merupakan bulan pelaporan SPT Tahunan. Penerimaan pajak yang fluktuatif tersebut mencerminkan kurangnya ketelatenan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pada setiap bulannya, sehingga penerimaan yang dikumpulkan pun tidak bisa stabil. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bu Isnaini Pegawai *Account Representative*

“Memang benar mbak, kalau dilihat dari penerimaannya setiap bulan PP 46 memang fluktuatif. Karena banyak Wajib Pajak yang enggan melakukan pembayaran setiap bulan. Sehingga mereka melakukan pembayaran secara rapel dengan membayar Pajak Penghasilan bulan tersebut serta beberapa bulan kedepannya. Dasarnya adalah peredaran bruto pada bulan penyetoran mbak. Jadi kalau misal ada peredarannya meningkat dan menimbulkan kekurangan penmbayaran pajak Wajib Pajak tinggal setor kekurangannya saja.” (Wawancara tanggal 11 Desember 2015, di Ruang Seksi Pengawasan dan Konsultasi).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak masih kurang telaten untuk melakukan pembayaran pajak setiap bulannya dan lebih memilih membayar secara rapel kewajiban perpajakannya. Dalam PP 46 Tahun 2013 maupun aturan pelaksanaannya tidak terdapat larangan untuk melakukan pembayaran secara rapel, hanya terdapat batasan waktu terakhir dalam melakukan pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/ PMK.011/ 2013 Tanggal 30 Juli 2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yaitu

“Wajib Pajak wajib menyetor Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak, yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.”

Berdasarkan aturan tersebut, dapat disimpulkan Wajib Pajak diharuskan melakukan pembayaran Pajak Penghasilan maksimal tanggal 15 setelah masa pajak berakhir, apabila Wajib Pajak tersebut terlambat maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut akhirnya dimanfaatkan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak secara Rapel agar Wajib Pajak tidak dikenakan sanksi atas keterlambatan setor dan tetap dapat memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu melakukan penyetoran pajak.

KPP Pratama Malang Utara selalu berusaha untuk membina Wajib Pajak agar selalu memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Sebagai implikasi dari pembayaran pajak secara rapel oleh Wajib Pajak, fiskus selalu

berupaya untuk membantu Wajib Pajak agar tetap melakukan penyetoran pajak setiap bulan melalui ATM maupun *e-billing*. Sehingga Wajib Pajak tidak perlu datang setiap bulan ke Kantor Pos atau ke Bank Presepsi, Wajib Pajak hanya perlu memanfaatkan ATM maupun *e-billing* untuk melakukan pembayaran pajak setiap bulannya. Bapak Cornelius Djoko Purwanto Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menjelaskan,

“Memang kebanyakan Wajib Pajak kita tuh masih melakukan pembayaran lewat kantor pos dan bank presepsi. Karena mereka merasa lebih afdol kalau menggunakan SSP. Nah kalo setiap bulan ke kantor pos / bank Wajib Pajak kerepotan sehingga biasanya mereka bayar untuk beberapa bulan kedepannya. Mereka beranggapan itu nggak melanggar aturan dan juga tidak akan dikenakan sanksi. Nah kami selaku *account representative* selalu berupaya agar mereka dapat melakukan kewajibannya dengan baik dan benar dengan cara selalu mensosialisasikan fasilitas pembayaran pajak yang mudah dan aman yaitu melalui ATM dan *e-billing*. Dengan harapan dapat memicu Wajib Pajak agar lebih mudah dan nyaman kalau melakukan pembayaran mbak” (Wawancara tanggal 18 Desember 2015, di Ruang Seksi Pengawasan dan Konsultasi).

Selain permasalahan kepatuhan Wajib Pajak, terdapat beberapa kendala dalam penerapan PP 46 Tahun 2013 yaitu; kendala eksternal dan kendala internal. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Cornelius Djoko Purwanto Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi yaitu

“Selama penerapannya PP 46 Tahun 2013 juga terdapat kendala-kendalanya mbak. Nah kendalanya bisa dari pihak internal yaitu ketersediaan data untuk melakukan pengawasan atau penggalian potensi dan ketidakseimbangan jumlah *account representative* dengan Wajib Pajak terdaftar. Tapi kalau dari eksternal sendiri itu dari pihak Wajib Pajak terkait dengan tingkat pemahaman sama kesadaran Wajib Pajak sendiri” (Wawancara tanggal 16 Desember 2015, di Ruang Seksi Pengawasan dan Konsultasi).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terdapat kendala baik dari internal maupun dari eksternal dalam penerapan PP 46 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Kendala Internal
 - a. Ketersediaan Data

Salah satu tugas KPP Pratama Malang Utara yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi (*Account Representative*) memiliki tugas untuk melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan analisis kinerja Wajib Pajak. Dalam melakukan kegiatan tersebut, *Account Representative* membutuhkan data yang valid yang sesuai dengan kondisi Wajib Pajak sebenarnya. Data yang biasanya digunakan untuk melakukan pengawasan dan penggalan potensi terhadap Wajib Pajak merupakan data internal Wajib Pajak yang telah terintegrasi secara terpusat. Sehingga data tersebut dapat diakses oleh Kantor Pajak di seluruh Indonesia. Akan tetapi dalam proses pengamatan dan pengawasan yang lebih optimal, tidak cukup jika hanya menggunakan data dari internal DJP. Bu Isnaini Pegawai *Account Representative* menjelaskan,

“Dalam melakukan pengawasan dan penggalan potensi kita selalu menggunakan data internal yang sudah terpusat dan terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh KPP di Indonesia. Tapi kalau hanya mengandalkan data internal saja nggak cukup mbak. Kita juga perlu melakukan pertukaran informasi dengan pihak lain untuk melakukan pengawasan dan penggalan potensi secara lebih optimal dari sektor yang belum dimiliki oleh kami” (Wawancara tanggal 16 Desember 2015, di Ruang Seksi Pengawasan dan Konsultasi)

Berdasarkan penjelasan tersebut, KPP Pratama Malang Utara juga membutuhkan data eksternal untuk menambah bahan dalam melakukan

pengamatan dan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak tersebut. Hal tersebut juga mempengaruhi pengamatan dan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak mengenai penerapan PP 46 Tahun 2013, kurangnya data tambahan tersebut menjadikan kegiatan pengamatan dan pengawasan kepatuhan menjadi kurang maksimal.

b. Ketidakseimbangan Jumlah *Account Representative* dan Wajib Pajak

PP 46 tahun 2013 merupakan kebijakan yang diterbitkan DJP pada bulan juli 2013, sejalan dengan diterbitkannya peraturan tersebut maka tugas dari *Account Representative* dan Pelaksana Ekstensifikasi dan Penyuluhan menjadi bertambah. Petugas tersebut bertugas untuk melakukan konsultasi, pengamatan dan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerbitan PP 46 Tahun 2013 tersebut. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Wajib Pajak terkait dengan kebijakan pajak. Permasalahannya adalah ketidakseimbangan jumlah petugas pajak dan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Perbandingan Jumlah Wajib Pajak dengan *Account Representative* disajikan pada Tabel 4.10:

Tabel 4.10 Perbandingan Jumlah Wajib Pajak dengan Pegawai Pajak di KPP Pratama Malang Utara Tahun 2015

Jenis	Jumlah
Wajib Pajak Terdaftar	81388 orang
<i>Account Representative</i>	24 orang

Sumber: Seksi Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Malang Utara, 2015

Tabel 4.10 menjelaskan mengenai gambaran perbandingan antara jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dengan jumlah *Account Representative* yang sangat jauh. Berdasarkan Tabel 4.10, seorang *Account Representative* harus

memberikan konsultasi, melakukan pengamatan dan pengawasan kepada 3.392 Wajib Pajak mengenai penerapan PP 46 Tahun 2013. Sehingga dengan perbandingan yang sangat jauh, fiskus selalu berusaha untuk mengoptimalkan pegawai pajak dalam memberikan pelayanan dan pengawasan kepada Wajib Pajak. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Cornelius Djoko Kepala Pengawasan dan Konsultasi,

“Salah satu faktor penghambat internal dalam penerapan PP 46 Tahun 2013 yaitu ketidak seimbangan jumlah SDM pelayanan dan *Account Representative* dengan jumlah Wajib Pajak yang harus dilayani. Sehingga proses penerapan PP 46 tahun 2013 masih belum maksimal.” (Wawancara tanggal 16 Desember 2015, di Ruang Seksi Pengawasan dan Konsultasi).

Ketidakseimbangan jumlah tersebut menambah beban *Account Representative* dan ekstensifikasi dan penyuluhan dalam melakukan sosialisasi dan edukasi untuk memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak terhadap penerapan peraturan terbaru dan menambahnya beban tugas *Account Representative* dalam melakukan Pemindahbukuan (Pbk) atas kesalahan penyetoran yang dilakukan Wajib Pajak.

2. Kendala Eksternal

a. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak

PP 46 Tahun 2013 merupakan kebijakan pemajakan baru yang diterbitkan DJP pada pertengahan Juli Tahun 2013. Dengan penerbitan di pertengahan tahun tersebut, banyak Wajib Pajak yang masih belum faham terkait dengan penerbitan aturan perpajakan baru tersebut. Sehingga pada awal penerapannya banyak Wajib Pajak yang menyetor Pajak Penghasilan dengan kode setoran dan perhitungan yang lama serta mengisi form SPT dengan format

yang lama. Pemahaman Wajib Pajak yang kurang tersebut juga diakibatkan kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam aktif terhadap perubahan aturan pajak. Banyak Wajib Pajak yang masih enggan dalam mengikuti sosialisasi maupun penyuluhan terkait dengan kebijakan baru. Sehingga pada awal penerapannya PP 46 Tahun 2013 masih banyak Wajib Pajak yang belum memahami aturan tersebut. Bu Isnaini Pegawai *Account Representative* menegaskan,

“Pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak merupakan hal yang paling penting dalam keberhasilan sistem pemungutan pajak *self assessment* jadi meskipun fiskus melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi kalau Wajib Pajak masih belum sadar dan faham maka penerimaan yang dikumpulkan juga nggak maksimal.” (Wawancara tanggal 11 Desember 2015, di Ruang Seksi Pengawasan dan Konsultasi).

c. Dasar Pertimbangan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Utara

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP 46 Tahun 2013) merupakan peraturan pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dengan tarif 1% (satu persen). PP 46 Tahun 2013 dikelompokkan pada Objek Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-undang Pajak Penghasilan “Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”. Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan, penghasilan yang bisa dikenakan PPh final harus memenuhi pertimbangan-pertimbangan antara lain:

- 1) Perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat;
- 2) Kesederhanaan dalam pemungutan pajak;
- 3) Berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Dirjen Pajak;
- 4) Pemerataan dalam pengenaan pajak; dan
- 5) Memperhatikan perkembangan ekonomi moneter

Berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan tersebut, dasar pertimbangan penerbitan PP 46 Tahun 2013 mengacu kepada penjelasan pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-undang Pajak Penghasilan. Dasar pertimbangan penerbitan PP 46 Tahun 2013 juga ditekankan dalam Bagian I Umum penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, sebagai berikut:

- 1) Perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak;

Sebelum diterbitkannya PP 46 Tahun 2013, aturan perpajakan mengenai perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) sangatlah bervariasi. Misalnya: peraturan pengenaan pajak dengan tarif progresif sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, pengenaan pajak dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (*deemed profit*) sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) Tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Sedangkan Wajib Pajak Badan dalam negeri yang memiliki pesedaran bruto sampaidengan Rp 50.000.000.000 (lima

puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) sesuai dengan pasal 31 E ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan dari tarif normal 25% yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) yang bervariasi tersebut, membutuhkan pemahaman Wajib Pajak sebagai agen yang penting dalam keberhasilan pemungutan pajak. Permasalahannya adalah banyak Wajib Pajak yang belum memahami tata cara perhitungan PPh. DJP merumuskan suatu kebijakan yang dianggap mampu mengatasi permasalahan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP 46 Tahun 2013. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Cornelius Djoko Purwanto Kepala Pengawasan dan Konsultasi, menyatakan dengan diterbitkannya PP 46 Tahun 2013,

“Wajib Pajak akan lebih mudah dan sederhana dalam perhitungan Pajak Penghasilan terutang dikarenakan PP 46 Tahun 2013 kan terutang dari peredaran bruto Wajib Pajak bukan penghasilan netto Wajib Pajak. Jadi Wajib Pajak tidak akan kesulitan dalam menentukan Pajak Penghasilannya”. (Wawancara tanggal 16 Desember 2015, di Ruang Seksi Pengawasan dan Konsultasi)

Seiring dengan diterbitkannya PP 46 Tahun 2013, DJP juga menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/ PMK.03/2013 Tanggal 30 Juli 2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang

Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yang bertujuan untuk memudahkan, menyederhanakan dan memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

- 2) Berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak;

Salah satu pertimbangan penerbitan PP 46 Tahun 2013 adalah berkurangnya beban administrasi bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak. Berkurangnya beban administrasi bagi Wajib Pajak berdasarkan PP 46 Tahun 2013 terkait dengan kemudahan perhitungan pajak yang terutang, kemudahan pembayaran pajak melalui ATM serta ditiadakannya kewajiban pelaporan pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak yang telah mendapatkan NTPN. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Cornelius Djoko Purwanto Kepala Pengawasan dan Konsultasi, yaitu:

“Dengan diterbitkannya PP 46 Tahun dengan segala kemudahan dan penyederhanaan peraturan yang telah diatur di PP 46 Tahun 2013, maka diharapkan bisa memicu kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jadi dapat meningkatkan penerimaan negara melalui pajak” (Wawancara tanggal 16 Desember di Ruang Seksi Pengawasan dan Konsultasi).

Selanjutnya pertimbangan diterapkannya PP 46 Tahun 2013 yaitu berkurangnya beban administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yangmana dimaksudkan untuk lebih memudahkan DJP dalam melakukan pengawasan dan pembinaan Wajib Pajak dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut ditekankan Bapak Cornelius Djoko Purwanto Kepala Pengawasan dan Konsultasi melalui pernyataan:

“Dengan diterbitkannya PP 46 Tahun 2013, pengawasan Wajib Pajak terhadap pembayaran pajaknya jadi lebih mudah. *Account Representative* (AR) melakukan pengawasan melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) dengan melihat pembayaran masanya. Ketika ada masa yang setorannya kosong, maka AR akan menerbitkan surat himbauan kepada Wajib Pajak. Karena PP 46 Tahun 2013 terutang terhadap omzet jadi selama usaha tersebut berjalan pasti akan terutang PP 46 Tahun 2013. Selanjutnya pengawasan dapat berupa perbandingan melalui analisa biaya hidup yang dapat menentukan omzet sebenarnya dari suatu usaha milik Wajib Pajak yaitu dengan menanyakan pengeluaran rutin Wajib Pajak yang dibandingkan dengan omzet yang dilaporkan, serta melalui perbandingan dengan omzet usaha sejenis.” (Wawancara tanggal 16 Desember di Ruang Seksi Pengawasan dan Konsultasi).

3) Serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

Sebagaimana yang kita ketahui Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang perekonomiannya di dominasi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meskipun omzet serta laba yang dihasilkan relative rendah namun jumlah unit usaha tersebut mendominasi sekitar 99,99% dari total unit usaha di Indonesia sesuai dengan Tabel 1.1. Dengan jumlah yang mayoritas tersebut, UMKM merupakan tonggak perekonomian di negara Indonesia. Pertumbuhan Unit UMKM yang selalu meningkat setiap Tahunnya tersebut berdampak pula terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar 96,9% dan pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Tahun 2014 sebesar 60,34%. Meskipun UMKM mampu menyumbang dalam pembentukan PDB yang lumayan besar, namun dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya hanya 5% (Tambunan, 2013)

Berdasarkan data tersebut terdapat kesenjangan antara kontribusi dalam pembentukan PDB dan penyerapan tenaga kerja dengan kontribusinya terhadap pajak. Kesenjangan tersebut diakibatkan banyak Wajib Pajak yang kurang sadar

dan tidak patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya, sehingga penerimaan yang dikumpulkan masih belum optimal. Berdasarkan pertimbangan bahwa UMKM merupakan tonggak perekonomian dan memiliki potensi besar dalam penerimaan negara, maka Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang merupakan kebijakan fiskal pemerintah dalam memberikan kesederhanaan dan kemudahan aturan pajak, mengedukasi untuk tertib administrasi dan transparansi, dan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. Sehingga diharapkan dengan penerbitan PP 46 Tahun 2013 maka Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk ikut berkontribusi dalam penerimaan negara.

Selain yang telah tercermin dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, terdapat beberapa dasar pertimbangan penerbitan PP 46 Tahun 2013 menurut Bu Isnaini Pegawai *Account Representative*, yaitu; pemerataan pengenaan pajak. Sebelum diterbitkannya PP 46 Tahun 2013, sumbangan Wajib Pajak tersebut terhadap penerimaan negara melalui pajak sangatlah kecil hanya sebesar 5% (Tambunan, 2013 diakses dari ortax.org). Padahal jumlah unitnya mendominasi perekonomian di Indonesia. Penerimaan pajak masih didominasi oleh Wajib Pajak unit usaha Besar yang jumlahnya kurang dari 1% (satu persen). Sehingga dengan diterbitkannya PP 46 Tahun 2013 tersebut, diharapkan seluruh lapisan

masyarakat bisa ikut berkontribusi dalam penyelenggaraan negara melalui pembayaran pajak. Hal ini sesuai dengan pernyataan *Account Representative* di KPP Pratama Malang Utara:

“PP 46 Tahun 2013 merupakan pajak yang dikenakan 1% dari omzet dan bersifat final. Dengan perhitungan pajak terutang yang mudah, diharapkan bisa mendorong seluruh kesadaran lapisan masyarakat terutama UMKM dalam pembayaran pajaknya. Sehingga seluruh Wajib Pajak dapat ikut menyumbang dalam pembangunan negara melalui pajak sesuai dengan kemampuannya masing-masing”. (Wawancara tanggal 11 Desember 2015, di Ruang Seksi Pengawasan dan Konsultasi)

Sebagaimana yang telah dijelaskan PP 46 Tahun 2013 tersebut terutang kepada Wajib Pajak yang menerima/ memperoleh penghasilan dari usaha yang peredaran brutonya tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), yangmana Wajib Pajak tersebut sebelum diterbitkannya PP 46 Tahun 2013 merupakan Wajib Pajak yang pembayaran pajaknya nihil atau memiliki penghasilan kurang dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sehingga kontribusinya melalui pembayaran pajak sangatlah minim. Dengan diterbitkannya PP 46 Tahun 2013 yang terutang melalui omzet tersebut, diharapkan dapat memperluas pengenaan pajak serta Wajib Pajak akan terlatih dan patuh untuk ikut menyumbang penerimaan negara melalui pembayaran pajak.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, terdapat pengecualian mengenai pengenaan Pajak Penghasilan atas usaha informal seperti Pedagang Kaki Lima, asongan, dan warung tenda. Pengecualian tersebut yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun

2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;

“Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:

- a. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
- d. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.”

Pengecualian pengenaan pajak terhadap Wajib Pajak tersebut, terdapat beberapa pertimbangan dalam merumuskan kebijakan tersebut. Pertimbangan tersebut antara lain:

- a. Unit usaha informal tersebut tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Unit usaha informal merupakan unit usaha kecil yang melakukan kegiatan usaha yang bekerja dengan keterbatasan baik modal, fisik, maupun keahlian. Kebanyakan unit usaha informal tersebut memiliki penghasilan yang tidak melebihi PTKP. Sehingga agar tidak memberatkan unit usaha informal maka DJP memberlakukan pengecualian Pajak Penghasilan atas PP 46 Tahun 2013. Hal tersebut sesuai dengan pemaparan Bapak Cornelius Djoko Kepala Pengawasan dan Konsultasi;

“Pertimbangan pengecualian pajak PP 46 Tahun 2013 tersebut didasarkan pertimbangan bahwa kebanyakan sektor informal memiliki penghasilan dari usahanya yang relatif kecil dan dibawah PTKP, sehingga agar usaha tersebut bisa berkembang dan berjalan maka DJP memberlakukan pengecualian tersebut.” (Wawancara tanggal 16 Desember di Ruang Seksi Pengawasan dan Konsultasi)

Berdasarkan penjelasan tersebut, unit usaha informal tersebut bukan merupakan objek Pajak Penghasilan menurut PP 46 Tahun 2013. Pengecualian

tersebut berkaitan dengan pertimbangan DJP atas kemampuan pembayaran dari unit usaha informal. Agar unit usaha dapat berkembang, maka diberikan pengecualian pengenaan Pajak Penghasilan. Sehingga unit usaha tersebut tidak terbebani oleh pajak. Apabila pada suatu saat penghasilan yang diterima Wajib Pajak tersebut melebihi PTKP, maka pengenaan pajak penghasilan tersebut menggunakan tarif progresif sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan.

b. Kesulitan pengawasan kewajiban perpajakan Wajib Pajak oleh *Account Representative* (AR)

Peredaran Bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak terutang sesuai PP 46 Tahun 2013 dihitung dari seluruh peredaran usaha termasuk dari usaha cabang, yangmana PP 46 Tahun 2013 tersebut terutang berdasarkan lokasi. Sedangkan unit usaha informal seperti: PKL, pedagang ansongan serta warung tenda yang tidak memiliki bangunan permanen yang digunakan dalam kegiatan usahannya yang memungkinkan mereka untuk berpindah dari suatu lokasi ke lokasi lain. Hal ini menimbulkan kesulitan pengawasan oleh AR dalam menganalisis potensinya, karena Wajib Pajak cenderung berpindah-pindah. Bu Isnaini Pegawai *Account Representative* menjelaskan:

“Pertimbangan pemberlakuan PP 46 Tahun 2013 adalah mengurangi beban administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), beban administrasi DJP tersebut bertujuan untuk memudahkan pengawasan. Apabila DJP menerapkan unit usaha informal sebagai objek PP 46 Tahun 2013 tentunya membuat pengawasan kewajiban perpajakannya menjadi lebih sulit, karena PP 46 Tahun 2013 terutang berdasarkan lokasi. AR akan kesulitan dalam berpindah. Selain itu unit usaha informal biasanya memiliki penghasilan yang tidak melebihi PTKP. Pengecualian PP 46 Tahun 2013 atas Wajib Pajak unit usaha informal tersebut merupakan

kebijakan yang tepat.” (Wawancara tanggal 11 Desember 2015, di Ruang Seksi Pengawasan dan Konsultasi)

Berdasarkan hal tersebut, maka Wajib Pajak tersebut tidak terutang PP 46 Tahun 2013, dikarenakan Wajib Pajak tersebut tidak memiliki tempat permanen untuk menjalankan usahanya. Sehingga dalam pengawasan dan analisis potensinya menjadi lebih sulit. Selain itu sasaran dari penerapan PP 46 Tahun 2013 tersebut bukanlah unit usaha informal seperti pedagang kaki lima.

2. Analisis Kontribusi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Terhadap Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2)

a. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Utara

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP 46 Tahun 2013) merupakan objek Pajak Penghasilan yang baru berlaku efektif pada Juli 2013. Tujuan dari penerbitan PP 46 Tahun 2013 adalah mengajarkan seluruh Wajib Pajak untuk mulai berkontribusi pada penerimaan negara melalui pembayaran pajak. Sehingga Wajib Pajak yang sebelumnya tidak pernah melakukan pembayaran pajak setelah diterbitkannya PP 46 Tahun 2013 menjadi memiliki kewajiban pembayaran pajak. Sebagai suatu objek penerimaan Pajak Penghasilan baru, pertumbuhan penerimaan PP 46 Tahun 2013 merupakan hal yang sangat menarik untuk diulas. Pertumbuhan penerimaan yang positif dapat menggambarkan tujuan dari penerbitan PP 46 Tahun 2013 tersebut telah tercapai. Dalam menghitung pertumbuhan penerimaan PP 46 Tahun 2013, dapat digunakan formula sebagai berikut (Halim, 2004:163):

$$\text{Growth} = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

Gx : Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak PP 46 Tahun 2013.

Xt : Realisasi penerimaan Pajak PP 46 Tahun 2013 pada Tahun tertentu.

X(t-1):Realisasi penerimaan Pajak PP 46 Tahun 2013 pada Tahun sebelumnya.

Berdasarkan formula tersebut maka pertumbuhan penerimaan PP 46 Tahun 2013 disajikan pada Tabel 4.11 sebagai berikut:

Tabel 4. 11 Pertumbuhan Penerimaan Pajak PP 46 Tahun 2013 di KPP

Pratama Malang Utara

No.	Tahun	Penerimaan PP 46 2013	Tingkat Pertumbuhan (%)
1.	2013	1.300.520.663	-
2.	2014	7.260.997.685	458,3%
3.	2015	9.785.493.767	34,8%
Jumlah		18.347.012.115	
Rata-rata		6.115.670.705	

Sumber: *Seksi Pengolahan Data dan Informasi, (Data diolah Peneliti, 2015)*

Tabel 4.11 menjelaskan tentang penerimaan PP 46 Tahun 2013 mulai tahun penerapan kebijakan tersebut sampai dengan Tahun 2015. Berdasarkan tabel tersebut penerimaan PP 46 Tahun 2013 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada awal penerapan PP 46 Tahun 2013 penerimaan PP 46 Tahun 2013 sudah mampu mencapai sebesar Rp 1.300.520.663. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan PP 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Utara sudah mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak mengenai penerbitan kebijakan baru tersebut. Bapak Cornelius Djoko Kepala Pengawasan dan Konsultasi menjelaskan:

“Meskipun penerapan PP 46 tergolong baru, tapi pertumbuhan penerimaannya tergolong positif dan selalu meningkat. Hal ini didukung dengan potensi jumlah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria PP 46 yang cukup banyak di wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara serta kualitas pelayanan dan pengawasan dari fiskus” (Wawancara tanggal 16 Desember 2015, di Ruang Seksi Pengawasan dan Konsultasi).

Pada Tahun 2014, realisasi penerimaan PP 46 Tahun 2013 mengalami pertumbuhan pesat sebesar 458,3%. Peningkatan pertumbuhan penerimaan tersebut dikarenakan menurunnya tingkat kepatisan Wajib Pajak serta diimbangi melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu menyetor pajak terutang sesuai dengan PP 46 Tahun 2013. Peningkatan jumlah Wajib Pajak juga disebabkan dari Wajib Pajak yang sebelumnya tidak pernah membayar pajak sehingga setelah diterapkannya PP 46 Tahun 2013, Wajib Pajak tersebut dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut.

“Peningkatan penerimaan PP 46 Tahun 2013 yang pesat ada tahun 2014, disebabkan juga karena peningkatan penerimaan dari Wajib Pajak yang sebelumnya belum pernah melakukan pembayaran pajak. Wajib Pajak tersebut lebih banyak dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Meskipun pembayaran pajaknya relatif kecil, namun karena jumlah Wajib Pajak yang dikenakan PP 46 Tahun 2013 banyak. Sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak khususnya PP 46 Tahun 2013” (Wawancara tanggal 11 Desember 2015, di Ruang Seksi Pengawasan dan Konsultasi).

Pada Tahun 2015, terjadi peningkatan penerimaan PP 46 Tahun 2013 sebesar 34,8%. Peningkatan penerimaan tersebut menjelaskan bahwa kebijakan PP 46 Tahun 2013 mampu memperluas partisipasi dan meningkatkan kepatuhan dan kesukarelaan Wajib Pajak terhadap penyetoran Pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak khususnya penerimaan PP 46 Tahun 2013. Hal ini menandakan bahwa maksud dari penerbitan PP 46 Tahun 2013 dalam

memicu kesadaran kepada seluruh Wajib Pajak untuk ikut berkontribusi dalam penyelenggaraan negara melalui pajak dapat dikatakan berhasil.

Meskipun penerimaan PP 46 Tahun 2013 selalu meningkat, namun peningkatan tersebut mengalami dampak terhadap penerimaan objek Pajak Penghasilan lain. Dengan penerapan PP 46 Tahun 2013, penerimaan objek Pajak Penghasilan lain yang meliputi PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 25 mengalami penurunan pada Tahun 2014. Rekapitulasi penerimaan Pajak Penghasilan disajikan pada Tabel 4.12 sebagai berikut:

Tabel 4.12 Rekapitulasi Penerimaan Objek Pajak Penghasilan Lain

Tahun	Objek Pajak Penghasilan			
	PPh Pasal 22	PPh Pasal 23	PPh Pasal 25 OP	PPh Pasal 25 Badan
2013	3.575.237.279	4.822.395.678	7.213.242.272	4.051.954.036
2014	3.728.033.216	4.692.669.098	6.356.260.721	3.185.178.387
2015	4.452.657.055	5.973.410.511	15.740.164.853	7.040.163.929

Sumber: *Seksi Pengolahan Data dan Informasi, (data diolah Peneliti, 2015)*

Tabel 4.12 menjelaskan mengenai penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 25 yang disetor oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Berdasarkan Tabel 4.12, Objek Pajak Penghasilan tersebut masih fluktuatif, hanya penerimaan PPh Pasal 22 yang selalu mengalami peningkatan. Pada Tahun 2014, Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, Pasal 25 yang disetor Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan mengalami penurunan. Penurunan tersebut merupakan dampak penerapan PP 46 Tahun 2013. Setelah diterbitkannya PP 46 Tahun 2013 Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000, tidak diwajibkan melakukan penyeteroran PPh Pasal 25 sehingga pada Tahun 2014 terjadi penurunan.

Sedangkan Penurunan PPh Pasal 23 pada Tahun 2014 disebabkan penggunaan fasilitas Surat Keterangan Bebas (SKB) atas pemungutan PPh Pasal 23 oleh pihak lain. Pada Tahun 2015, penerimaan Pajak penghasilan mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan terjadi peningkatan peredaran bruto maupun dasar pengenaan pajak yang dikenakan objek Pajak penghasilan tersebut. Peningkatan Pajak Penghasilan tersebut juga dikarenakan terjadi peningkatan setoran dari Wajib Pajak yang tidak memenuhi kriteria PP 46 tahun 2013. Bu Isnaini Pegawai *Account Representative*, menjelaskan:

“Peningkatan penerimaan PP 46 Tahun 2013 sebenarnya memiliki dampak terhadap penurunan PPh Pasal 25 (Angsuran), PPh Pasal 22 serta PPh Pasal 23 jika Wajib Pajak memanfaatkan fasilitas SKB untuk dibebaskandari pemotongan dan/ atau pemungutan oleh pihak lain. Dikarenakan objek Pajak yang sebelumnya dikenakan pajak sesuai dengan aturan Undang-Undang Pajak Penghasilan sekarang dikenakan PP 46 Tahun 2013” (Wawancara tanggal 11 Desember 2015, di Ruang Seksi Pengawasan dan Konsultasi).

Dalam meningkatkan penerimaan PP 46 Tahun 2013, KPP Pratama Malang Utara selalu berupaya untuk memaksimalkan pembayaran Wajib Pajak melalui pengawasan dalam pembayaran PP 46 Tahun 2013 dan peningkatan kualitas pelayanan dan konsultasi pegawai pajak. Pengawasan pembayaran tersebut dapat dilakukan melalui pengamatan yang didukung data internal dan eksternal dengan cara analisis pembayaran masa pajaknya serta membandingkan dengan penerimaan sebelumnya yang kemudian diterbitkan surat himbauan kepada Wajib Pajak untuk melakukan klarifikasi atas pembayaran pajak tersebut. Sedangkan peningkatan kualitas dan pelayanan pegawai pajak meliputi keramahan, kelugasan bahasa, serta pemanfaatan media edukasi yang baik agar dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban

perpajakannya salah satunya penyetoran pajak. Sehingga dengan pemahaman Wajib Pajak yang cukup, Wajib Pajak dapat memenuhi kewajibannya yang akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan penerimaan pajak.

b. Kontribusi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) di KPP Pratama Malang Utara

PP 46 Tahun 2013 merupakan objek Pajak Penghasilan baru yang dikelompokkan dalam Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2), sehingga atas penerapannya selalu akan mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2). Hal menarik untuk diteliti adalah seberapa besar kontribusi/ sumbangan yang diberikan oleh penerimaan PP 46 Tahun 2013 yang merupakan objek Pajak Penghasilan baru dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) di KPP Pratama Malang Utara. Kontribusi menurut Kamus Ekonomi Guritno (1992:76) adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Dalam menghitung kontribusi penerimaan PP 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 ayat 2 di KPP Pratama Malang Utara dilakukan dengan cara membandingkan penerimaan pajak PP 46 Tahun 2013 dengan penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) atau dapat disajikan dengan formula sebagai berikut (Halim, 2004: 163):

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan PP 46 Tahun 2013}}{\text{Penerimaan PPh Pasal 4 (2)}} \times 100\%$$

Sehingga berdasarkan formula, maka kontribusi penerimaan pajak PP

46 Tahun 2013 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 ayat 2 di KPP Pratama Malang

Utara dijelaskan dengan kriteria yang didasarkan dalam Halim (2004, 163) kemudian disajikan dalam tabel 4.13:

Tabel 4. 13 Kontribusi Pajak PP 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) di KPP Pratama Malang Utara

No.	Tahun	PP 46 tahun 2013	PPh Pasal 4 (2)	Kontribusi (%)	Kriteria
1.	2013	1.300.520.663	68.268.029.697	1,91%	Sangat Kurang
2.	2014	7.260.997.685	83.120.573.160	8,74%	Sangat Kurang
3.	2015	9.785.493.767	81.140.860.705	12,06%	Kurang
Jumlah		18.347.012.115	232.529.463.562		
Rata-rata		6.115.670.705	77.509.821.187	7,57%	Sangat Kurang

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi, (data diolah oleh peneliti, 2015)

Tabel 4.13 menjelaskan mengenai kontribusi penerimaan PP 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) di KPP Pratama Malang Utara. Berdasarkan Tabel 4.13, kontribusi penerimaan PP 46 Tahun 2013 selalu mengalami peningkatan yang mana pada Tahun 2013 sebesar 1,91% dengan kriteria Sangat Kurang, pada Tahun 2014 sebesar 8,74% dengan kriteria Sangat Kurang, dan sebesar 12,06 dengan kriteria Kurang pada Tahun 2015. Kontribusi penerimaan PP 46 Tahun 2013 akan selalu mengikuti penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2), sehingga meskipun penerimaan PP 46 Tahun 2013 meningkat namun apabila penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) turun maka kontribusi penerimaan PP 46 Tahun 2013 akan ikut menurun.

Berdasarkan Tabel 4.13 kontribusi PP 46 Tahun 2013 selalu mengalami kenaikan. Peningkatan kontribusi PP 46 Tahun 2013 tidak lepas dari keberhasilan penerapan PP 46 Tahun 2013. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari tercapainya maksud dari penerbitan PP 46 Tahun 2013 yaitu memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara

dengan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan. Sehingga dari tahun ke tahun penerimaan PP 46 Tahun 2013 selalu meningkat.

Penerapan PP 46 Tahun 2013 mulai efektif diberlakukan pada bulan Juli 2013. Pada awal tahun penerapannya, penerimaan PP 46 tahun 2013 dengan kontribusi sebesar 1,91% dengan kriteria Sangat Kurang. Kriteria Sangat Kurang tersebut tidak lepas dari penerapan PP 46 Tahun 2013 yang baru berlaku pada pertengahan tersebut, sehingga atas penerapan dan penerimaannya masih belum maksimal. Kontribusi tersebut sangat dipengaruhi dari minimnya pengetahuan Wajib Pajak terkait dengan penerbitan kebijakan pajak baru pada pertengahan tahun tersebut. Bu Isnaini Pegawai *Account Representative* menjelaskan:

“Penerapan PP 46 Tahun 2013 belum dapat dikatakan maksimal. Dengan diterbitkan pada pertengahan tahun tersebut, masih banyak Wajib Pajak yang belum paham. Sebenarnya atas kesalahan penyetoran yang terjadi pada bulan Juli 2013 sudah dilakukan Pemindahbukuan (Pbk) untuk memindahkan Pajak Penghasilan yang seharusnya. Proses Pbk tersebut dilakukan dari PPh Pasal 25 yang dibayar Wajib Pajak ke kode setoran PP 46 Tahun 2013. Cuma atas pelaksanaan Pbk tersebut hanya merubah dari sisi administrasinya saja, dalam Modul Penerimaan Negara (MPN) total penerimaannya hanya yang sesuai dengan kode jenis setoran saja” (Wawancara tanggal 11 Desember 2015, di Ruang Seksi Pengawasan dan Konsultasi).

Pada Tahun 2014, kontribusi PP 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 ayat 2 di KPP Pratama Malang Utara sebesar 8,74% dengan kriteria Sangat Kurang. Meskipun kriteria kontribusinya masih Sangat Kurang, namun presentase kontribusinya mengalami peningkatan. Peningkatan kontribusi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman Wajib Pajak terhadap kebijakan pemajakan baru tersebut semakin meningkat. Selain itu peningkatan juga terjadi dikarenakan peningkatan jumlah Wajib Pajak yang sebelumnya tidak dikenakan

pajak sehingga setelah diterbitkannya PP 46 Tahun 2013 dikenakan pajak. dengan peningkatan jumlah Wajib Pajak tersebut, akhirnya dapat meningkatkan penerimaan PP 46 Tahun 2013 serta dapat meningkatkan presentase kontribusi penerimaan PP 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Utara.

Kontribusi PP 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) pada Tahun 2015 yaitu sebesar 12,06% dengan kriteria Kurang. Peningkatan presentase serta kriteria tersebut dipengaruhi dari pertumbuhan penerimaan PP 46 Tahun 2013 yang positif. Pertumbuhan tersebut mencerminkan kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak dalam menyetor pajak yang terutang semakin meningkat. Peningkatan kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak tersebut tidak lepas dari upaya fiskus dalam melakukan penyuluhan dan penyisiran untuk memberikan edukasi PP 46 tahun 2013 kepada Wajib Pajak. Dengan pemahaman yang baik, Wajib Pajak akhirnya sadar dan memenuhi kewajiban perpajakannya salah satunya melalui penyetoran pajak terutang yang dampaknya penerimaan PP 46 Tahun 2013 mengalami peningkatan.

Penerimaan PP 46 Tahun 2013 merupakan objek Pajak Penghasilan yang tergolong baru. Penerbitan PP 46 Tahun 2013 yang ditujukan untuk mengajarkan seluruh lapisan masyarakat untuk ikut dalam penyelenggaraan negara melalui pembayaran pajak sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak tersebut. Sehingga PP 46 Tahun 2013 dibuat sederhana dan mudah agar dapat memberikan kemudahan dan kesukarelaan kepada Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak. PP 46 Tahun 2013 digolongkan dalam penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) dikarenakan sifat pajaknya yang juga dikenakan secara final.

Sehingga atas penerapannya akan selalu mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2). Besaran kontribusi serta kriteria pajak PP 46 Tahun 2013, juga sangat dipengaruhi oleh Objek PPh final Pasal 4 ayat (2) lainnya. Objek PPh final Pasal 4 ayat (2) yang paling mendominasi di KPP Pratama Malang Utara adalah Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak atas tanah dan Bangunan yang selalu berkontribusi lebih dari 60% dengan kriteria Sangat Baik. Bu Isnaini Pegawai *Account Representative*, menjelaskan

“Secara global penerimaan pajak Orang Pribadi, PP 46 Tahun 2013 dapat meningkatkan penerimaan pajak, karena pada saat penerapan norma Wajib Pajak tersebut memiliki pajak nihil sehingga saat penerapan PP 46 Tahun 2013 banyak Wajib Pajak khususnya Orang Pribadi yang akhirnya melakukan pembayaran pajak. kalau dibandingkan dengan penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) jelas kontribusinya sedikit karena PP 46 Tahun 2013 kan dasar pengenaannya relative kecil yaitu sebesar 4,8 miliar dengan tarif hanya 1%, yang dibandingkan dengan objek PPh Pasal 4 ayat (2) lainnya yang dengan Dasar Pengenaan dan tarif yang lebih besar. Sehingga objek-objek tersebut lebih mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2)” (Wawancara tanggal 11 Desember 2015, di Ruang Seksi Pengawasan dan Konsultasi).

Meskipun penerapan PP 46 Tahun 2013 tidak dapat berkontribusi secara optimal dalam penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), akan tetapi KPP Pratama Malang Utara selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan PP 46 Tahun 2013 melalui penggalan potensi dan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak. Dengan meningkatkan penerimaan PP 46 Tahun 2013, maka diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya dalam penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2). Kegiatan penggalan potensi dilakukan melalui proses pengamatan dengan cara melakukan .dalam penyisiran langsung ke kegiatan usaha Wajib Pajak untuk memberikan pemahaman terkait dengan penerapan PP 46 Tahun 2013 sekaligus bisa dilakukan melalui pengamatan dengan data intansi lain yang belum dimiliki

oleh KPP Pratama Malang Utara. Sedangkan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dapat dilakukan dengan melihat kontinuitas pembayaran Wajib Pajak sesuai dengan masa pajak, apabila terdapat penurunan setoran maupun terdapat masa yang tidak disetor maka KPP Pratama Malang Utara akan menerbitkan himbauan untuk meminta klarifikasi atas keganjilan data tersebut.

3. Analisis Pertumbuhan Wajib Pajak yang Terutang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

a. Wajib Pajak yang terutang Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Utara

Dalam *self assessment system*, Wajib Pajak merupakan aspek penting untuk mencapai target penerimaan pajak yang ditetapkan. Semakin banyak Wajib Pajak yang aktif dalam penyetoran pajaknya maka semakin banyak pula penerimaan pajak yang dikumpulkan. KPP Pratama Malang Utara selalu berupaya untuk selalu memaksimalkan kesadaran Wajib Pajak akan kewajibannya salah satunya penyetoran pajak.

Pada pertengahan Tahun 2013, DJP menerbitkan kebijakan perpajakan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memperluas jangkauan pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang belum pernah berkontribusi dalam penerimaan negara. Sebagai implikasi penerbitan kebijakan tersebut, KPP Pratama Malang Utara selalu berupaya untuk melakukan penyuluhan terkait dengan kebijakan perpajakan tersebut. Dengan penyuluhan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak terhadap PP 46 Tahun 2013. Apabila Wajib Pajak telah sadar dan

faham akan kewajibannya, maka penerimaan PP 46 Tahun 2013 yang dikumpulkan dapat lebih optimal. Berikut disajikan pertumbuhan Wajib Pajak yang memenuhi kriteria PP 46 Tahun 2013 pada Tabel 4.14:

Tabel 4. 14 Pertumbuhan Wajib Pajak yang memenuhi Kriteria PP 46

Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Utara

No.	Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Pertumbuhan (%)
1.	2013	3.570	-
2.	2014	26.309	636,9%
3.	2015	30.188	14,7%
Rata-rata		20.022	217,2%

Sumber: *Seksi Pengolahan Data dan Informasi, (Data diolah Peneliti, 2015)*

Tabel 4.14 menjelaskan pertumbuhan jumlah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria PP 46 Tahun 2013 dari tahun ke tahun selalu meningkat. Pada Tahun 2014, realisasi penerimaan PP 46 Tahun 2013 mengalami pertumbuhan pesat sebesar 636,9% dan sebesar 14,7% pada Tahun 2015. Peningkatan jumlah Wajib Pajak tersebut mencerminkan potensi Wajib Pajak yang dikenakan PP 46 Tahun 2013 selalu meningkat. Dengan peningkatan potensi jumlah Wajib Pajak dan didukung dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi maka akan dapat meningkatkan penerimaan PP 46 Tahun 2013 secara optimal.

Pada awal tahun penerapan PP 46 Tahun 2013, jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Utara yang memenuhi kriteria PP 46 Tahun 2013 sebesar 3.570. Meskipun penerapannya baru pada pertengahan tahun, namun jumlah Wajib Pajak yang sadar kewajiban perpajakan barunya tersebut sudah sekitar 5% dari jumlah Wajib Pajak terdaftar. Jumlah Wajib Pajak tersebut merupakan hasil upaya dari pegawai KPP Pratama Malang Utara dalam mensosialisasikan dan

melakukan penyuluhan terkait dengan kebijakan tersebut. Bapak Satria Pelaksana Ekstensifikasi dan Penyuluhan, menjelaskan

“Setiap terdapat perubahan aturan, kami selalu berupaya untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait dengan kebijakan tersebut. Karena dalam penerapan *self assessment* system, Wajib Pajak merupakan aspek penting dalam keberhasilan pemungutan pajak. Sehingga terkait dengan penerbitan PP 46 Tahun 2013, kami juga melakukan sosialisasi dan penyuluhan dengan berbagai bentuk media” (Wawancara tanggal 14 Desember 2015, di Ruang Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan).

Pada Tahun 2014, Wajib Pajak yang memenuhi kriteria PP 46 Tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 636,9% dari awal tahun penerapannya. Peningkatan jumlah Wajib Pajak tersebut menjelaskan bahwa pemahaman Wajib Pajak serta kesadarannya akan penerapan kebijakan baru tersebut meningkat. Peningkatan tersebut disebabkan juga melalui peningkatan Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi yang sebelum penerapan PP 46 Tahun 2013, menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan netto sehingga pajak terutangnya nihil. Setelah diterbitkannya PP 46 Tahun 2013, Wajib Pajak tersebut akhirnya terutang Pajak Penghasilan sesuai dengan PP 46 Tahun 2013. Sehingga pada tahun tersebut terjadi peningkatan drastis jumlah Wajib Pajak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dijelaskan Bu Isnaini pegawai *Account Representative*,

“Peningkatan jumlah Wajib Pajak yang drastis itu karena banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang dulu pake norma yang pajak terutangnya nihil, sehingga sekarang jadi terutang pajak setelah diterbitkannya PP 46 Tahun 2013” (Wawancara tanggal 11 Desember 2015, di Ruang Seksi Pengawasan dan Konsultasi).

Pada Tahun 2015, jumlah Wajib Pajak mengalami pertumbuhan sebesar 14,7 %. Jumlah Wajib Pajak tersebut disebabkan beberapa faktor yaitu, persepsi

Wajib Pajak yang ingin berkontribusi pada penerimaan negara melalui pajak sesuai dengan kemampuannya serta Wajib Pajak yang antipati terhadap pajak yang mulai berkurang. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, Wajib Pajak yang terutang PP 46 Tahun 2013 selalu mengalami peningkatan. Hal ini juga mencerminkan bahwa upaya KPP Pratama Malang Utara untuk membangun kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya berhasil.

Dalam memudahkan *Account Representative* menganalisis potensi serta melakukan pengawasan Wajib Pajak, maka Wajib Pajak tersebut diklasifikasikan melalui kategori usaha Wajib Pajak. Berdasarkan Tabel 4.6, kategori usaha yang paling berpotensi dalam penerimaan PP 46 Tahun 2013 adalah Wajib Pajak dengan kategori usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar lebih dari 40% dan Kegiatan Jasa Lainnya sebesar lebih 18%. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Cornelius Djoko Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi,

“Potensi Wajib Pajak yang terutang PP 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Utara didominasi dengan kategori usaha perdagangan dan jasa lain. Karena lingkup wilayah kerja memang mendukung kategori usaha tersebut” (Wawancara tanggal 16 Desember 2015, di Ruang Seksi Pengawasan dan Konsultasi).

Meskipun kategori usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor dan Kegiatan Jasa Lainnya memiliki mayoritas Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Utara, namun pertumbuhan Wajib Pajak yang paling baik yaitu Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 1890% Pada Tahun 2014, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Pajak yaitu sebesar 342,86% di Tahun 2015.

Tabel 4.6 menunjukkan pertumbuhan Wajib Pajak yang diklasifikasikan berdasarkan kategori usaha mengalami fluktuatif. Mayoritas Wajib Pajak mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun, hanya beberapa kategori usaha yang mengalami pertumbuhan fluktuatif. Pertumbuhan Wajib Pajak yang mengalami fluktuatif yaitu kategori usaha Pertambangan dan Penggalian serta KLU Lainnya yang mengalami penurunan pada Tahun 2015. Penurunan kategori usaha Pertambangan dan Penggalian tersebut dikarenakan objek penambangan di wilayah kerja Malang Utara yang makin minim sehingga otomatis jumlah Wajib Pajak tersebut menjadi turun.

KLU Lainnya merupakan tidak masuk pada klasifikasi kategori usaha tersebut dikarenakan usaha Wajib Pajak tidak jelas batasannya, dan dikarenakan perubahan kategori usaha yang terjadi pada Tahun 2012 sehingga Wajib Pajak tersebut belum bisa diklasifikasikan pada kategori yang baru. Kenaikan pada Tahun 2014 disebabkan terdapat banyak Wajib Pajak yang kegiatan usahanya tidak jelas batasannya dikarenakan perubahan ketentuan. Selain itu kenaikan pada Tahun 2015 juga terjadi dikarenakan usaha yang dilakukan dengan usaha yang didaftarkan berberda sehingga fiskus memutuskan untuk mengklasifikasikannya di KLU Lainnya sebelum dilakukan perbaikan KLU. Sedangkan Penurunan yang terjadi di KLU Lainnya tersebut terjadi dikarenakan KLU eror maupun KLU lainnya tersebut telah diklasifikasikan dalam kategori usaha yang telah disediakan. Dalam meningkatkan pelayanan dan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, *Account Representative* berupaya untuk membenahi data Wajib Pajak melalui pembenahan KLU dengan cara penyisiran ke lapangan

usaha Wajib Pajak dan membuat berita acara perubahan KLU Lainnya kepada kategori usaha yang telah disediakan.

b. Implikasi pertumbuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Utara

Dalam menjalankan tugas untuk melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak. Seksi Pengawasan dan Konsultasi berusaha untuk meningkatkan pengawasan dan menganalisis potensi Wajib Pajak dengan cara mengklasifikasikan Wajib Pajak melalui kategori usahanya dan dibandingkan dengan jumlah pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengawasan untuk menerbitkan himbauan guna mendapat klarifikasi Wajib Pajak terkait dengan keganjilan pembayaran ataupun data yang dimiliki oleh fiskus.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 merupakan objek Pajak Penghasilan yang tergolong baru yang diterapkan dengan aturan yang mudah dan sederhana. Dengan aturan perpajakan yang mudah, diharapkan dapat mengurangi beban administrasi Wajib Pajak serta fiskus. Berkurangnya beban fiskus yaitu terkait dengan memberikan kemudahan dalam pengawasan kepatuhan Wajib Pajak. Dalam melakukan pengawasan pembayaran Wajib Pajak dan menganalisis potensi Wajib Pajak sebenarnya, fiskus membandingkan antara jumlah Wajib Pajak yang terutang PP 46 Tahun 2013 dengan jumlah

pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak tersebut. Untuk memudahkan menganalisis potensinya, maka fiskus membandingkannya dengan mengklasifikasikan Wajib Pajak tersebut berdasarkan kategori usahanya. Berikut merupakan penyajian data mengenai pertumbuhan jumlah Wajib Pajak berdasarkan kategori usaha yang dibandingkan dengan jumlah pembayarannya yang digambarkan pada Tabel 4.15:

Tabel 4. 15 Pertumbuhan Wajib Pajak serta Pembayaran PP 46 Tahun 2013 berdasarkan Kategori Usaha di KPP Pratama**Malang Utara**

No	Kategori	Kode	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
			Wajib Pajak	Pembayaran	Wajib Pajak	Pembayaran	Wajib Pajak	Pembayaran
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	A	24	6.103.310	205	42.084.856	232	68.295.727
2.	Pertambangan dan Penggalian	B	-	-	14	6.143.814	11	3.192.000
3.	Industri Pengolahan	C	373	28.780.619	2.687	700.858.284	2.778	732.391.749
4.	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin.	E	4	922.941	33	45.380.217	55	65.604.154
5.	Konstruksi	F	52	28.309.523	344	214.499.052	433	388.963.103
6.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	G	1.570	649.439.174	11.961	3.777.141.080	12.727	4.857.961.320
7.	Transportasi dan Pergudangan	H	58	31.083.741	463	141.962.332	473	157.439.958
8.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	I	171	64.362.946	1.043	334.977.961	1.465	362.465.193
9.	Informasi dan Komunikasi	J	112	43.472.382	556	159.178.483	609	152.545.622
10.	Jasa Keuangan dan Asuransi	K	107	37.148.464	798	214.904.843	928	231.751.131
11.	Real Estate	L	-	-	27	5.340.487	55	51.189.044
12.	Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	M	66	13.658.863	392	5.086.000	524	7.399.931
13.	Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha lainnya	N	74	39.445.926	556	289.348.111	857	466.680.022
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	O	19	44.243.663	28	11.175.190	124	198.946.348
15.	Jasa Pendidikan	P	37	23.008.815	323	124.614.924	482	198.711.413

Lanjutan Tabel 4.15

No	Kategori	Kode	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
			Wajib Pajak	Pembayaran	Wajib Pajak	Pembayaran	Wajib Pajak	Pembayaran
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Q	10	13.221.685	199	83.019.372	229	101.778.437
17.	Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi	R	20	13.071.150	126	54.341.336	169	116.485.122
18.	Kegiatan Jasa Lainnya	S	648	93.706.490	5.064	691.341.338	6.633	1.270.820.574
19.	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan	T	4	170.000	46	2.518.747	55	4.868.895
20.	KLU Lainnya	-	221	70.370.941	1.444	354.160.652	1.349	345.615.225
Jumlah			3.570	1.300.520.633	26.309	7.260.997.685	30.188	9.785.414.968

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi (Data diolah Peneliti, 2015)

Tabel 4.15 menjelaskan mengenai pertumbuhan jumlah Wajib Pajak serta pertumbuhan pembayarannya dari tahun ke tahun. Berdasarkan Tabel 4.15, pertumbuhan Wajib Pajak serta pembayarannya masih fluktuatif. Hal ini terkadang dipengaruhi juga dengan keadaan ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia. Sehingga apabila keadaan ekonomi serta moneternya baik maka penerimaannya juga dapat meningkat, namun sebaliknya apabila keadaan ekonomi serta moneternya buruk, maka akan berdampak pada kegiatan usaha Wajib Pajak yang akhirnya bisa mempengaruhi pertumbuhan penerimaan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Malang Utara, Wajib Pajak dengan Kategori Usaha yang memiliki mayoritas unit di KPP Pratama Malang Utara adalah kategori usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor yang mendominasi lebih dari 40% serta Kegiatan Jasa Lainnya lebih dari 18% dari total Wajib Pajak. Berdasarkan Tabel 4.15 dengan mendominasi kategori usaha Wajib Pajak, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor yang mendominasi serta Kegiatan Jasa Lainnya merupakan Wajib Pajak dengan pembayaran yang tinggi yangmana Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor menempati urutan pertama dengan penerimaan sebesar lebih dari 50,62% yang kemudian diikuti dengan kategori Kegiatan Jasa Lainnya yang menyumbang penerimaan sebesar 11,21%. Sedangkan Wajib Pajak paling dalam kategori usaha yang terutang PP 46 Tahun 2013 adalah Pertambangan dan Penggalan yang hanya memiliki Wajib Pajak sebesar 0,04% dari total jumlah Wajib Pajak. Meskipun Pertambangan dan

Penggalian merupakan jumlah Wajib Pajak yang paling sedikit akan tetapi Wajib Pajak yang berkontribusi paling rendah dalam penerimaan PP 46 Tahun 2013 adalah Wajib Pajak dengan Kategori Usaha Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan dengan kontribusi terhadap penerimaan PP 46 Tahun 2013 sebesar 0,04%.

Tabel 4.15 menggambarkan pertumbuhan Wajib Pajak serta pembayarannya masih fluktuatif. Wajib Pajak yang mengalami fluktuatif dalam pertumbuhan yaitu kategori usaha Pertambangan dan Penggalian serta KLU Lainnya yang mengalami penurunan pada Tahun 2015. Penurunan kategori usaha tersebut diakibatkan berkurangnya objek galian serta tambang yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara, sehingga jumlah Wajib Pajak yang melakukan usaha tambang serta galian tersebut menurun sebesar 21% pada tahun 2015 dan berdampak kepada menurunnya jumlah penerimaan dari sektor tersebut sebesar 48%. Bu Isnaini Pegawai *Account Representative* menjelaskan

“Penurunan penerimaan dari kategori usaha pertambangan tersebut itu disebabkan dari objek galian di wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara itu semakin minim mbak, jadi jumlah Wajib Pajaknya menurun yang akhirnya berdampak kepada menurunnya pembayaran pajak dari sektor usaha pertambangan” (Wawancara tanggal 11 Desember 2015, di Ruang Seksi Pengawasan dan Konsultasi).

Pada Tahun 2014 pertumbuhan KLU Lainnya mengalami pertumbuhan positif sebesar 1050% dengan jumlah 1.444, kenaikan tersebut merupakan dampak dari perubahan peraturan yang mengatur tentang klasifikasi Kelompok Lapangan Usaha (KLU) pada oktober 2012 yang berdampak terhadap beberapa

KLU yang akhirnya dengan aturan yang baru menjadi tidak jelas batasan usahanya, sehingga fiskus mengklasifikasikannya pada KLU Lainnya. Sedangkan penurunan pada Tahun 2015 sebesar 6,58% atas Wajib Pajak KLU Lainnya dikarenakan KLU tersebut sudah dilakukan pembenahan oleh fiskus dengan cara mengklasifikasikan ulang KLU tersebut dalam kategori usaha yang telah ditetapkan. Kegiatan pembenahan tersebut dapat dilakukan melalui penyisiran ke lapangan usaha Wajib Pajak yang kemudian dilakukan perubahan melalui pembuatan Berita Acara Perubahan KLU. Penurunan jumlah tersebut akhirnya berdampak penurunan penerimaan PP 46 Tahun 2013 sebesar 2,4% di Tahun 2015. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bu Isnaini Pegawai *Account Representative*

“Pada Tahun 2012 itu terdapat aturan baru yang merubah kategori usaha Wajib Pajak, dampaknya banyak usaha Wajib Pajak batasannya jadi kurang jelas dengan aturan yang baru. Sehingga Wajib Pajak ini dimasukkan dalam KLU Lain dan menyebabkan KLU Lain menjadi meningkat. Nah setelah itu kami mulai melakukan pembenahan KLU dengan mengklasifikasikan ulang kategori usaha tersebut melalui pengamatan langsung ke Wajib Pajak” (Wawancara tanggal 11 Desember 2015, di Ruang Seksi Pengawasan dan Konsultasi).

Selain kategori usaha Pertambangan dan Galian serta KLU Lainnya, pertumbuhan Wajib Pajak kategori lainnya mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah Wajib Pajak tersebut akhirnya berdampak pada meningkatnya penerimaan PP 46 Tahun 2013 dari kategori usaha tersebut. Hal ini menandakan bahwa upaya KPP Pratama Malang Utara dalam mensosialisasikan PP 46 Tahun 2013 kepada Wajib Pajak berhasil. Sehingga Wajib Pajak semakin memahami kewajibannya dan ikut berkontribusi terhadap penerimaan negara yang akhirnya berdampak terhadap meningkatnya

pembayaran PP 46 Tahun 2013 setiap tahunnya. Peningkatan penerimaan paling tinggi adalah kategori usaha Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas dan Udara Dingin sebesar 4816,9% pada Tahun 2014 dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Pajak sebesar 1680,4% pada Tahun 2015. Sedangkan penerimaan paling rendah adalah kategori usaha Pertambangan dan Penggalan serta Real Estate pada Tahun 2014 dan Pertambangan dan Penggalan dengan penurunan pertumbuhan sebesar 48% pada Tahun 2015.

Seiring dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak, maka akan selalu meningkatkan penerimaan dari kategori usaha tersebut. Akan tetapi terdapat keganjilan yang mana terdapat kenaikan pertumbuhan Wajib Pajak namun penerimannya mengalami penurunan. Kategori usaha tersebut adalah Informasi dan Komunikasi serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Pajak. Pada Tahun 2014, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Pajak yang mengalami kenaikan Wajib Pajak 47,37% namun penerimaannya turun sebesar 74,7%. Bu Isnaini Pegawai *Account Representative* menjelaskan

“Sebenarnya atas penghasilan yang diterima oleh administrasi pemerintahan/ bendahara itu tidak dikenakan PP 46 Tahun 2013, ini dikarenakan mereka kurang faham atau salah setor. Soalnya Wajib Pajak yang salah setor ke kode PP 46 juga lumayan banyak. Nah penurunan tersebut karena nilai transaksinya yang turun, sehingga pajak yang disetor menjadi turun. Kalo peningkatan pada tahun 2015 itu disebabkan banyak bendahara yang menyetorkan pajak rekanannya bukan dengan nama rekanannya. Padahal seharusnya bendahara tersebut menyetor atas nama rekanannya” (Wawancara tanggal 14 Desember 2015, di Ruang Seksi Pengawasan dan Konsultasi).

Kategori usaha Informasi dan Komunikasi pada Tahun 2015 mengalami pertumbuhan Wajib Pajak yang positif sebesar 9,53% namun mengalami

penurunan penerimaan sebesar 1,1%. Penurunan penerimaan tersebut tidak lepas dari pengaruh keadaan ekonomi dan moneter. Pada Tahun 2015, keadaan ekonomi Indonesia kurang baik, yangmana terdapat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang sangat tinggi. Hal tersebut menyebabkan iklim usaha menjadi sedikit buruk, yang kemudian berdampak pada penerimaan negara. Bu Isnaini Pegawai *Account Representative* menekankan

“PP 46 kan dikenakan dari omset, jadi apabila omzetnya turun berarti akan berdampak pada menurunnya penerimaan. Kondisi ekonomi dan moneter yang buruk juga berdampak terhadap penurunan penerimaan pada Tahun 2015 dari kategori usaha Informasi dan Komunikasi” (Wawancara tanggal 11 Desember 2015, di Ruang Seksi Pengawasan dan Konsultasi).

Setelah diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang merupakan objek penghasilan baru tersebut. KPP Pratama Malang Utara selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara khususnya penerimaan PP 46 Tahun 2013. Sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, KPP Pratama meningkatkan pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak. Peningkatan pelayanan tersebut meliputi kemudahan dan kualitas konsultasi untuk Wajib Pajak agar dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak. Sehingga apabila Wajib Pajak telah sadar dan faham maka akan berusaha memenuhi kewajiban perpajakannya khususnya menyetor pajak yang dampaknya akan meningkatkan penerimaan pajak. Sedangkan peningkatan pengawasan adalah melalui analisis masa pajak Wajib Pajak minimal 6 (enam) bulan sekali. Analisis masa tersebut menggunakan data internal KPP Pratama Malang Utara yang digunakan bahan untuk menerbitkan himbauan. Setelah dilakukan analisis ternyata terdapat data yang ganjil maka KPP Pratama Malang

Utara akan menerbitkan himbauan untuk meminta klarifikasi Wajib Pajak dan untuk meningkatkan setoran Wajib Pajak. Selain analisis masa pajak, fiskus juga melakukan pengawasan melalui analisis biaya hidup. Analisis biaya hidup dilakukan dengan membandingkan omzet yang dilaporkan dengan biaya oprasional suatu usaha yang sejenis. Apabila terdapat keganjilan maupun perbedaan yang mencolok dengan usaha sejenis maka fiskus akan menerbitkan surat himbauan untuk meminta klarifikasi dari Wajib Pajak.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Terkait dengan pembahasan mengenai “**Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Untuk Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Studi Pada KPP Pratama Malang Utara)**”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Utara

Penerapan PP 46 Tahun 2013 mampu berjalan dengan baik, meskipun dalam penerbitannya masih banyak pro dan kontra. Realisasi penerimaan PP 46 Tahun 2013 selalu meningkat setiap tahunnya yang menunjukkan bahwa maksud dan tujuan dari penerbitan PP 46 Tahun 2013 sudah tercapai. Masih terdapat kendala dalam penerapan PP 46 Tahun 2013 yaitu meliputi: ketelatenan Wajib Pajak, Ketidafahaman Wajib Pajak. Sedangkan kendala internal meliputi: ketersediaan data serta ketidakseimbangan jumlah *account representative* dan Wajib Pajak.

2. Kontribusi pajak atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2).

Tingkat kontribusi pajak PP 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) pada Tahun 2013, 2014, 2015 secara keseluruhan masih dalam termasuk kriteria Sangat Kurang. Tingkat kontribusi tersebut sangat dipengaruhi oleh objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) lain yang lebih dominan yaitu Pengalihan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan.

3. Pertumbuhan Wajib Pajak yang Terutang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Pertumbuhan Wajib Pajak PP 46 Tahun 2013 secara keseluruhan selalu meningkat. Meskipun beberapa kategori usahanya masih fluktuatif yaitu kategori Usaha Pertambangan dan Penggalian serta KLU Lainnya. Pertumbuhan penerimaan PP 46 Tahun 2013 berdasarkan kategori usaha Wajib Pajak masih fluktuatif. Penurunan penerimaan tersebut berasal dari kategori usaha Pertambangan dan Penggalian, KLU Lainnya, Informasi dan Komunikasi, serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Pajak.

B. SARAN

Peneliti akan memberikan saran-saran yang untuk penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, khususnya KPP Pratama Malang Utara:
 - a. Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya meningkatkan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak yang terutang PP 46 Tahun 2013. Dengan peningkatan pembinaan, pengawasan, penggalan potensi yang maksimal maka penerimaan yang dikumpulkan akan lebih optimal.
 - b. Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya meningkatkan akses pertukaran informasi antara instansi lain agar dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan penggalan potensi Wajib Pajak.
 - c. Dalam melakukan pembinaan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, KPP Pratama Malang Utara sebaiknya melakukan upaya

persuasif dalam meningkatkan kesadaran serta kepatuhan Wajib Pajak untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

- d. Berkaitan dengan ketidakseimbangan pegawai pajak dengan jumlah Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak hendaknya diadakan penambahan jumlah *account representative* dan Ekstensifikasi dan Penyuluhan agar pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan penggalian potensi khususnya penerapan PP 46 Tahun 2013 dapat berjalan efektif dan efisien.
- e. Sebagai salah satu dari kebijakan fiskal, Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya selalu melakukan evaluasi mengenai penerapan PP 46 Tahun 2013 untuk mengetahui tingkat pencapaian PP 46 Tahun 2013 terhadap tujuan yang diinginkan. Dengan diadakannya evaluasi diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi Direktorat Jenderal Pajak bagi kebijakan selanjutnya.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan analisis yang lebih mendalam mengenai dampak penerapan PP 46 Tahun 2013 terhadap seluruh objek penerimaan pajak serta pendapat Wajib Pajak dengan diterbitkannya peraturan tersebut. Sehingga dapat mengetahui dampak secara global atas penerapan kebijakan pajak tersebut. Selain itu peneliti selanjutnya dapat menambahkan analisis mengenai dampak penerapan PP 46 dengan penerimaan PPh Pasal 25, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Mohammad. dan Mohammad Asrori. 2014. *Metodologi & Aplikasi: Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arifin, Imamul. 2007. *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Bandung: PT. Setia Purna Inves
- Azwar, Saifuddin. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- B.Ilyas, Wirawan. dan Wahyu Suhartono. 2011. *Hukum Pajak Material 1: Seri Pajak Penghasilan*. Jakarta: Salemba Humanika
- Basrowi, Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Corry N DS, Astri. 2014. *Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2)(Studi Kasus pada KPP Pratama Malang Selatan)*. Malang. Skripsi. Universitas Brawijaya
- Denzin, Norman K. and Yvonna S Lincoln. 2009: *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Frisdiantara, Cristea. dan Imam Mukhlis. 2016. *Ekonomi Pembangunan Sebuah Kajian Teoritis dan Empiris*. Malang: LP Universitas Kanjuruhan Malang.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Markus, Muda. 2005. *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Moleong, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nasution. 2003. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nawawi, Hadari M., 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rahardja, Pratama. dan Mandala Manurung. 2004. *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- _____, Siti Kurnia, dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan: Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sambodo, Agus. 2015. *Pajak dalam Entitas Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Strauss, Anselm. and Juliet Corbin. 2013. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

- Sukirno, Sadono. 2012. *Makro Ekonomi Suatu Pengantar Edisi ketiga*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- T. Guritno. 1992. *Kamus Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Thuronyi, Victor. 1996. *The Law Design and Drafting (Volume 1)*. USA: International Monetary Fund
- Tim Penyusun Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada. 2006. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol.21*. Yogyakarta: FE Universitas Gajah Mada
- Tim Penyusun Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Pajak Penghasilan Final 1% bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013)*. Jakarta Selatan
- Usman, Husaini. dan Akbar Purnomo Setuady. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zuhriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Publikasi Online :

- Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Kota Malang, 2015. “Koperasi dan UKM Unggulan di Kota Malang” diakses pada tanggal 25 November 2015 dari <http://dinkop.malangkota.go.id/2015/09/08/koperasi-dan-ukm-unggulan-di-kota-malang/>
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2015. “Merawat Potensi Pajak Sektor UMKM Melalui Kehumasan” diakses pada tanggal 20 Oktober 2015 dari <http://www.pajak.go.id/content/article/merawat-potensi-pajak-sektor-umkm-melalui-kehumasan-0>.
- Ditjen Cipta Karya, 2003. “Profil Kota Malang” diakses tanggal 25 November 2015 dari ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim/malang.pdf.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Nilai - Nilai Kementerian Keuangan” diakses pada tanggal 25 November 2015 dari <http://www.kemenkeu.go.id/Page/nilai-nilai-kementerian-keuangan>
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. “Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2009-2012” diakses pada tanggal 20 Oktober 2015 dari http://www.depko.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=109:data-umkm-2012&Itemid=93
- Kementerian Pendidikan dan Budaya. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus versi online/daring (dalam jaringan)* diakses pada Tanggal 18 September 2015 dari <http://kbbi.web.id/kontribusi>.
- Pemerintah Kota Malang. “Sejarah Malang” diakses tanggal 25 November 2015 dari <http://malangkota.go.id/sekilas-malang/sejarah-malang>.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2015. “Mengerek Kinerja Perpajakan 2015”. diakses pada Tanggal 14 September 2015 dari <http://setkab.go.id/mengerek-kinerja-perpajakan-2015/>
- Suara Pembaharuan. 2014. “Kontribusi Besar Sektor UKM untuk Ekonomi Nasional” diakses pada Tanggal 14 September 2015 dari <http://www.beritasatu.com/ekonomi/225157-kontribusi-besar-sektor-ukm-untuk-ekonomi-nasional.html>.

Tambunan, Ruston. 2013. “*Ketentuan Terbaru Pajak Penghasilan atas UMKM: Sederhana Tapi Tidak Adil*” diakses pada tanggal 17 Desember 2015 dari <http://ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=51>

Jurnal Online:

Hakim, Fadli. 2015. Analisis Penerapan PP. No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Manado. Manado. Jurnal. Universitas Sam Ratulangi Manado

Purbaningrum, Sabrina Dharmastuti. 2014. *Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada KPP Pratama Blitar*. Malang. Jurnal. Universitas Brawijaya.

Yasa, I Made Sedana. 2015. *Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. Bali. Jurnal. Politeknik Negeri Bali.

Peraturan dan Undang-Undang:

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

_____, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

_____, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

_____, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/ PMK.011/ 2013 Tanggal 30 Juli 2013 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penyeteran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

_____, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER- 32/PJ/2013 Tanggal 25 September 2013 Tentang Tata Cara Pembebasan Dari Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

_____, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-37/ PJ/ 2013 Tanggal 30 Oktober 2013 Tentang Tata Cara Penyeteran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

_____, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE- 42/PJ/2013 Tanggal 2 September 2013 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari

Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

_____, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2014 Tanggal 17 September 2014 Tentang Penegasan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

_____, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

_____, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 Tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

_____, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-321/PJ/2012 Tanggal 10 Juli 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2012 Tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak